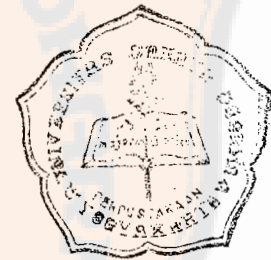


INTEGRASI TIMOR TIMUR

SKRIPSI

Diajukan Untuk Menempuh Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
Program Studi Pendidikan Sejarah



Oleh :

Imelda Kaulin Manesanulu

NIM : 941314036

NIRM : 940051120604120034

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
1999

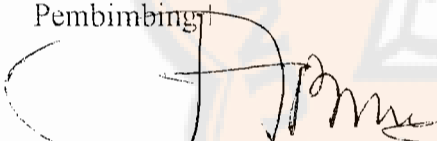
INTEGRASI TIMOR TIMUR

Oleh :

Nama : Imelda Kaulin Manesanulu
NIM : 941314036
NIRM : 940051120604120034

Telah disetujui oleh :

Pembimbing I

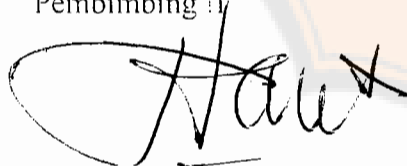


Drs. J.B.M. Midjihardjo

Tanggal

10 Desember 1999

Pembimbing II



Drs A.K. Wiharyanto

Tanggal

10 Desember 1999.

SKRIPSI
INTEGRASI TIMOR TIMUR

Dipersiapkan dan ditulis oleh

Nama : Imelda Kaulin Manesanulu

NIM : 941314036

NIRM : 940051120604120034

Telah dipertahankan di depan panitia penguji

Pada tanggal 23 Oktober 1999.....

Dan dinyatakan memenuhi syarat

Susunan Panitia Penguji

Nama Lengkap Tanda Tangan

Ketua : Drs. Sutarjo Adisusilo J. R.

Sekretaris : Drs. B. Musidi, M. Pd.

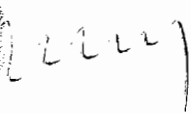
Anggota : 1. Drs. J. B. Mudjihardjo
2. Drs. A. K. Wiharyanto
3. Drs. Sutarjo Adisusilo J.R.

Yogyakarta, 14 Desember

Fakultas Kejuruan & Ilmu Pendidikan

Universitas Sanata Dharma

Dekan,


Dr. Paulus Suparno, S.I., M.S.T.

MOTTO

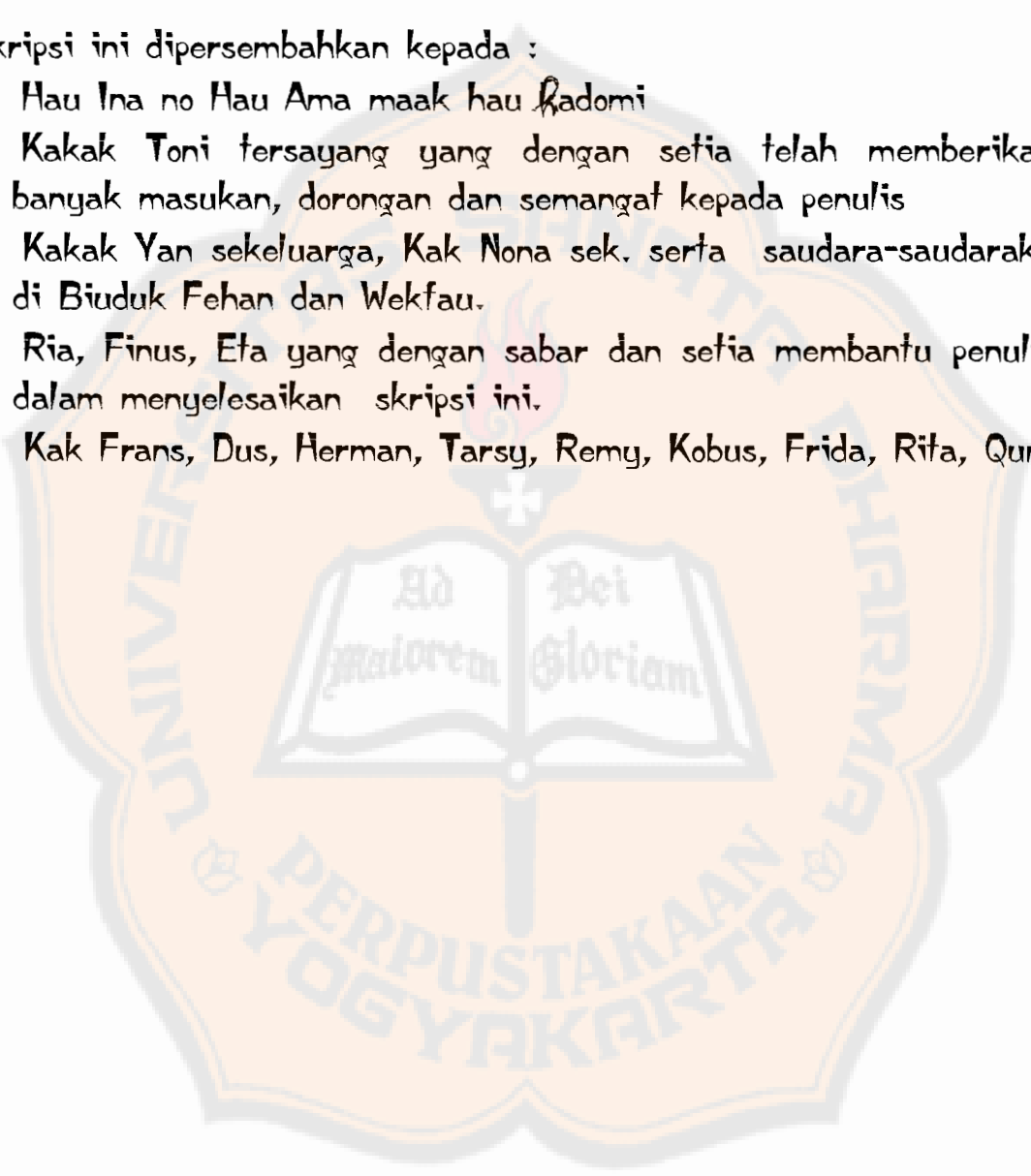
Tuhan mengajar hati tidak dengan gagasan tetapi dengan penderitaan dan pertentangan
(Jean Pierre de Caussade)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada :

- < Hau Ina no Hau Ama maak hau Kadomi
- < Kakak Toni tersayang yang dengan setia telah memberikan banyak masukan, dorongan dan semangat kepada penulis
- < Kakak Yan sekeluarga, Kak Nona sek. serta saudara-saudaraku di Biuduk Fehan dan Wekfau.
- < Ria, Finus, Eta yang dengan sabar dan setia membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- < Kak Frans, Dus, Herman, Tarsy, Remy, Kobus, Frida, Rifa, Qun.



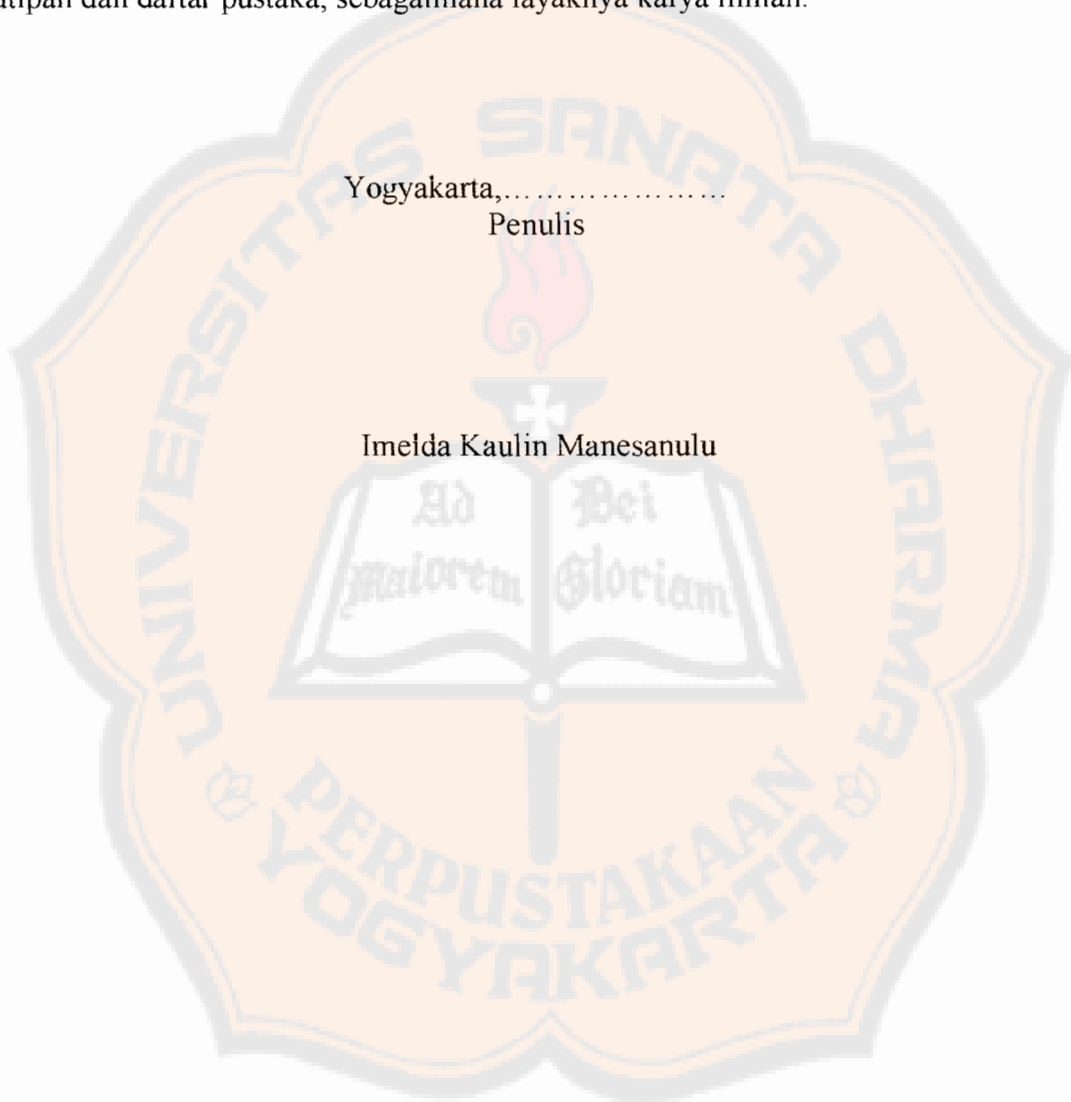
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini tidak memuat karya atau bagian karya orang lain, kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka, sebagaimana layaknya karya ilmiah.

Yogyakarta,.....
Penulis

Imelda Kaulin Manesanulu



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Integrasi Timor Timur

Imelda Kaulin Manesanulu

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul Integrasi Timor Timur bertujuan menjawab 3 permasalahan. Pertama; mengenai bagaimana keadaan di Portugal dan Timor Timur. Kedua; bagaimana proses integrasi di Timor Timur. Ketiga; bagaimana sikap negara-negara di dunia mengenai integrasi Timor Timur serta pernyataan resmi Indonesia mengenai integrasi Timor Timur.

Skripsi ini merupakan hasil penelitian kepustakaan. Sumber-sumber yang digunakan adalah sumber sekunder melalui studi pustaka. Langkah-langkah penelitian yang ditempuh tidak lepas dari sistem penelitian sejarah dengan harapan akan menghasilkan sebuah karya yang logis, jelas dan rasional.

Intisari skripsi ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Pada tahun 1974 rezim Salazar/Caetano berhasil digulingkan oleh perwira-perwira muda dibawah pimpinan Jendral Spínola. Peristiwa ini dikenal dengan Revolusi Bunga. Kudeta 25 April 1974 telah melahirkan dua program yang salah satunya adalah politik dekolonisasi, dimana dalam program politik itu Portugal memberi kelonggaran kepada negeri jajahannya untuk menentukan nasib sendiri. Dengan landasan politik dekolonisasi, maka dalam waktu yang singkat telah berdiri 3 (tiga) partai politik yaitu; UDT, APODETI dan FRETRELIN. Ketiga partai itu mempunyai tujuan masing-masing. Partai UDT menginginkan otonomi luas dan tetap sebagai negara anggota federasi dibawah bendera Portugal, APODETI menginginkan untuk berintegrasi dengan Indonesia, sedangkan FRETRELIN menginginkan kemerdekaan penuh bagi Timor Timur, tanpa bergantung pada salah satu negara manapun.

1975, pada awal perjuangan untuk memenangkan referendum, ketiga partai itu bersikap sportif. Akan tetapi ketenangan ini menjadi terganggu, karena adanya penyusupan anggota partai komunis Portugal. Sejak itu terjadi perubahan besar dalam kehidupan sosial politik di Timor Timur. Persaingan antar partai-partai politik kemudian berubah menjadi perang saudara yang berkepanjangan. Dalam keadaan terjepit maka pada tanggal 28 November 1975, partai FRETRELIN memproklamsikan berdirinya suatu negara dengan nama: "Republik Demokrat Timor Timur". Untuk menandingi proklamasi FRETRELIN, maka gerakan gabungan yang terdiri dari APODETI, UDT, KOTA dan Trabalhista menjawabnya dengan proklamasi tandingan pada tanggal 29 November 1975 yaitu, Pernyataan penggabungan Timor Timur dengan Indonesia. Pernyataan ini kemudian ditandatangani pada tanggal 30 November 1975 di balibo.

1976, Walaupun Timor Timur telah menyatakan untuk bergabung dengan Indonesia, akan tetapi FRETRELIN dalam bidang diplomasi melancarkan serangan-serangan secara offensif terhadap Indonesia, bahwa Indonesia menganekasasi wilayah

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Timor Timur. Selain itu banyak negara memberikan reaksi terhadap pernyataan integrasi. Negara-negara yang mendukung integrasi adalah; India, Saudi Arabia, Malaysia, Australia, Amerika Serikat dan lain-lain. Sedangkan negara-negara yang tidak mendukung integrasi adalah; RRC, Mozambique, Guine-Bissau, Benin, Kamboja Congo dan lain-lain. Timor Timur secara resmi bergabung dengan Indonesia berdasarkan Undang-undang Negara Republik Indonesia No. 7 tahun 1976.



The Integration of East Timor

Imelda Kaulin Manesanulu

ABSTRACT

This thesis, entitled the Integration of East Timor, is to answer 3 main problems. Firstly, what the political situation in Portugal and East Timor was; Secondly, The integration process of East Timor; Thirdly, the attitude of international community towards the integration and Indonesian government's formal statements about the integration of East Timor.

This is a library study work. Consequently, the references used are mainly second-hand resources. The research methods used are carefully kept in line with methods generally applied in the study of history in order to produce a work which is logic, clear and sensible.

The essence of this thesis can be described as follows: In 1974 the Salazar/Caetano rezim was toppled down by young officers led by General Spínola through what is more known as "Flower Revolution". This coup bore two programs. One of them was decolonization policy through which Portuguese government gave way to its colonies to freely decide their futures. Three parties were built in East Timor to answer this policy. They were UDT, APODETI, and FRETELIN. Each of these parties had each own purpose UDT wanted a broad autonomy under Portugal, APODETI wanted an integration to Indonesia and, FRETELIN wanted East Timor to be an independent country of its own.

1975. In the beginning of the efforts to win the referendum, the three parties maintained a peaceful atmosphere. However, the infiltration of members of the Portuguese Communist Party changed the whole sociopolitical life in East Timor. Instead of keeping the honest and fair campaign, the three parties were involved in rivalry, which later became a long-lasting civil war. Under the pressure of the situation, FRETELIN party proclaimed the independence of a country called "Republik Demokrasi Timor Timur". To stand up to the FRETELIN'S proclamation, APODETI, UDT, KOTA and Trabalhista declared their integration to Indonesia. This declaration was later signed on November 30, 1975 in Balibo.

1976. Even though East Timor had declared itself to be a part of Indonesia, FRETELIN diplomatically kept on offensively attacking Indonesia by calling this integration an annexation. The reaction of International community was divided into two. Those, which were for integration, were India, Malaysia, Saudi Arabia, Australia, the USA etc. Those, which were against the integration, were RRC, Mozambique, Guine-Bissau, Benin, Cambodia, Congo etc. East Timor officially was accepted to be one province of Indonesia under the Indonesian Law Act No. 7,1976.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat kasih dan rahmatnya yang begitu melimpah, akhirnya penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi dengan judul “INTEGRASI TIMOR TIMUR “ disusun untuk memenuhi tuntutan akademis dalam mencapai gelar sarjana pendidikan pada Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

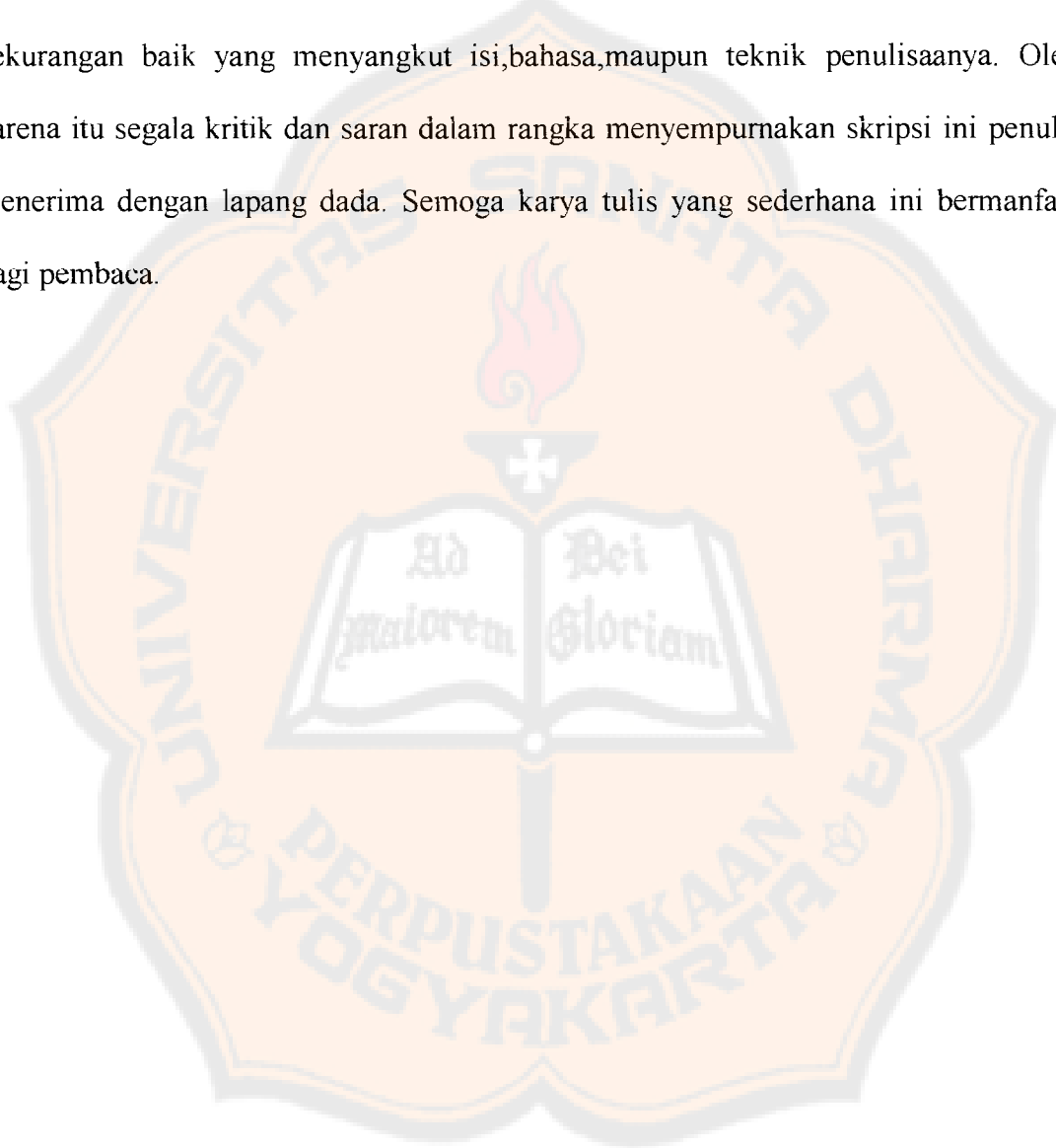
Penulis menyadari bahwa dalam mencari dan mengolah data untuk penulisan skripsi melibatkan banyak pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis dengan tulus hati menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas segala bantuan, dorongan, dukungan dalam bentuk apapun yang telah diberikan kepada penulis. Secara penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ketua Jurusan PIPS Universitas Sanata Dharma yang telah memberikan ijin penelitian.
2. Ketua program studi Pendidikan Sejarah Universitas Sanata Dharma.
3. Bapak Drs. J.B. M. Mudjihardjo sebagai pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, koreksi dan masukan selama penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Drs. A.K. Wiharyanto sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk memberi koreksi selama penyelesaian skripsi ini.
5. Kakak Toni Manesanulu yang telah membantu penulis dalam mengumpulkan data-data.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

6. Teman-teman Sejarah angkatan 1994 atas kerjasama selama penulis selama kuliah hingga terselesainya skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan baik yang menyangkut isi, bahasa, maupun teknik penulisaanya. Oleh karena itu segala kritik dan saran dalam rangka menyempurnakan skripsi ini penulis menerima dengan lapang dada. Semoga karya tulis yang sederhana ini bermanfaat bagi pembaca.

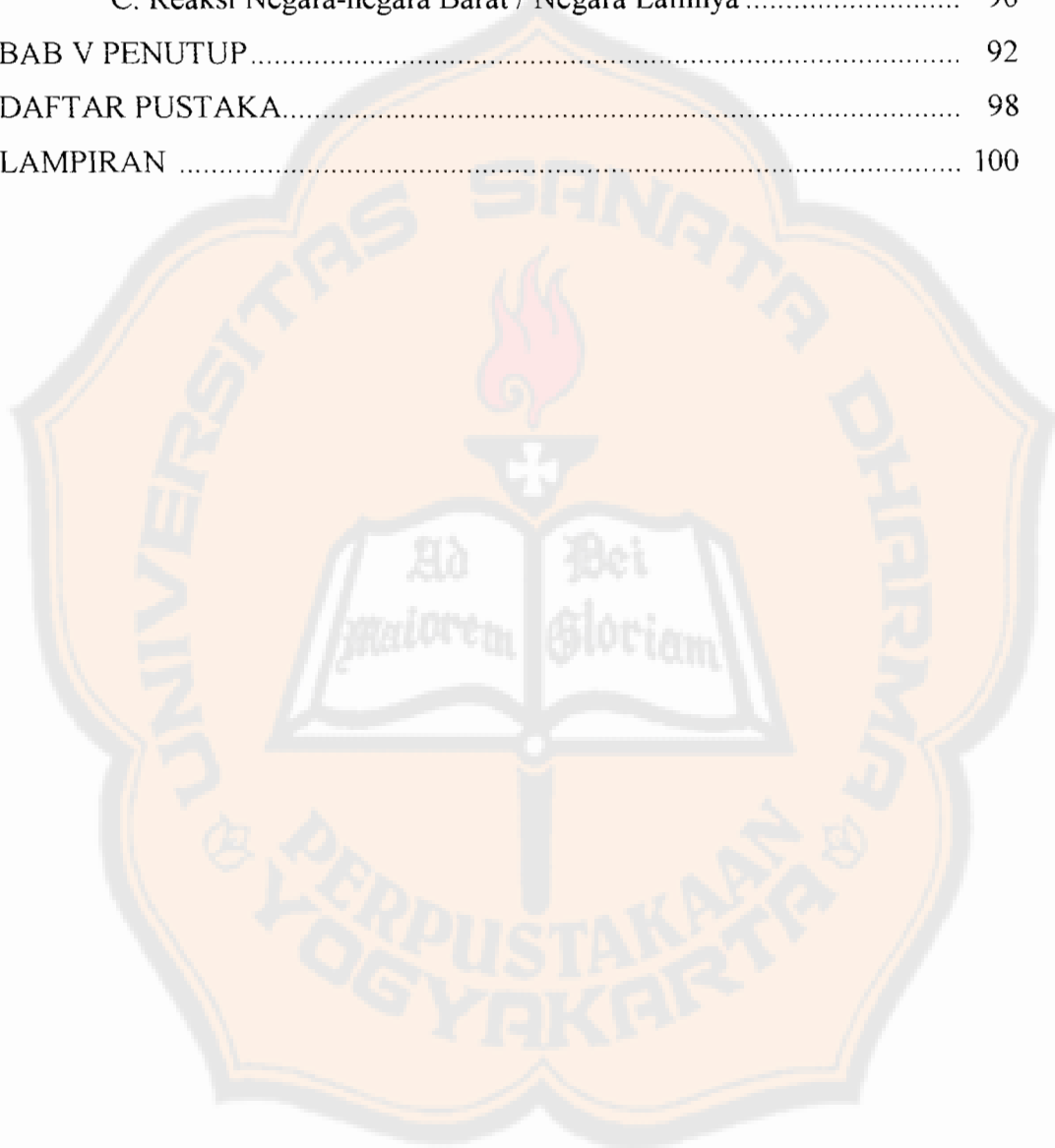


DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
MOTTO.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA.....	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Metodologi Penelitian.....	8
F. Sistematika Penelitian	14
BAB II KEADAAN POLITIK DI PORTUGAL DAN TIMOR TIMUR MENJELANG INTEGRASI.....	16
A. Keadaan Politik di Portugal	16
B. Keadaan Politik di Timor Timur.....	23
C. Timbulnya Partai-partai Politik di Timor Timur.....	28
BAB III PROSES INTEGRASI TIMOR TIMUR.....	53
A. Kondisi Partai Politik Menjelang Integrasi	53
B. Sikap Indonesia Terhadap Situasi Timor Timur	67
C. Proklamasi Partai-partai Politik di Timor Timur	75

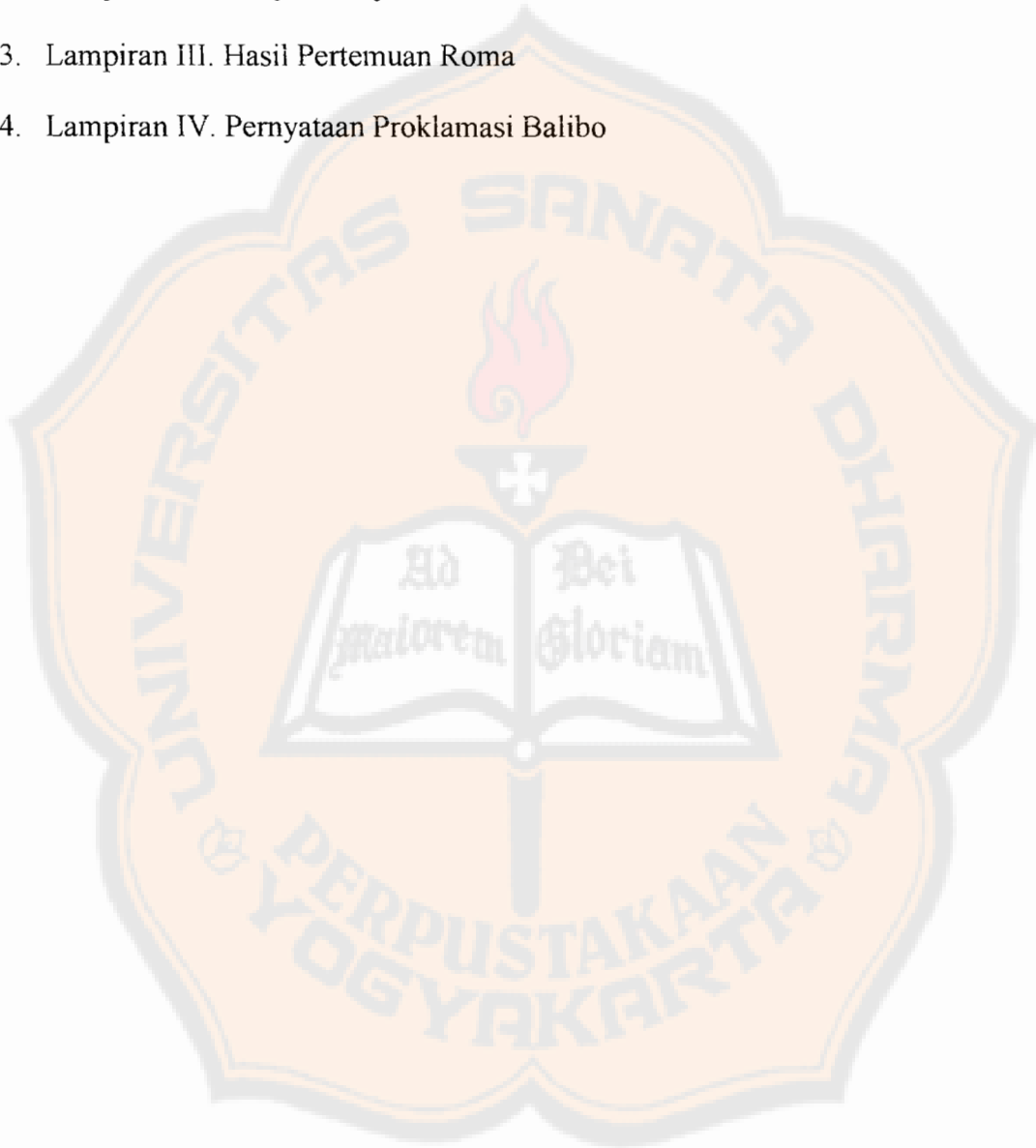
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB IV REAKSI NEGARA-NEGARA DI DUNIA MENEGENAI	
INTEGRASI TIMOR TIMUR.....	84
A. Reaksi Indonesia	84
B. Reaksi Negara-negara Asia dan Afrika.....	86
C. Reaksi Negara-negara Barat / Negara Lainnya.....	90
BAB V PENUTUP.....	92
DAFTAR PUSTAKA.....	98
LAMPIRAN	100



DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran I. Peta Timor Timur
2. Lampiran II. Wilayah Penyebaran Bahasa Daerah Timor Timur
3. Lampiran III. Hasil Pertemuan Roma
4. Lampiran IV. Pernyataan Proklamasi Balibo



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wilayah Indonesia terdiri atas ribuan pulau besar dan kecil kurang lebih 17.508 pulau. Pulau Timor adalah salah satu dari ribuan pulau-pulau itu. Dalam administrasi pemerintahan pulau Timor dibagi atas dua wilayah. Bagian barat dengan ibukota Kupang merupakan wilayah propinsi Nusa Tenggara Timur, bagian Timur merupakan wilayah propinsi Timor Timur yang dulu dijajah Portugal. Wilayah Timor Timur terdiri atas wilayah daratan $\pm 14.609 \text{ km}^2$, termasuk wilayah Oekusi $\pm 778 \text{ km}^2$ pulau Atauro $\pm 150 \text{ km}^2$, dan pulau Jako 11 km^2 ¹⁾ (Lampiran I).

Sebelum kita membahas tentang Timor Timur, terlebih dahulu kita mengetahui keadaan penduduknya. Keadaan penduduk yang dimaksud adalah, ras yang ada di Timor Timur. Meskipun wilayahnya tidak luas, tetapi di huni oleh lebih dari 20 suku bangsa atau ras, yaitu Belu, Makasai, Bunak, Kemak, Idate, Baba, Fataluku, Ilimana dan lain-lain. Dan ada 12 bahasa yang digunakan penduduk sebagai alat komunikasi misalnya bahasa Tetum, Mambai, Kemak, Tokodede, Crafole, Idate dan lain-lain (lampiran II). Di antara suku-suku bangsa itu suku Belu merupakan suku yang paling besar yang berdiam di kabupaten Kovalima, Ermera, Dili dan Viqueque. Karena suku Belu memakai bahasa Tetum

¹⁾ Soekanto, *Integrasi, Kebulatan tekad rakyat Timor Timur* (Jakarta : Perkesit, 1976), hal.3.

maka bahasa Tetum digunakan penduduk Timor sebagai bahasa pengantar. Suku ini juga terdapat di Timor Barat, khususnya daerah kabupaten Belu²⁾

Suku-suku ini sebelum kedatangan Portugis, mereka menganut kepercayaan Animisme yaitu pemujaan terhadap roh-roh halus dan benda-benda yang dianggap mempunyai kekuatan gaib. Sistem pemerintahan sebelum kedatangan Portugis Timor dibagi dalam beberapa kerajaan kecil yang diperintah oleh seorang Liurai (Raja). Dibawah Liurai terdapat Dato yang mengepalai suku, dan suku terdiri dari beberapa kampung yang dikepalai Temukung. Ada tiga Liurai yang besar kekuasaannya yaitu, Liurai Belu Selatan, Liurai Sonba'i dan Liurai Kamanasa. Semua kerajaan di wilayah ini tidak sebesar dan seluas kerajaan di Jawa. Kerajaan-kerajaan ini lebih bersifat kesatuan adat, akan tetapi persatuan dari kerajaan-kerajaan ini mengakui raja di Belu sebagai pemimpin. Kerajaan-kerajaan ini terganggu perkembangannya ketika Portugis masuk ke Timor.

Pada tahun 1511 Portugis merampas Malaka dari tangan pedagang-pedagang Islam. Portugis kemudian berusaha menguasai daerah-daerah penghasil rempah-rempah yaitu, Maluku dan Ternate. Hal ini menyebabkan kerajaan-kerajaan Islam seperti Aceh, Demak, Banten mengadakan perlawanan terhadap Portugis. Faktor yang mempengaruhi orang Portugis mencari jalan ke Asia (kepulauan rempah-rempah) adalah Gospel (menyebarkan agama), Gold (mencari mas atau faktor ekonomi), dan Glori (petualangan dan kejayaan). Dengan

²⁾ Sutrisno, *Timor Timur Bersatu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia* (Semarang: Mandiri Jaya Abadi, 1995), hal. 5.

dorongan ketiga faktor ini Portugis mulai melakukan perjalanan menyusuri pantai barat Afrika. Didaerah Babel-Mandeb mereka bertemu dengan pedagang-pedagang Islam yang telah berabad-abad melakukan perdagangan antara kepulauan Indonesia, Persia, dan Laut Merah. Dengan semangat perang Salib Portugis tidak bisa mentolerir perdagangan ini. Oleh sebab itu timbul bentrokan-bentrokan dengan pedagang-pedagang Islam. Bagi orang Portugis raja-raja di Asia yang bukan beragama Islam dapat menjadi kawan, sedangkan raja yang beragama Islam menjadi musuh Portugis. Tetapi setelah berhasil menemukan jalan ke Indonesia yang kaya akan rempah-rempah, perhatiannya ditujukan untuk mencari kekayaan dengan jalan berdagang, monopoli atau merampas³⁾.

Timor dikenal Portugis setelah mereka merebut Goa (1509) dan Malaka (1511). Nama pulau ini berasal dari istilah "Timur" yang dalam bahasa Portugis disebut Timor. Akhirnya nama tersebut menjadi nama pulau ini. Portugis berhasil mencapai pulau Timor berkat pemandu bangsa Melayu bernama Ismail. Ia bersama armada Antonio de Brito dan Simao Abreu mengadakan perjalanan dari Malaka ke Maluku melalui perairan Nusa Tenggara dan mereka menemukan pulau Timor. Penemuan tersebut dilaporkan kepada raja di Lisboa dan menyebut Timor sebagai pulau besar penghasil cendana, madu dan lilin.

Mula-mula Portugis belum mengadakan hubungan dagang langsung dengan Timor. Bandar untuk berdagang dan pusat penyebaran injil dipilih Solor

³⁾ Marwati, Djonet, Poespanegoro, Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia III*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), hal.41.

pada tahun 1555 dan Portugis juga mendirikan bandar perdagangan dan benteng yang tetap di Solor. Dari tempat ini mereka pergi ke Timor untuk berdagang dan menyebarkan agama yang dilakukan oleh paderi-paderi dari ordo Dominikan. Adapun tujuan didirikan benteng adalah untuk melindungi kampung-kampung Kristen yang ada disekitarnya. Portugis juga membawa pembantu, pedagang dan budak. Sebagian dari mereka berdarah Portugis dan sebagian lagi berdarah Afrika, Asia Tenggara dan India. Kelompok ini kemudian kawin dengan penduduk setempat. Dari perkawinan campuran itulah terbentuk masyarakat Kristen yang disebut Tupas. Dalam perkembangan selanjutnya Tupas memegang peranan penting baik di Flores maupun di Timor⁴⁾.

Kedatangan Belanda di Indonesia pada tahun 1596 sangat mengejutkan Portugis. Belanda berusaha merebut perdagangan di Indonesia dengan jalan menguasai kota-kota penting dan berusaha menghancurkan Portugis. Tahun 1609 Jayakarta direbut, menyusul Malaka pada tahun 1641. Dengan jatuhnya kota-kota ini maka Portugis mengalami kekalahan dalam menghadapi Belanda. Hal ini menyebabkan Portugis mengalihkan perhatiannya ke Pulau Timor.

Di pulau Timor mereka mulai menetap di Mena dan Lifau, bahkan pada tahun 1645, benteng Portugis pertama didirikan di Kupang. Bertahun-tahun lamanya berbagai usaha dilakukan Belanda untuk mengusir Portugis dari Nusa Tenggara Timur (Timor Barat), tetapi tidak berhasil. Pada akhirnya kedua bangsa ini melakukan perjanjian perbatasan kekuasaan pada tahun 1859. Dalam

⁴⁾ Susanto Zudhi, *Sejarah Perjuangan Rakyat Timor Timur*, (Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995), hal.15.

perjanjian itu disebutkan bahwa pulau Flores dan Solor diserahkan Portugis kepada Belanda sebagai imbalannya Belanda menyerahkan daerah Maubara dan Uang 80.000 Loins. Sejak itu daerah yang dikuasai Portugis adalah bagian Timur Pulau Timor dan daerah Oekusi. Di bawah pemerintahan Portugis telah membawa pengaruh besar bagi daerah ini. Kebebasan yang semula dimiliki oleh setiap daerah (raja) berangsur-angsur mulai hilang. Sebaliknya lama kelamaan kekuasaan Portugis bertambah kuat⁵⁾.

Seiring dengan kedatangan Portugis diikuti oleh para misionaris. Niat Portugis untuk menguasai daerah dan perdagangan ditentang keras oleh rakyat. Sebaliknya para misionaris diterima rakyat dengan tangan terbuka, sehingga banyak yang meninggalkan kepercayaan aslinya untuk memeluk agama Katolik.

Untuk mendukung pelaksanaan penjajahannya, Portugis membentuk suatu pemerintahan kolonial di Portugis. Pada tahun 1665, Raja muda Portugis di India menunjuk Simao Luis sebagai penguasa di Timor. Pelaksanaan pemerintahan itu selalu merugikan rakyat karena disertai dengan berbagai aturan seperti pajak yang tinggi, kerja paksa dan penyesuaian bahan makanan. Tindakan semena-mena yang dilakukan oleh pihak penjajah Portugis terhadap penduduk akhirnya timbul berbagai pemberontakan, yang dilakukan oleh kelompok kecil di masyarakat secara spontan. Tetapi ada juga dikalangan masyarakat di beberapa daerah misalnya peperangan di Manufahi dan Viqueque. Akan tetapi perjuangan itu

⁵⁾ Noor M. Lahirnya *Propinsi Timor Timur*, (Jakarta : Alamanak, 1995), hal.7.

mengalami kekalahan karena kurang kompaknya masyarakat, dan tidak sebandingnya persenjataan dan logistik⁶⁾.

Masalah Timor-Timur muncul keatas setelah pemerintah Portugal mengeluarkan undang-undang dekolonialisasi tahun 1974. Dengan dasar itulah muncullah beberapa partai politik seperti, Uniao Democratica Timorese (Uni Demokrasi Timor atau UDT), Associacio Democratica Popular Timorese (Perkumpulan demokrasi rakyat atau APODETI) dan Frente Revolucionaria de leste Indepedente (partai Sosial Demokrat atau FRETRELIN). Partai UDT beranggotakan pegawai pemerintah dan orang-orang Portugis yang berada di Timor Timur. Tujuan dari partai ini adalah membentuk negara Timor Timur merdeka dan tetap menjadi negara bagian dari Portugis. Partai yang kedua adalah partai APODETI, anggotanya kebanyakan penduduk asli Timor Timur. Tujuan dari partai ini menginginkan Timor Timur bersatu dengan Indonesia. Partai yang ketiga adalah FRETRELIN, anggota-anggotanya terdiri dari pegawai-pegawai rendah, kaum buruh dan mahasiswa-mahasiswa yang baru kembali dari Portugal. Tujuan dari partai ini ialah ingin mendirikan negara sendiri. Dengan demikian timbul persaingan antara ketiga partai itu yang melibatkan Indonesia ikut campur dalam menyelesaikan masalah tersebut. Beberapa pertemuan netral seperti di Roma dan London telah dilaksanakan untuk mencari jalan terbaik tetapi gagal. PBB juga turun tangan membantu menyelesaikan masalah ini. Tetapi usaha ini tetap gagal.

Persaingan antar ketiga partai ini telah meningkat menjadi bentrokan

⁶⁾ Sutrisno, *op. cit.*, hal. 15 –16.

bersenjata. tindakan kejam FRETELIN yang tidak lagi memikirkan persaudaraan makin memperjelas akan aliran politiknya. Partai UDT kemudian bersatu dengan partai APODETI, KOTA, Tralabista, untuk bergabung dengan Indonesia, kekompakan antara partai ini (UDT, APODETI, KOTA dan Tralabista) dan didukung oleh semangat juang yang tinggi, akhirnya menghantarkan Timor-Timur ke gerbang Integrasi yang ditandai dengan Proklamasi Balibo.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan Uraian di atas maka dapat dirumuskan masalah dalam pertanyaan-pertanyaan ini yang di harapkan mampu memperjelas mengenai masalah integrasi Timor-Timur .

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana keadaan politik di Timor-Timur dan Portugal menjelang integrasi tahun 1976?
2. Bagaimana proses Integrasi Timor-Timur itu ?
3. Bagaimana reaksi negara-negara di dunia terhadap integrasi Timor-Timur.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai keadaan politik di Portugal dan di Timor Timur.
2. Untuk mengetahui proses integrasi Timor Timur.
3. Untuk mengetahui reaksi negara-negara di dunia terhadap integrasi Timor

Timur ke dalam wilayah Republik Indonesia.

D. Manfaat Penelitian .

Dengan penelitian ini hasilnya diharapkan bermanfaat:

1. Manfaat secara praktik, bagi dunia pendidikan dengan penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan tentang sejarah integrasi Timor Timur, sehingga dapat dipakai sebagai sumber atau acuan dalam pengajaran.
2. Manfaat secara teoritis, dengan penelitian ini menambah khasanah sumber bacaan untuk umum, sehingga dapat mengetahui sejarah integrasi Timor Timur.

E. Metodologi Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam rangka penulisan ini adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan historis yang terdiri dari 4 tahap⁷⁾.

a. Tahap Heuristik

Pada tahap heuristik ini penulis mengumpulkan data sebanyak mungkin dari berbagai sumber. Untuk mendapat sumber tertulis penulis mengadakan studi literatur dan dokumen tentang sejarah integrasi Timor Timur. Mengingat bahwa tulisan mengenai integrasi masih kurang, sehingga sulit untuk menggambarkan integrasi secara lengkap dan menyeluruh. Untuk melengkapi kekurangan itu

⁷⁾ Louis , Gottschalk, *Mengerti Sejarah* (terj. Nugroho Notosusanto) (Jakarta: UI Press 1986), hal. 34.

penulis menggunakan berbagai macam majalah, surat kabar, serta dokumen-dokumen

b. Kritik Sumber.

Kritik sumber merupakan tahap penelitian sejarah setelah pengumpulan data. Kritik sumber bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kredibilitas dan otentisitas. Kritik sumber pada penelitian sejarah adalah hal yang sangat penting karena kritik sumber mempunyai tujuan untuk menghindari kepalsuan sumber, apalagi sebagian besar sumber merupakan sumber sekunder. Dengan demikian peneliti akan mengadakan penelitian terhadap sumber secara maksimal supaya hasilnya mendekati kebenaran.

Salah satu cara yang ditempuh penulis adalah melakukan kritik terhadap data yang telah dikumpulkan agar memperoleh data yang dapat dipercaya. Kritik intern yaitu membandingkan antar sumber, apabila pembandingnya positif, maka sumber tersebut bisa diakui kredibilitasnya. Sedangkan untuk melakukan kritik ekstern biasanya dilakukan dengan cara meneliti bahan yang dipakai, jenis huruf, gaya bahasa, tahun dan tanggal. Setelah identitasnya terbukti asli, baru diteliti isinya apa apakah isi pernyataan, fakta-fakta dan ceritanya dapat dipercaya. Untuk itu diidentifikasi penulisnya beserta sifat dan wataknya, daya ingatannya, dan jauh dekatnya penulis dari peristiwa itu.

Pada umumnya sumber seperti surat kabar dan majalah tidak memerlukan kritik ekstern karena sumber itu memuat sejumlah data tentang apa, siapa, kapan, dimana, dan bagaimana. Peneliti perlu menyelidiki hal mana yang sesuai dengan pokok penelitian kemudian menyediakannya lewat pengolahan

sebagai fakta-fakta . Hasil dari kritik sumber ialah fakta yang merupakan unsur-unsur bagi rekonstruksi.

c. Interpretasi

Tahap interpretasi adalah tahap menafsirkan fakta-fakta yang diperoleh agar hasil interpretasi tepat perlu lebih dahulu melakukan penganalisaan terhadap fakta, mengapa dan bagaimana terjadinya, apa saja yang mempengaruhi keberadaanya. Setelah fakta dianalisa kemudian dipadukan agar menjadi satu kesatuan yang utuh dan kemudian mencari arti keseluruhannya

d. Tahap penulisan

Tahap penulisan merupakan tahap akhir dari pendekatan historis. Pada tahap ini akan disusun sejarah integrasi Timor Timur berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh secara sistematis. Penulisan sejarah integrasi Timor Timur ini secara keseluruhan terdiri dari empat Bab.

Dalam Bab Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian , sistematika penelitian.

Dalam Bab II akan dibahas mengenai perkembangan politik Portugal dan Timor Timur pada tahun 1974, dimana terjadi “Red Flowers Revolution” yang menumbangkan pemerintah rezim Salazar/Caetano yang otoriter dan fasistis. Pemerintahan Salazar kemudian diganti oleh Junta de Salcacao nasional/ Junta Penyelamat Nasional dibawah pimpinan jendral Antonio Spnola. Revolusi ini berpengaruh bagi daerah-daerah jajahan Portugal salah satunya Timor Timur yang berusaha melepaskan diri dari penjajahan Portugal. Pada tahun 1974 ini pula

tumbuh partai-partai politik di Timor Timur yaitu, UDT, APODETI, FRETELIN yang mempunyai program dan tujuan politik masing-masing.

Dalam Bab III akan dibahas mengenai proses integrasi Timor Timur. Proses ini dimulai dengan pertentangan antar partai di Timor Timur yang mengakibatkan perang saudara, kebijakan pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan konflik antar partai di Timor Timur. Dan yang terakhir adalah pernyataan proklamasi Balibo sebagai pernyataan resmi Timor Timur bergabung dengan Indonesia.

Bab IV menguraikan tentang bagaimana reaksi negara-negara di dunia mengenai pernyataan Timor Timur untuk berintegrasi dengan Indonesia.

Bab V merupakan bab penutup yang akan menyimpulkan seluruh bab dalam satu kesatuan .

2.Sumber-sumber penelitian.

Untuk membahas masalah diatas maka dipakai beberapa sumber untuk menjawab permasalahan diatas. Sumber-sumber yang digunakan dikategorikan dalam 2 (dua) jenis yaitu, sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah kesaksian dari seorang saksi yang dengan mata kepala sendiri atau sumber yang dihasilkan oleh orang atau lembaga atau hasil rekaman sejaman dengan peristiwa itu.

Menurut Louis Gottshalk sumber primer harus asli dalam arti kesaksian tidak berasal dari sumber lain melainkan dari tangan pertama. Sedangkan sumber

sekunder adalah sumber yang dihasilkan oleh orang atau lembaga yang tidak hadir dari peristiwa itu (sumber dari tangan kedua).

Dalam penulisan ini penulis menggunakan sumber utama dan sumber pembanding. Adapun sumber utamanya adalah *Integrasi, Kebulatan Rakyat Timor Timur*, oleh Soekanto, *Hari-hari Terakhir Timor Portugis*, oleh T. Tomodok, *Saksi Mata Perjuangan Integrasi Timor Timur* oleh Hendro Subroto, *Lahirnya Propinsi Timor Timur* oleh M. Noor.

Sedangkan sumber pembandingnya adalah *Pembantaian di Timor Timur*, diterbitkan oleh Alamanak Republik Indonesia, *Timor Timur Bersatu Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*, oleh Sutrisno, *Sejarah Perjuangan Rakyat Timor Timur*, oleh Susanto Zuhdhi, *Proses Integrasi kedalam Wilayah Republik Indonesia*, Kerja sama Lembaga ketahanan Nasional perhimpunan persahabatan Indonesia-Portugal 1995, *Manusia Timor Timur dan Kesejahteraan Hidup Manusia Presepsi dan Perilakunya (sebuah studi di kabupaten Dili Timor Timur)*, oleh Y Trikromo Argo dkk, *Perjuangan Kemerdekaan Rakyat Timor Loro Sae*, oleh Hamid Rusdie, dkk, *Sejarah Indonesia III*, oleh Nugroho Notosusanto dan Marwati Djoenad, *Timor Timur Nasionalisme, Kolonialisme*, oleh Jollife. J, *Timor, The Stilborn Nation*, oleh Nicol B, *Perang Tersembunyi (Sejarah Timor Timur yang Terlupakan)*, oleh John G. Taylor.

Istilah integrasi berasal dari bahasa Latin *Integrare* artinya memberi tempat dalam suatu keseluruhan. Menurut D. Hendropuspito dalam bukunya sosiologi sistematik istilah integrasi berarti membuat unsur-unsur tertentu menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Yang dimaksud dengan istilah integrasi itu

adalah penyatuan unsur-unsur yang menyangkut bidang politik, sosial dan budaya. Hal ini jika dikaitkan dengan integrasi Timor Timur dengan Indonesia maka pernyataan integrasi pada saat itu baru berhasil mencapai pada tahap bidang politik.

Dikatakan baru mencapai pada tahap bidang politik karena pada dasarnya kekuasaan terpusat pada Jakarta atau pada pemerintahan Indonesia. Sedangkan dalam bidang sosial dan budaya integrasi Timor Timur belum menyatu dengan Indonesia. Hal ini disebabkan karena tidak adanya proses penyesuaian antar unsur kebudayaan yang saling berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan masyarakat serta belum menyatunya masyarakat Timor Timur menjadi suatu keseluruhan sebagai bangsa Indonesia.

Kenyataan dapat kita lihat bahwa walaupun Timor Timur telah bergabung dengan Indonesia selama 22 tahun, tetapi mereka tetap menganggap bahwa mereka bukan bagian dari bangsa Indonesia. Orang Timor Timur cenderung untuk bergaul dalam kelompoknya tersendiri, dan tidak mau berbaur atau bergabung dengan kelompok-kelompok yang lain selain orang Timor Timur sendiri.

Hal ini terbukti bahwa Timor Timur tetap berkeinginan untuk memisahkan diri dari negara kesatuan Indonesia. Kenyataan yang harus diterima oleh pemerintah Indonesia bahwa dengan adanya jajak pendapat atau referendum ternyata sebagian besar rakyat Timor Timur lebih memilih untuk mendirikan negara sendiri daripada bergabung dengan Indonesia.

F. Sistematika Penelitian

Untuk mendapat gambaran menyeluruh mengenai skripsi ini maka sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Perumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Metodologi Penelitian
- F. Sistematika Penelitian

BAB II : KEADAAN POLITIK TIMOR TIMUR DAN PORTUGAL MENJELANG INTEGRASI

- A. Keadaan Politik di Portugal
- B. Keadaan Politik di Timor Timur
- C. Timbulnya Partai-Partai di Timor Timur.

BAB III : PROSES INTEGRASI TIMOR TIMUR

- A. Pertentangan politik di Portugal
- B. Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Menyelesaikan
Konflik Antar Ketiga Partai di Timor Timur
- C. Pernyataan Proklamasi Balibo

BAB IV : REAKSI NEGARA-NEGARA DIDUNIA MENGENAI INTEGRASI TIMOR TIMUR

- A. Reaksi Indonesia

B. Reaksi Negara-negara Asia

C. Reaksi Negara-negara Barat/negara-negara lainnya

BAB V : PENUTUP



BAB II

KEADAAN POLITIK DI PORTUGAL DAN TIMOR TIMUR

MENJELANG INTEGRASI

A. Keadaan Politik di Portugal

Portugal adalah salah satu negara di daratan Eropa yang terletak diujung barat daya Eropa menghadap samudra Atlantik dan memegang kunci jalur pelayaran untuk masuk laut tengah. Portugal, tepatnya terletak antara 42° 91' dan 36° 28' Lintang Utara 6° 11' dan 9° 30' sebelah barat Greenwich⁸⁾.

Sebagai kolonis Eropa, Portugal termasuk kolonis tertua. Portugal juga merupakan kolonis yang paling akhir melepaskan koloni-koloninya. Dengan gigih ia mempertahankan cengkramannya terhadap koloni-koloni dengan tidak mempedulikan desakan-desakan dan kecaman-kecaman dari negara-negara lain. Portugal termasuk negara kecil, baik dari segi kekayaan alam maupun keuangannya, perekonomiannya masih berkisar pada pertanian yang menyerap 40% dari tenaga kerja. Sedangkan industrinya belum berkembang.

Jajahan Portugal (Portugis) ialah: Angola (Afrika Barat), Guinea Bissau (sebelah Utara Angola), Cape Verde, Sao Tome, Principe (lepas pantai Afrika Barat), Mozambique (Afrika Timur), Timor Portugis dan Macao.. Sampai tahun 1951 negeri-negeri jajahan di Asia Afrika secara resmi memiliki status koloni dan ditempatkan menteri-menteri koloni, yang menetapkan garis-garis besar pemerintahan kolonial dan Gubernur Jendral untuk melaksanakan pemerintahan di

⁸⁾ Soekanto, *op. cit.*, hal. 25.

wilayah masing-masing, dan sejak tahun 1961 penduduk seluruh propinsi diberi hak untuk menjadi warga negara Portugal.

Portugal berusaha untuk mempertahankan koloni-koloni karena berbagai alasan. Pertama, sebagai negara kecil dan miskin Portugal merasa memerlukan koloni-koloninya untuk menunjang ekonomi yang lemah dan untuk menyalurkan sebagian kelebihan penduduknya. Selain itu karena perkembangan historis, peranan Portugis sebagai negara koloni berakar dalam kesadaran nasional, sehingga bangsa Portugis lebih terikat dengan bangsa-bangsa jajahannya.

Kebanyakan politisi Portugis yakin bahwa dekolonisasi yang dilakukan dengan cepat oleh negara-negara kolonial lainnya atas tekanan intern maupun ekstern merupakan kesalahan besar, karena kenyataannya banyak negara di Afrika belum siap untuk siap untuk memperoleh kemerdekaan. Sebagai alasannya Portugal menunjukkan contoh di Kongo dimana sesudah mendapat kemerdekaan, terjadi kekacauan di negara ini. Dengan demikian sejak UUD 1933 Portugal hidup terasing diluar aliran pokok opini dunia, sehingga Portugal kebal terhadap gerakan-gerakan politik di negara-negara lain dan skeptis terhadap gagasan-gagasan liberal, seperti hak untuk menentukan nasib sendiri dan berpemerintahan Supranasional.

Terhadap kecaman-kecaman opini dunia pemerintah Portugal mengemukakan bahwa kolonialisme Portugal berlainan dengan kolonialisme negara-negara lain, karena negeri jajahan Portugal merupakan bagian integral Portugal. Seperti apa yang telah dikatakan oleh penulis diatas bahwa sejak tahun 1951 negeri-negeri jajahan Portugal mempunyai status propinsi negara Portugal, dan

sejak tahun 1961 penduduk semua propinsi diberi hak untuk menjadi warga negara Portugal⁹⁾.

Dengan dasar pertimbangan ini pemerintah Portugal tidak menghiraukan aspirasi-aspirasi rakyat negeri jajahannya dan menindak semua gerakan kemerdekaan. Pemerintah kolonial hanya mengizinkan satu partai politik di negeri-negeri jajahannya yaitu: “Uni Nasional” yang kemudian dirubah namanya menjadi “Aksi Nasional Rakyat”. Hal ini juga berlaku dinegara Portugal sendiri. Partai-partai politik lainnya dilarang, sehingga kaum nasionalis terpaksa melakukan gerakan bawah atau mengungsi ke negara-negara tetangga untuk melanjutkan perjuangannya. Karena sikapnya yang keras terhadap dekolonisasi, maka Portugal paling sering menjadi sasaran resolusi PBB. Akan tetapi Portugal tetap ngotot dan baru sadar setelah kewalahan menghadapi perang kolonial, yang mendorong terjadinya kudeta militer pada tanggal 25 April 1974¹⁰⁾.

1. *Movimento dan Revolusi Bunga*

Keadaan Portugal yang semakin memburuk, akibat perang yang selama 13 tahun di Afrika memberi beban finansial yang berat bagi Portugal. Selain itu meskipun perang kemerdekaan di Afrika tidak dimenangkan oleh negara-negara Afrika, tetapi situasi perang berkembang kearah tidak ada harapan bagi kolonialisme Portugal.

Dalam situasi negara yang demikian, menyadarkan para perwira muda yang terdiri dari Letnan sampai Mayor. Mereka menghadapi kenyataan bahwa, betapa beratnya perang kolonial di Afrika. Untuk menolong keadaan yang makin

⁹⁾ Alex Dinut, *Proses integrasi Timor Timur kedalam wilayah Republik Indonesia* (Jakarta: Lembaga Ketahanan Nasional, Perhimpunan persahabatan Indonesia-Portugal), Hal. 12.

buruk mereka bekerja dibawah tanah dalam lingkungan angkatan bersenjata. Sejak tahun 1972 melalui kelompok-kelompok Perwira Muda dipersiapkan kudeta terhadap rezim Salazar atau Caetano. Pada tahun 1973 gerakan bawah tanah ini telah kuat dan mencapai taraf gerakan nasional. Akhir tahun 1973 seratus orang Mayor dan kapten berkumpul di kota Evora dan mendirikan Movimento sebagai wadah gerakan. Untuk itu Movimento menghubungi Jendral Spinola yang dianggap oleh gerakan ini tidak loyal terhadap rezim Salazar atau Caetano yang dianggap cukup berwibawa untuk tampil ke depan. Spinola menerima ajakan perwira muda Movimento tetapi mengajukan dua syarat yaitu:

- a. Kebijaksanaan keputusan terakhir mutlak ada ditangannya dengan jaminan ketentuan yang tercantum dalam undang-undang dasar.
- b. Perwira-perwira muda sebagai promotor revolusi harus tunduk kepadanya¹¹⁾.

Dengan demikian, pada tanggal 25 April 1974 terjadi kudeta militer yang dikenal dengan revolusi bunga atau "Red Flowers Revolution". Kudeta ini dimulai dengan suatu gerakan serentak menangkap perwira-perwira tinggi diberbagai pangkalan angkatan bersenjata yaitu, Komandan Pangkalan Santarem, Tomar, Mairah, Estremos, Visue dan lain-lain. Perwira-perwira tinggi lainnya yang dinilai konservatif dan mendukung rezim Salazar atau Caetano dipecat dari jabatannya. Selain itu Spinola memanggil semua tokoh politik yang lari keluar negeri atau dipenjarakan semasa rezim lama¹²⁾.

Untuk melaksanakan tugas itu, maka dikeluarkan amnesti bagi semua tahanan politik. Golongan-golongan oposisi yang dipenjarakan atau melarikan diri keluar

¹⁰⁾ *Ibid*, hal. 14.

¹¹⁾ Soekanto, *op. cit.*, hal. 34.

negeri dan yang melakukan gerakan bawah tanah adalah golongan Katolik Progresif, golongan ekstrim kiri (komunis) dan golongan Teknokrat liberal. Golongan-golongan ini diminta untuk kembali tampil dalam pencaturan politik rezim baru.

2. *Politik Dekolonisasi Portugal*

Kudeta 25 April 1974 telah melahirkan dua program politik baru yaitu, politik demokratisasi dan politik dekolonisasi. Gagasan demokrasi lahir sebagai reaksi terhadap sifat-sifat pemerintahan rezim lama yang otoriter dan fasistis, sedangkan gagasan dekolonisasi lahir sebagai pantulan dari getirnya perang kolonial di Afrika¹³⁾.

Gagasan dekolonisasi memang tumbuh dikalangan perwira-perwira muda angkatan bersenjata, karena merekalah yang merasakan pahit getirnya berperang melawan pejuang-pejuang kemerdekaan di Afrika. Para perwira inilah yang pertama kali menyadari akan tidak ada harapan bagi Portugal untuk memenangkan perang kolonial. Pada dasarnya sejak awalnya perkembangan politik sesudah kudeta 25 April di Portugal sudah ada dua kekuatan politik yang berperan yaitu Jendral Spinoza dengan konsepnya yang mendapat dukungan dari Jendral Gomez. Sedangkan Movimento dengan kolonel Iasco Gonsalves sebagai otaknya. Oleh karena itu kedua kekuatan politik ini mempunyai versi masing-masing terhadap politik dekolonisasi.

¹²⁾ *Loc. cit.*, hal. 34.

¹³⁾ Sutrisno, *op. cit.*, hal. 33.

a. Politik dekolonisasi versi Spinola

Gagasan Spinola tentang dekolonisasi seperti yang termuat dalam bukunya *Portugal e O Futuro* pada dasarnya adalah usaha pembentukan negara federal yang terdiri dari Portugal dan negara jajahannya yang masing-masing memiliki otonomi intern secara penuh. Setiap negara federal mempunyai wewenang penuh untuk mengatur dalam negerinya masing-masing, sedangkan pemerintah federal di Lisabon tetap menguasai bidang pertahanan dan hubungan luar negeri. Dengan kata lain negeri-negeri jajahan Portugal yang pada saat itu berstatus propinsi, dirubah status politiknya menjadi negara bagian dengan otonomi penuh. Penduduk di negeri-negeri jajahan memilih persatuan dengan Portugal dalam federasi, maka Spinola mengusulkan agar diadakan referendum untuk memberi kesempatan kepada rakyat dalam menentukan hari depan negerinya masing-masing.

Dengan demikian jelaslah bahwa apa yang dinamakan politik dekolonisasi versi Spinola pada hakekatnya hanya sekedar usaha menghentikan perang kolonial di Afrika yang sangat memberatkan Portugal. Konsepsi politik dekolonisasi versi Spinola mendapat dukungan dari golongan kapitalis, golongan vested-interest dan golongan tengah yang ragu-ragu memberikan kemerdekaan dalam jangka pendek. Dukungan kuat terhadap konsepsi politik dekolonisasi ini, terutama ditujukan kepada negeri-negeri jajahan dengan investasi kaum kapitalis yang cukup besar dan menguntungkan. Sedangkan terhadap negeri-negeri jajahan yang kurang menguntungkan golongan tersebut tidak mempersoalkan, misalnya terhadap Guinea –Bissau di Afrika.

b. Politik Dekolonisasi Versi Movimento

Sebagai konseptor dan pelaksanaan kudeta 25 April Movimento juga mempunyai konsep tentang politik dekolonisasi. Meskipun latar belakang konsepsi Spínola dianggap keras tetapi konsep Movimento lebih radikal. Movimento menginginkan agar dekolonisasi dilaksanakan secara konsekuen, tidak melalui gagasan seperti yang diinginkan Spínola, namun mereka menyetujui diadakan referendum yang akan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk menyatakan keinginan dan menentukan hari depannya masing-masing. Sikap ini bisa dimengerti oleh Movimento, sebab anggota-anggota Movimento umumnya terdiri dari perwira-perwira Muda tidak seperti Spínola yang banyak memikirkan kepentingan Portugal. Namun demikian bukan berarti movimento tidak berorientasi kepada kepentingan gerakan-gerakan di dalam negeri. Mereka justru mengeksploitasi masalah dekolonisasi tersebut untuk mencari dukungan-dukungan Internasional. Movimento ingin mengemukakan kepada dunia Internasional bahwa Portugal sungguh-sungguh menyetujui hak-hak self-determination dan berarti penyerahan kekuasaan kepada rakyat jajahannya dengan bentuk sebagai negara merdeka.

Sampai sejauh itu Movimento masih tetap sebagai pemegang kunci penentu strategi politik Portugal akan tetapi karena didalam tubuh Movimento terjadi juga keretakan-keretakan dan pergeseran-pergeseran, maka politik dekolonisasinya juga menunjukkan adanya perubahan-perubahan. Beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan-perubahan bentuk politik dekolonisasi Portugal ialah:

- 1) Strategi global negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Uni Soviet, negara NATO terhadap wilayah atau negeri bekas jajahan yang bersangkutan.
- 2) Situasi politik yang berkembang di Portugal dengan segala kekuatan-kekuatan dan kepentingan-kepentingan yang mempengaruhinya.
- 3) Situasi dan kondisi wilayah atau negeri bekas jajahan yang bersangkutan baik dipandang dari sudut kekuatan-kekuatan pergerakan kemerdekaan setempat dengan segala latar belakangnya maupun dari sudut kondisi wilayah dengan segala perhitungan potensi ekonomi.

Karena faktor-faktor diatas, maka bentuk dan warna politik dekolonisasi Portugal pada salah satu negeri jajahannya tidak sama bentuk dan warna politik dekolonisasi yang diterapkan dinegeri jajahannya yang lain. Selain itu karena sejak kudeta 25 April situasi di Portugal, masih goyah bahkan bisa dikatakan terus bergolak maka politik dekolonisasipun berubah-ubah. Pengaruh pergolakan politik di Portugal yang turut bermain adalah “Super power dengan kepentingan masing-masing”.

B. Keadaan Politik di Timor Timur

Berbeda dengan koloni-koloni Portugal di Afrika, di Timor Timur tidak pernah terjadi gerakan nasionalis dalam pengertian sesungguhnya, dibawah koordinasi suatu pusat kekuatan tertentu sebagai pemersatu. Hal ini disebabkan oleh situasi dan kondisi daerah tersebut serta keengganan negara-negara tetangga untuk mendukung suatu usaha pembebasan dari belenggu kolonial. Namun

demikian tidak berarti bahwa perlawanan atau usaha untuk menentang kehadiran kaum penjajah dari wilayah Timor Timur tidak pernah ada walaupun masih bersifat lokal.

Peristiwa pemberontakan anti kolonial yang pertama sesudah PD II terjadi pada tahun 1959 di daerah Vique-que (bagian tenggara Timor Timur). Sedikit sekali yang dapat diketahui tentang gerakan tersebut khususnya mengenai asal usul dan tujuan yang sebenarnya dari para pelaku utama pemberontakan itu. Yang cukup jelas adalah bahwa pelaku utama pemberontakan itu berjumlah 14 orang yang berasal dari daerah Sulawesi sebagian anggota dari gerakan Permesta dan mereka terpaksa mengungsi untuk menyelamatkan diri. Mereka kebetulan mendarat di Timor Timur dan minta suaka politik kepada pemerintah Portugal, dan pemerintah Portugal kemudian memberi tempat tinggal bagi mereka di Baucau.

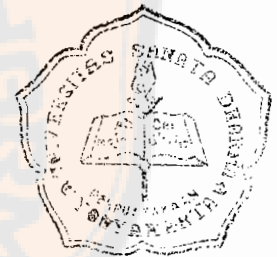
Pada saat itu kebetulan rakyat "Conchelho" (kabupaten) Viqueque sama sekali tidak senang dengan tindakan-tindakan dari administrator (bupati) mereka, sehingga suasananya sudah diambang pemberontakan. Kedatangan 14 orang dari Sulawesi memberi angin pada rakyat Vatolari dan Vatokarbao untuk menyerang pos-pos tentara Portugis. Oleh karena itu terjadilah serangkaian serangan dan tembak menembak antara kedua belah pihak yang berakhir dengan terbunuhnya ratusan pemberontak oleh tentara kolonial dan 58 orang pemberontak dibuang ke Mozambique, Angola dan Lisabon¹⁴⁾.

¹⁴⁾ Rusdie Hamid, *Perjuangan Rakyat Timor Timur Loro Sae* (Yogyakarta, Kanisius, 1997) hal.11.

Terlepas dari apakah pemberontakan itu di dalangi oleh pihak tertentu atau tidak peristiwa tersebut adalah suatu bukti bahwa hanya dengan kekerasan Timor Timur dapat ditaklukan oleh penjajah, dan bilamana ada kesempatan untuk memberontak mereka tidak segan-segan untuk melakukannya. Yang menarik dari peristiwa ini adalah beberapa pelakunya nanti akan menjadi pelopor-pelopor dari perkumpulan politik yang timbul sesudah peristiwa tahun 1974 di Timor Timur.

Nasib Timor Timur bagi banyak dari luar negeri memang merupakan suatu tanda tanya besar dalam tahun 1960-an. Demikian diungkapkan Osmar White, seorang wartawan dari Melbourne pada tahun 1963. Ia meramalkan bahwa Indonesia dalam waktu dekat akan menelan Timor Timur.

.....For much the reason as the union of India swallowed portugeuese Goa, Many Australian are going to feel oshock..... of alarm as unpleasent as that they expenenced when Dutch yielded to world. Presure and surendered west New Guinea..... We would be electing to confront Indonesian on very shaky moral grounds indeed if we expressed any strong disapporoval or resisted any more to liquidate this last and most lamentable example of European colonialism in South East Asia¹⁵⁾.



Lebih lanjut Osmar White (wartawan Australia dalam bukunya Jollife, J) memperkirakan bahwa akhirnya koloni tersebut akan meledak dari dalam sendiri seperti yang sedang terjadi di koloni-koloni Portugal lainnya di Afrika. Ia menunjukkan kemungkinan proses terjadinya ledakan itu berkat keterlibatan dari pihak Indonesia. Pertama, rakyat Timor Timur bisa memberontak, tentara pribumi akan mendukung pihak-pihak pemberontak, lalu membunuh para perwira kolonial dan akhirnya memproklamasikan kemerdekaanya, dengan keyakinan bahwa pihak Indonesia akan berusaha mencegah invansi Portugal. Kedua, kemungkinan suatu

¹⁵⁾ Jollife, J. *Timor Timur, Nasionalisme dan Kolonialisme* (Queesland: Queesland Prees, 1975), hal.49.

pemberontakan dibawah pimpinan perwira-perwira Portugal, yang telah ikut memberontak dengan dukungan dari rakyat, dapat mencetuskan ledakan ini, namun ia juga menambahkan "However the success of an officer led army revolt could be jeopardised if the Indonesians next door regarded it with less enthusiasm a spontaneous uprising of their Timorese brother and so withheld support at the crucial time"¹⁶⁾.

Kemungkinan terakhir yang dapat terjadi menurut dugaanya, adalah suatu pemberontakan besar, akibat dari infiltrasi kedalam koloni oleh agitator-agitator dari pihak Indonesia. Tepat atau tidaknya ramalan tersebut hanya peristiwa-peristiwa yang terjadi sesudah tahun 1974 yang dapat membuktikannya, akan dibahas pada bab-bab selanjutnya.

Awal tahun 1970 sebuah surat kabar yang diterbitkan oleh kalangan gereja Katolik membuat gusar kalangan PIDE (Polisi Rahasia). Tidak seperti biasanya surat kabar Searah bebas dari sensor PIDE, sehingga halaman-halamannya kebanyakan diwarnai dengan artikel-artikel tentang tata hidup rakyat Timur Timur yang hampir terabaikan selama lebih dari 4 abad penjajahan. Tema yang disoroti meliputi hukum, perkawinan tradisional, adat istiadat, rumah-rumah tradisional, humanisme ilmiah lawan agama Kristen, moralitas kekerasan dan lain-lain. Di samping itu, pengajaran bahasa Tetun (lingua franca) mendapat tempat istimewa dalam surat kabar tersebut. Hal yang menarik bahwa sebagian besar para kolumnisnya akan tampil sebagai tokoh-tokoh penting dalam percaturan politik sesudah tahun 1974, seperti Nicolau Lobato, Jose Ramos Horta, Xavier do Ameal

¹⁶⁾ Jollife, J. *op. Cit.*, hal. 51.

Domingus de Olivera, Manuel Carascalao, Fransisco Borja da Costa, Inocio de Nurak dan Mari Alkatiri.

Suatu polemik yang timbul antara Ramos Horta dan Mari Alkatiri pada akhir tahun 1972 dan awal tahun 1973 dalam surat kabar itu ternyata semakin mewarnai suatu surat kabar politik. Ramos Horta dalam suatu kesempatan mengemukakan bahwa Timor Timur sebenarnya adalah negeri indah, akan tetapi sayangnya penduduk kurang menghargainya, maka mereka akan bekerja keras dan berbuat sesuatu demi kemakmurannya. Mari Alkatiri (seorang tokoh Islam yang kurang memahami seluk beluk gereja) menanggapi dengan menyatakan bahwa sebenarnya persoalan pokok tidak terletak pada kemauan penduduk untuk bekerja atau tidak, akan tetapi “malaise” Timor Timur jauh lebih kompleks sifat strukturalnya, keterbelakangan pertanian akibat sistem kolonial. Ramos Horta dengan semangat menanggapi dengan pedas “masalah kita dapat diselesaikan dengan utopi atau sophisme”¹⁷⁾.

Tindakan PIDE ternyata tidak dapat dihindarkan lagi, betapapun sifat bebas sensornya. Pada tanggal 24 Maret 1973 atas intervensi PIDE, Seara dibredel dan ditutup, akan tetapi suatu kelompok perlawanan telah dibentuk. Kebanyakan dari mereka adalah bekas kolumnis Seara dan secara “klandestin” (secara sembunyi-sembunyi) mereka mengadakan pertemuan di Dili diantaranya Nicolau Lobato, Mari Alkatiri, Alarrico Fernandes, Ramos Horta dan Justino Morta. Mereka biasanya bertemu setiap hari minggu di alun-alun Henry Pelaut di depan gedung kantor gubernur propinsi (palacio). Di antara kolumnis Seara ditangkap

¹⁷⁾ Tom, Tomodok, *Hari-hari Terakhir Timor Portugis*, (Jakarta : Bumi Pustaka Jaya, 1994), hal.17.

dan dibuang di Afrika antara lain Justino Morta dan Alarrico Fernandes. Di pengasingan mereka terus mengamati dan mengadakan kontak dengan gerakan-gerakan nasionalis Frente da Libertacao de Mozambique (FRELIMO) dan Partido Africano da Independencia de Guene e Cabovende (PAIGC).

Peristiwa-peristiwa diatas ternyata, secara tidak langsung berfungsi mempersiapkan arena perjuangan politik, dimana pada pemainnya untuk sementara waktu melatih diri untuk gelombang kejadian-kejadian politik yang muncul sesudah revolusi 25 April 1974. Apa yang tidak dilakukan oleh pemerintah Portugis yaitu mempersiapkan putera daerah agar kelak dapat memegang sendiri tampuk pemerintah daerahnya, ternyata diciptakan sendiri oleh para nasionalis muda melalui perjuangan yang gigih. Dengan demikian peristiwa 24 April 1974 berfungsi sebagai pembuka pintu bagi aspirasi-aspirasi dan cita-cita mereka yang tidak tersalurkan hingga saat itu.

C. Timbulnya Partai-partai Politik Di Timor Timur

Revolusi 25 April 1974 di Portugal yang berhasil menyumbangkan rezim Salazar (Caetano), segera diganti oleh suatu dewan koordinasi dan operasional yang dinamakan Junta de Nacional (dewan junta penyelamat nasional) dibawah pimpinan jenderal Antonio Spinoia. Kudeta tersebut tidak hanya membawa perubahan-perubahan radikal di negerinya, tetapi juga membuka lembaran sejarah politik baru di negeri-negeri jajahannya. Langkah dan janji-janji yang diberikan oleh rezim baru pimpinan jenderal Spinoia meskipun belum memenuhi harapan

kepada gerakan kemerdekaan rakyat di negeri-negeri jajahan, akan tetapi telah memberi peluang yang besar bagi para pejuang kemerdekaan.

Bagi rakyat Timor Timur, janji-janji itu berupa pengembalian hak-hak sipil termasuk hak demokrasi, pembebasan para tahanan politik, penghapusan polisi rahasia yang menjadi hantu bagi rakyat, peniadaan sensor pers dan kebebasan rakyat untuk membentuk partai-partai politik serta mengambil bagian dalam penyusunan kebijaksanaan pemerintah. Selain itu rezim baru mengumumkan maksud untuk menerapkan azas-azas dekolonisasi bagi propinsi-propinsi seberang lautan, dan mengadakan suatu referendum pada tanggal 31 Maret 1975, dimana rakyat dapat menentukan status politik maupun hari depan negerinya masing-masing.

Munculnya partai-partai politik di Timor Timur sebagai reaksi terhadap kebebasan yang dijamin dalam program Movimento Forças Armadas (MFA) terjadi dalam waktu yang singkat hanya berselang sebulan, telah terbentuk tiga partai politik, UDT, ASDT yang kemudian berubah menjadi FRETELIN, dan APODETI. Secara garis besar, tujuan yang hendak dicapai oleh masing-masing partai:

UDT : menghendaki suatu otonomi teritorial secara progresif tetap di bawah naungan bendera Portugal.

APODETI : menginginkan suatu penggabungan (integration) dengan Indonesia.

FRETELIN : memperjuangkan terwujudnya suatu negara yang segera merdeka.

1. Uniao Democratica Timorese (UDT)

Perkumpulan politik pertama yang muncul di bumi Timor Timur sesudah 25 April ialah Uniao democratica Timorese (UDT). Partai ini didirikan oleh para tokoh partai Aksi Nasional Rakyat (ANP) yang dibubarkan oleh rezim baru. Partai ini mengadakan pertemuan pertama pada tanggal 11 Mei 1974. Secara mendetail program politik yang diperjuangkan UDT mempunyai beberapa azas dan sasaran:

- a. Memperjuangkan azas-azas otonomi secara progresif yang akan diwujudkan dengan mengikutsertakan rakyat Timor Timur sebanyak mungkin dalam semua sektor administrasi dan pada semua tingkat, tetapi tetap dibawah bendera Portugal
- b. Memperjuangkan hak untuk menentukan nasib sendiri
- c. Memperjuangkan integrasi TimorTimur kedalam suatu komunitas yang berbahasa Portugis
- d. Memperjuangkan eksistensi Portugal yang beraneka suku dan benua
- e. Memperjuangkan azas-azas demokrasi
- f. Memperjuangkan kebebasan berpikir dan berkumpul
- g. Memperjuangkan kebebasan hak-hak beragama
- h. Memperjuangkan hak-hak asasi manusia
- i. Memperjuangkan pembagian dan pendapatan yang adil dan merata
- j. Peran secara aktif dalam politik Timor Timur maupun nasional
- k. Peran aktif melawan korupsi.

Disamping itu, menurut Jill Jolliffe UDT menganut:

- 1) Politik bertetangga yang baik (good neighbour policy)

- 2) Penolakan terhadap integrasi (penggabungan) wilayah Timor Timur kedalam sesuatu negara asing¹⁸⁾.

Program UDT ini tidak banyak berbeda dengan program ANP yaitu, memperjuangkan agar Timor Timur mendapatkan otonomi luas dan tetap sebagai negara anggota federasi dibawah bendera Portugal sesuai dengan konsep Spinola. Konsep ini menyatakan Portugal masih tetap dipandang sebagai bapa yang berkewajiban membimbing dan menuntun anaknya yang belum dapat berdiri sendiri. Konsep tentang “suatu komunitas Portugis yang beraneka suku dan benua” sebagaimana tercantum dalam diatas, adalah konsep yang disodorkan oleh Spinola yaitu, suatu analisa tentang latarbelakang hiografis para pendirinya, yang mana dapat memperjelas arah dari program politik yang diperjuangkan oleh politik UDT.

Sebagai tokoh pertama dan utama partai UDT tampil Mario Viegas Carrascalao seorang insinyur pertanian tamatan universitas Lisabon. Ayahnya adalah seorang Portugis asli yang diasingkan ke Timor Timur sebagai “deportado” pada tahun 1935 karena kegiatan-kegiatan sebagai seorang pemuda yang berideologi komunis. Sedangkan ibunya seorang putri Timor Timur asli, sehingga dia termasuk golongan yang dikategorikan sebagai “mestico”.

Anggota-anggota lain dari komite sentral yang berjumlah 14 orang, kebanyakan dari mereka termasuk golongan mestico dan bekerja sebagai pegawai pemerintah kolonial. Oleh karena itu partai ini mendapat julukan dari partai lain sebagai partai elit sebab banyak diantara pendukung adalah orang-

¹⁸⁾ Jollife, J., *op. cit.*, hal. 337.

orang yang mempunyai jabatan dalam pemerintahan dan tuan-tuan tanah. Partai ini juga mendapat julukan sebagai partai yang mempertahankan status quonya.

Mario Carrascalao terpilih sebagai presiden UDT yang pertama. Akan tetapi tidak bertahan lama karena, mendapat kecaman dari kedua partai lainnya yang menghubungkan dengan rezim lama (ia adalah pendukung Salazar dan bekas anggota ANP). Mario Carrascalao kemudian diganti oleh Fransisco Lopez da Cruz dan Dominggos de Oliveira yang menjabat sebagai sekretaris Jendral partai. Pandangan mereka tentang peranan yang diharapkan Portugal pada hakekatnya sama, bahwa Portugal mempunyai kewajiban untuk memajukan Timor Timur, akan tetapi Oliveira percaya bahwa Timor Timur mampu berdiri sendiri sendiri secara penuh kalau taraf ekonominya sudah maju¹⁹⁾.

Oliveira adalah tokoh yang paling radikal dalam partai UDT. Oliveira mempunyai banyak kawan akrab dalam partai FRETELIN termasuk Ramos Horta sendiri. Sebenarnya ia lebih condong kearah FRETELIN, namun ada satu hal yang tidak disukainya adalah adanya unsur-unsur dalam tubuh FRETELIN yang berideologi komunis yaitu marxis (Maois). Oliveira bersama Lopes da Cruz dan Mario Viegas Carrascalao menginginkan agar politik Timor Timur harus berlandaskan pada nilai-nilai yang diwarisi dari Portugal, yang telah diterima oleh sebagian besar rakyat Timor Timur dan bukan mengimpor ideologi dari negara-negara lain.

Seperti yang telah digambarkan pada bagian-bagian terdahulu, bahwa UDT memperjuangkan azas-azas otonomi teritorial secara progresif yang

¹⁹⁾ *Ibid.*, hal. 339.

merupakan salah satu sasaran utama program politiknya. Hal ini terjadi karena Carrascalao masih memegang pada gagasan Spinola tentang dekolonisasi, konsep akan suatu kemerdekaan secara penuh sebagai puncak dekolonisasi Timor Timur . Hal ini tidak termasuk dalam jangkauan program politiknya, melainkan terbatas pada bagaimana bisa mencapai “self-governing” secara bertahap-tahap. Pada perkembangan selanjutnya, berkat pengaruh yang ditanamkan oleh Lopez da Cruz dan Oliveira, lama kelamaan dapat memperluas jangkauan programnya yaitu Timor Timur diharapkan bisa berdiri sendiri tetapi harus melalui suatu masa transisi yang lamanya antara 15-20 tahun.

Menjelang akhir 1974 perkembangan politik Portugal mengalami perubahan dengan pergantian Spinola oleh Jendral Costa Gomes pada awal bulan September tahun 1974. Salah satu langkah yang diambil kabinet Costa Gomes dalam soal dekolonisasi Timor Timur adalah mengadakan pergantian gubernur. Oleh karena itu gubernur lama Nivio Herdade dari rezim Spinola segera diganti oleh Lemos Pires sebagai gubernur baru. Lemos Pires kemudian membentuk suatu tim yang disebut Komite Dekolonisasi yang bertugas untuk melakukan proses dekolonisasi di Timor Timur. Kedatangan komite dekolonisasi di Timor Timur ternyata berakibat buruk bagi UDT, sebab pemerintah Portugis tidak bersedia lagi mensponsorinya. Untuk itu UDT terpaksa meninjau kembali target waktu yang telah ditentukan²⁰⁾.

Setelah diadakan perembukan maka target semula dipersingkat lagi menjadi 10-15 tahun. Akan tetapi waktu yang telah ditentukan oleh para

20) Hendro Subroto, *Saksi Mata Perjuangan Integrasi Timor Timur* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997), hal. 17 .

pemimpin UDT ini, dianggap oleh pemerintah Portugal terlalu lama. Hal ini disebabkan karena yang diinginkan oleh pemerintah Portugal, adalah suatu dekolonisasi cepat, agar bisa membebaskan diri secepatnya dan memusatkan perhatiannya pada masalah-masalah di Portugal yang semakin ruwet. Akhirnya diterima kemungkinan untuk mencapai kemerdekaan pada waktu 5 tahun.

Pada saat itulah tercetuslah suatu gagasan dari pihak komite dekolonisasi agar diadakan suatu koalisi antara partai UDT dan FRETRELIN. Karena “platform” antar kedua partai sudah semakin berdekatan maka gagasan itu mulai dipertimbangkan secara serius. Apa yang diperjuangkan FRETRELIN sejak semula yaitu pengakuan kemerdekaan de jure segera menjadi bahan pertimbangan bagi para pemimpin UDT.

Faktor lain yang mendorong kearah pembentukan koalisi antar kedua partai ini adalah adanya fiksi yang semakin tajam akibat saling tuduh menuduh, bahkan saling mencera dalam hal ideologi. Hal ini disadari oleh kedua belah pihak, masing-masing mempunyai tujuan sampingan sendiri, yang mau diperjuangkan dengan wadah baru itu. Sebaliknya kedua-duanya menyadari bahwa jurang yang makin lebar antara mereka hanya akan menguntungkan pihak ketiga yakni partai APODETI (pro integrasi). Pertimbangan-pertimbangan itu pada akhirnya mendorong kearah terwujudnya koalisi, dengan penandatanganan naskah oleh kedua belah pihak pada tanggal 21 Januari 1975.

Meskipun demikian, UDT masih tetap berpegang teguh pada gagasan tentang perlu diadakannya suatu referendum dengan tujuan agar hasilnya dapat menunjukkan apakah rakyat benar-benar memilih sendiri, atautkah mau bergabung

dengan Indonesia. Sebulan setelah pembentukan koalisi, gagasan itu pun ditanggalkan, karena ada usul yang dikemukakan oleh FRETRELIN, agar sebelum diambil suatu langkah apapun, Timor Timur harus merdeka lebih dahulu²¹⁾.

Perubahan yang terakhir ini ditafsirkan oleh banyak pengamat sebagai akibat, dari perkembangan peristiwa-peristiwa terakhir yaitu adanya kampanye-kampanye dari APODETI, yang nadanya ingin menjustifikasi hipotesa terjadinya semacam invasi dari pihak Indonesia atas Timor Timur. Kejadian itu ternyata sikron dengan berita-berita yang disiarkan atau disebarluaskan oleh pers Australia.

Secara keseluruhan UDT dipandang sebagai suatu partai yang tidak mempunyai pendirian yang tetap. Sekurang-kurangnya tiga kali partai ini berubah warna. Hal ini dapat dilihat dari perkembangannya, dimana pada tahun-tahun pertama orientasinya , jelas-jelas pro-Portugal, sedangkan pada tahap kedua mendukung gagasan FRETRELIN tentang kemerdekaan Timor Timur , tahap ketiga dalam situasi dan kondisi terdesak UDT beralih pro-integrasi dan memberikan ultimatum referendum sebagai jalan keluar.

Pengurus/Pemimpin Partai UDT

Pimpinan UDT

Francisco Xavier Lopez da Cruz : Presiden

Augusto Cesar da Costa Mousinho : Wakil Presiden

Domingos de Oliveira : Sekretaris Jendral

Ir. Mario Viegas Carrascalao : Anggota

²¹⁾ *Ibid*, hal. 18

Antonio de Sausa	: Anggota
Joao Carrascalao	: Anggota
Antonio de Sausa dos Nasimento	: Anggota
Jacinto da Costa Soares dos Reis	: Anggota
Tito dos Anjos	: Anggota
Fausto do Carria Soares	: Anggota

2.Associacao Popular Democratica Timorese (APODETI)

Partai APODETI didirikan pada tanggal 27 Mei 1974 dengan nama Associacao Para a Integraco de Timor Indonesia (AITI). Tujuan dari partai ini adalah menggabungkan Timor Timur ke dalam negara Republik Indonesia. Partai ini kemudian diganti nama menjadi Associacao Popular Demokratica Timorese (APODETI), dengan maksud agar istilah-istilah rakyat (popular) dan demokrasi (democratica) dapat lebih memikat hati rakyat.

Suatu hal yang penting untuk diperhatikan bahwa integrasi yang diinginkan oleh partai ini bukan integrasi tanpa syarat. Hal ini dapat dilihat pada manifestonya, dimana secara terselubung dikatakan bahwa status yang diinginkan oleh mereka untuk Timor Timur adalah suatu integrasi otonom (semacam propinsi otonom) kedalam negara Republik Indonesia sesuai dengan hukum Internasional. Suatu pandangan yang jelas-jelas mencerminkan ketidaktahuan mereka tentang konstitusi Republik Indonesia yang sama sekali tidak mengatur tentang status demikian.

Argumentasi-argumentasi yang dikemukakan oleh pendiri APODETI dalam manifesto politiknya antara lain Timor Timur secara politis maupun ekonomis terlalu atau tidak mampu berdiri sendiri, sehingga integrasi dengan Indonesia dalam rangka untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Timor Timur di masa mendatang. Lebih lanjut lagi diuraikan bahwa persamaan etnis dan kultural antara Timor Timur dan Timor bagian Barat, ditambah persamaan geopolitis antara Timor Timur dan Timor Barat, maka integrasi kedalam Republik Indonesia adalah pilihan yang paling tepat dan paling realistis²²⁾.

Secara keseluruhan ada 13 butir didalam manifesto yakni:

- a. Integrasi yang otonom kedalam wilayah Republik Indonesia, sesuai dengan hukum internasional
- b. Pengajaran bahasa Indonesia sebagai mata pelajaran yang wajib disemua sekolah menengah, dan pembukaan sekolah-sekolah dasar yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pertama, tanpa menghapuskan sekolah-sekolah Portugis yang ada.
- c. Menghormati prinsip-prinsip kebebasan dan hak-hak asasi manusia
- d. Pembagian kekayaan secara adil oleh pemerintah
- e. Pekerjaan yang adil dan penetapan gaji minimum
- f. Pengejawantahan hak mogok kaum buruh
- g. Menghargai bahasa maupun kebudayaan Portugis
- h. Pendidikan bebas dan pelayanan medis bagi semua orang

²²⁾ Susanto Zuhdi, *op. cit.*, hal. 30.

- i. Menghormati secara khusus terhadap gereja Katolik
- j. Kebebasan untuk mengutarakan pendapat dengan rasa tanggung jawab
- k. Pemilihan secara langsung dalam pemilihan umum
- l. APODETI secara terang-terangan menentang :
 - 1) kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan kepentingan manusia dan praktek-praktek yang tidak disukai, seperti yang dilakukan oleh para pejabat pemerintah dalam mendapatkan tenaga kerja.
 - 2) Korupsi dan semua praktek koloni lainnya.
 - 3) Diskriminasi ras²³⁾.

Sedangkan butir ke-13 berisikan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh tiap-tiap orang yang ingin menjadi anggota partai. Selanjutnya partai ini memberikan jaminan kepada para anggotanya maupun kepada rakyat secara keseluruhan antara lain :

- a) Politik hidup berdampingan secara damai.
- b) Memperbolehkan para pelajar dan mahasiswa untuk belajar di Universitas-universitas luar negeri, khususnya di Australia.

Sebagai tokoh utama dalam partai ini Jose Osorio Soares, seorang bekas camat yang bekerja di Dili yang dinamakan Asistencia Social. Osorio membentuk partai ini setelah memisahkan diri dari ASDT, ia kemudian memulai menyusun struktur maupun manifesto partainya. Sebagai ketua diangkat seorang tokoh yang lebih tua dan cukup terkenal yaitu Arnaldo dos Reis Araujo.

²³⁾ Rusdi Hamid , *op. cit.*, hal. 23.

Presidium yang dipimpin Arnaldo terdiri dari 4 orang yang masing-masing adalah Arnaldo dos Reis Araujo (bekas guru sekolah dasar) sebagai pemimpin Partai, Heremagildo Martins (pemilik perkebunan kopi), sebagai wakil ketua, Casmiro dos Reis Araujo (putra Arnaldo) sebagai sekretaris dan Jose Osorio Soares (bekas camat) sebagai jendral sentral.

Berbeda dengan partai-partai lainnya APODETI biasanya bersikap tertutup pada pers asing. Banyak pengamat luar negeri menduga bahwa sikap demikian itu disebabkan oleh keengganan mereka untuk membicarakan tentang popularitas partainya dan mungkin juga karena adanya komitmen antara APODETI dan Indonesia. Dalam suatu kesempatan Osorio berhasil diwawancara dan menjelaskan pendapatnya mengenai latar belakang mengapa sebaiknya Timor Timur bergabung dengan Indonesia sebagai berikut:

“ we are a poor country we could end up fighting among ourselves. We do not need neocolonialism, just some control from Indonesian; and if we need some things my be we can get then get from Indonesian. Our custom are the same; only our colonialism Timor an Timor in the middle of Indonesian. Even if Indonesian comes you can still have your customs; they will not destory them. If we are together and you if something you can ask Jakarta for help. And if you want, you can ask Australian for help. But we do not wan fighting among the people of are land ²⁴⁾ .

Suatu pertanyaan yang tidak dapat dijawab oleh pemimpin APODETI ialah apakah Indonesia akan tetap menghormati otonomi Timor Timur, seandainya kedua partai lainnya merebut kemenangan, sebab para pendiri APODETI sendiri, sejak semula menolak suatu integrasi dengan kekerasan atau pencaplokan dengan kekerasan. APODETI percaya bahwa rakyat Timor Timur akan diberi kesempatan untuk memilih dalam suatu referendum.

²⁴⁾ Nicol, B. *Timor The Stilborn Nation* (Victoria:Widescope International Publishers,pty 1978), hal. 45.

Untuk mengetahui tanggapan Indonesia tentang propinsi otonomi, maka diutuslah Arnaldo dos Reis de Araujo ke Jakarta pada bulan Juni 1974, yang direncanakan sekitar tiga atau empat minggu lamanya, namun ternyata dugaan mereka meleset sebab Arnaldo baru kembali ke Timor Timur setelah sekitar empat bulan kemudian.

Tanggapan Indonesia terhadap keinginan APODETI bahwa Indonesia sebagai negara kesatuan, tidak dapat menerima status Timor Timur seperti apa yang dikonsepsikan oleh APODETI. Namun untuk tidak mengecewakan dan di lain pihak untuk bisa merangkulnya maka mulailah disusun strategi guna mempengaruhi orientasi dan sikap APODETI.

Langkah pertama yang ditempuh oleh pemerintah Indonesia adalah dengan cara menunda keberangkatan Arnaldo sambil mengumpulkan informasi-informasi sebanyak mungkin tentang keadaan dan perkembangan situasi politik di Timor Timur. Hal ini disebabkan karena sebelum pemerintah Indonesia mengambil keputusan untuk mendukung sepenuhnya, Indonesia ingin mengetahui dua hal yaitu, seberapa banyaknya jumlah pendukung yang dapat diandalkan dan seberapa jauh loyalitas APODETI terhadap Indonesia yaitu loyalitas secara total.

Persoalan pertama dianggap selesai, setelah diketahui bahwa setidaknya ada segelintir orang Timor Timur yang pro integrasi. Mengenai jumlahnya sama sekali penting, yang penting ada beberapa orang yang dapat diandalkan. Untuk soal kedua, menyangkut loyalitas itu dapat dibangun sedikit demi sedikit. Pengujian pertama terhadap APODETI terlihat dalam kasus Arnaldo, yaitu dengan menahan dan menunda-nunda keberangkatannya pulang ke

Timor Timur. Taktik ini ternyata memberi hasil yang memuaskan, sebab APODETI dapat menyesuaikan dengan keinginannya dengan Jakarta.

Rasa saling menghormati antar ketiga partai yang baik pada awal, kini semakin menipis malahan mereka saling mengecam dan saling menghina. APODETI bahkan menteror partai-partai yang lain, dengan menyatakan bahwa sekalipun mereka merdeka secara formal, bagaimana juga mereka harus berurusan dengan Indonesia. Akibatnya semakin lebar jurang pemisah antar ketiga partai ²⁵⁾.

Indonesia setelah berhasil meraih APODETI kepangkuannya, para pemimpin APODETI sudah demikian “comitted” sehingga sulit bagi mereka kembali untuk merubah pikiran dan sikap mereka. Jurang pemisah antara APODETI dan partai-partai lainnya sudah terlalu lebar, sehingga APODETI kini berada dalam situasi semakin tersingkir dan terisolir baik dari pemerintah Portugis maupun dari partai-partai lainnya. Satu-satunya sebagai pegangan untuk bisa bertahan adalah pihak Indonesia.

Pemerintah Indonesia merasa bahwa sudah tiba saatnya untuk mengambil suatu sikap resmi terhadap masalah Timor Timur. Setelah pembicaraan antar Presiden Soeharto dengan utusan Portugal Dr. Almeida Santos selaku menteri koordinasi antar-daerah di Jakarta pada tanggal 18 Oktober 1974, dikeluarkan suatu pernyataan resmi yang mencerminkan sikap Indonesia yang berbunyi :

- a) Indonesia tidak mempunyai ambisi teritorial, dan menentang kolonialisme dalam semua bentuk sebagaimana ditetapkan dalam konstitusi 1945.

²⁵⁾ Hendro Subroto, *op. cit.*, hal. 20.

- b) Indonesia akan menerima integrasi Timor Timur dengan Indonesia, kalau ternyata sesuai dengan keinginan rakyatnya, dan akan menjadi salah satu propinsi negara kesatuan sesuai dengan konstitusi.

Pernyataan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia ini menimbulkan kegelisahan dalam tubuh APODETI, sebab pernyataan ini tidak sesuai dengan keinginan mereka. Untuk mempengaruhi Jakarta agar mau merubah keputusannya maka diutuslah Jose Osorio Soares ke Jakarta bertemu dengan Adam Malik sebagai Menteri Luar Negeri, akan tetapi bagaimana pun usaha Osorio, APODETI sudah terlanjur terjepit; mau mundur sudah terlanjur retak atau *broken off* dengan partai-partai lainnya, mau maju harus bersedia di dikte oleh sponsornya. Dalam proses perkembangan selanjutnya hingga masa perang saudara, APODETI meleburkan diri dengan Indonesia. Para pemimpin khususnya Arnaldo sering mondar mandir Dili-Jakarta, Dili-Kupang untuk menghadiri dan mengadakan pertemuan-pertemuan pribadi dengan pucuk pimpinan setempat. Identitas APODETI sebagai partai politik, makin lama makin menjadi kabur sebab segala sesuatu diatur dari luar, kemudian bubar dan mengidentifikasi diri dengan sistem partai politik Indonesia setelah penggabungan Timor Timur secara formal.

Sementara APODETI tengah dilanda kekecewaan, tibalah suatu Tim di Dili pada bulan November 1974 yang diutus dari Lisabon untuk memulai proses dekolonisasi. Kedatangan Tim ini ternyata membawa angin buruk bagi APODETI, sebab para anggota Tim umumnya kurang simpatik dengan alasan antara bahwa program APODETI bertentangan dengan program MFA. Dengan

alasan di atas komite dekolonisasi mulai memberi angin segar kepada partai-partai pro kemerdekaan. Dengan demikian keadaan partai APODETI semakin terpojok.

Presidium APODETI

Arnaldo dos Reis Araujo	: Presiden
Hermenegildo Martins	: Wakil Presiden
Guilherme Mari Gonsalves	: Penasihat
Abe da Costa Belo	: Penasihat
Joao Assuncao Olivera	: Penasihat
Alexander Boromeu	: Penasihat
Ermina da Costa dos Reis Araujo	: Wakil Sekretaris
Casmiro Assucao de Araujo	: Sekretaris

Komite Sentral APODETI

Jose Fernando Osorio Soares	: Sekretaris Jenderal
Jose Antonio B. dos Reis Araujo	: Sek. Urusan Politik & Administrasi
Armindo Soares Mariano	: Sek. Penerangan
Dominggos Pinto Soares	: Sek. Hubungan Sosial
Antonio Freitas Parada	: Sek. Urusan Keuangan
Alfarqaesqae Maria Borges	: Sek. Pembantu Hubungan Sosial
Gaspar da Silva	: Bendahara
Moise Martins	: Sek. Urusan Olah Raga

3. Frente Revolucionaria de Timor Leste Independente (FRETELIN)

Partai ini lahir tanggal 20 Mei 1974, dengan nama Associacio Socia Democratica Timorrense (ASDT). Partai ASDT ini didirikan oleh tokoh muda, anggota redaksi harian “A Voz de Timor” Jose Ramos Horta (24 tahun), seorang peranakan lulusan Lyceum (SMA) di Dili. Ibunya seorang pribumi, sedangkan ayahnya seorang Perwira Angkatan Laut Portugis yang sudah 30 tahun dibuang ke Timor Timur²⁶⁾.

Partai ASDT ini berlandaskan pada doktrin-doktrin universal tentang sosialisme dan demokrasi serta berpedoman pada pasal-pasal berikut ini :

- a. Hak untuk berdiri sendiri (suatu otonomi secara progresif menuju kemerdekaan).
- b. Penolakan terhadap kolonialisme dan pencegahan aktif terhadap kolonialisme.
- c. Keikutsertaan orang-orang Timor yang kompeten dalam administrasi dan pemerintah setempat dengan segera, sebagai persiapan untuk mengambil alih posisi-posisi yang dipegang oleh orang-orang yang direkrut dari luar.
- d. Tidak diperkenankan adanya diskriminasi ras, penegakkan suasana damai dan bersahabat antara aneka ras yang mendiami wilayah Timor Timur.
- e. Perang aktif melawan korupsi.
- f. Politik bertetangga yang baik dan bekerja sama dalam sebuah sektor maupun semua tingkat dengan negara-negara yang letaknya dalam kawasan geografis Timor Timur, namun dengan syarat harus tetap menjaga kepentingan-kepentingan utama rakyat Timor Timur.

²⁶⁾ Soekanto, *op. cit.*, hal. 88.

ASDT merupakan partai politik yang pertama yang mempunyai prinsip perjuangan “kemerdekaan penuh bagi rakyat Timor Timur tanpa bergantung pada salah satu negara manapun”. Partai ini menolak prinsip otonomi yang luas dalam lingkungan Federasi Portugal yang dicita-citakan oleh partai UDT. Selain itu juga menentang keras terhadap ide yang dikembangkan oleh APODETI yang hendak mengintegrasikan Timor Timur dengan Republik Indonesia. Para pendiri ASDT semuanya berasal dari kelompok klendestein pada masa sebelum revolusi 25 April 1974. Termasuk dalam kelompok ini adalah Nicolau Labato, Mari Alkatiri, Ramos Horta, Justino Morta dan Fransisco Xavier do Amaral.

Pada awalnya para pendiri partai ini tidak mempunyai suatu gambaran yang jelas mengenai target waktu yang diperlukan untuk mencapai kemerdekaan. Akan tetapi, mereka sepakat untuk menolak usul plebesit yang dianjurkan oleh pemerintah Portugal. Alasannya bahwa plebesit hanya akan merugikan, sebab hasil plebesit memperlihatkan bahwa ASDT kurang mendapat dukungan bila dibanding dengan UDT, karena mayoritas rakyat masih terbiasa dengan rezim Portugal yang terpantul pada UDT²⁷⁾.

Untuk menghapus rintangan ini dan memberi perpektif baru, para pemimpin ASDT mulai mengadakan perubahan pada partai dan menyusun suatu strategi baru, yang diilhami oleh pengalaman-pengalaman para tokoh gerakan nasionalis di Afrika seperti, Frente da Libertacao de Mozambique (FRELIMO) dan Partido Africano da Independencia de Guene e Cabovende (PAIGC). Hal ini terjadi demikian karena beberapa tokoh pendirinya pernah diasingkan di Afrika,

²⁷⁾ *Ibit.*, hal. 91.

dimana mereka sempat mengamati dan mengadakan kontak langsung dengan gerakan-gerakan tersebut. Faktor lain yang sangat mendukung ASDT dalam usaha ini adalah kedatangan para mahasiswa asal Timor Timur dari Portugal. Mereka kebanyakan condong ke ekstrim kiri, suatu gejala umum dalam kalangan mahasiswa di Portugal pada masa itu, sebagai cerminan sikap anti terhadap rezim lama yang ekstrim kanan.

Pada tanggal 12 September 1974 ASDT berubah menjadi Frente Revolucionari de Timor Leste Independente (FRETELIN). Perubahan yang radikal dijelaskan sebagai berikut : Front digunakan karena mereka memperjuangkan “persatuan semua patriot Timor Timur”, revolusioner menggambarkan tekad mereka untuk memodifikasi, merubah dan merombak struktur-struktur lama yang telah diwarisi selama lima abad penjajahan. Dalam manifesto ditekankan dua hal utama :

- 1) Pengakuan terhadap FRETELIN sebagai satu-satunya wakil rakyat Timor Timur yang syah.
- 2) Pengakuan kemerdekaan “de jure” dengan segera kepada rakyat Timor Timur. Dengan memberi tekanan pada pokok pertama, FRETELIN sebenarnya mempunyai maksud untuk menarik dukungan rakyat sebanyak mungkin, sedangkan pokok kedua FRETELIN menuntut hak berdiri sendiri untuk rakyat Timor Timur, dan diakui secara universal. Adapun pasal-pasal baru yang ditempuh oleh FRETELIN :
 - a) Mendukung politik non-blok.

- b) Akan segera mengembangkan kegiatan diplomatik secara luas dengan semua negara didunia dan organisasi internasional dengan tujuan untuk memperoleh dukungan moral, diplomatik, politik, teknik, ekonomi, finansial dan militer, atas dasar suatu wawasan yang luas dalam rangka untuk mengembangkan dan membangun negara, tetapi dengan tetap menjaga politik non-blok.
- c) Membela politik bertetangga yang baik tanpa campur tangan dan bersedia bekerja sama dengan semua kegiatan negara didunia.
- d) Solider dengan semua rakyat didunia yang berjuang demi kemajuan.

Perubahan-perubahan inilah merupakan awal kemenangan dan sekaligus menandakan awal retaknya dengan partai-partai lainnya, dan lebih jauh lagi dengan Indonesia dan negara-negara yang mendukung politik Indonesia yang disadari oleh para tokoh-tokoh FRETRELIN dengan kedua partai lainnya secara substansial FRETRELIN memisahkan diri agar perbedaan antara mereka menjadi lebih nyata, khususnya dengan UDT. Lebih jauh lagi FRETRELIN memaklumkan dirinya sebagai satu-satunya wakil rakyat Timor Timur yang syah. Hal ini dilakukan karena pada waktu itu sebagian besar rakyat tidak melihat adanya perbedaan yang jelas antara FRETRELIN dan UDT, karena kedua-duanya menginginkan kemerdekaan. Rakyat Timor Timur lebih tertarik kepada UDT yang mempergunakan panji-panji Portugal yang dipandang sebagai barang-barang keramat. Terhadap APODETI, FRETRELIN memperjelas penolakannya. Hal ini tercermin dalam slogan-slogan anti APODETI yang dituliskan pada tembok

rumah para tokoh APODETI seperti “tembak pengkianat”, “ganyang para pengkianat” dan lain-lain²⁸⁾.

Politik luar negeri yang dilakukan FRETRELIN ditanggapi serius oleh beberapa negara dikawasan Asia Tenggara khususnya Indonesia dan Australia, karena letak kedua negara ini berdekatan dengan Timor Timur. Politik non-blok yang dianut FRETRELIN menyangkut pula kesediaannya untuk bekerja sama dengan negara mana saja, ternyata sangat mengecewakan Indonesia. Kekecewaan ini tumbuh menjadi kekhawatiran karena terjadi pergantian pimpinan di Portugal. Jenderal Spínola yang cukup moderat dan penganjur politik dekolonisasi mengundurkan diri dan diganti oleh jenderal Costa Gomes dengan kabinet baru yang anggota-anggotanya terdiri dari perwira-perwira MFA. Para anggota kabinet ini kebanyakan berhaluan kiri dan menghendaki penyelesaian secepat mungkin terhadap masalah koloni. Pergantian pimpinan di Portugal berakibat juga pada daerah jajahannya termasuk Timor Timur. Gubernur Nívio Herdade (anak buah Spínola) diganti oleh Kolonel Lemos Pires (dari kalangan MFA). Lemos Pires bersama sebuah Tim beranggotakan dua orang anggota yaitu Mayor Mota dan Mayor Yonatas datang ke Timor Timur untuk memulai proses dekolonisasi di Timor Timur. Tim yang dipimpin oleh Lemos Pires berprinsip bahwa proses dekolonisasi Timor Timur harus diselesaikan dalam waktu yang secepat mungkin. Prinsip ini dilakukan karena Portugal sendiri ingin membebaskan diri dari koloni-koloninya, karena ingin mengurus rumah tangganya sendiri dalam keadaan kacau balau.

²⁸⁾ Hamid Rusdie, *op. cit.*, hal. 43.

Dari ketiga partai politik yang ada, FRETRELIN-lah yang mempunyai program yang searah dengan program dekolonisasi MFA. Partai UDT yang semula mendapat dukungan pemerintah Portugal kini tersingkir dan APODETI semakin menggantungkan diri pada pihak Indonesia. FRETRELIN sudah dapat menyamai popularitas UDT berkat sponsornya yang baru dan berkat kampanye-kampanye politik yang gencar yang dilancarkan oleh aktivitas-aktivitasnya yang sebagian besar terdiri dari mahasiswa-mahasiswa radikal Timor Timur yang baru tiba dari Portugal.

Propaganda-propaganda yang disebarluaskan oleh tokoh-tokoh APODETI dalam kunjungannya ke Jakarta maupun oleh mass media di Indonesia mengenai kegiatan-kegiatan gerakan komunis dan propaganda-propaganda anti Indonesia di Timor Timur. Keadaan ini memberi kesan bahwa Timor Timur hanya menunggu waktu untuk menjadi sarang komunis di Asia Tenggara. Ada satu hal yang tidak diinginkan oleh pihak Indonesia adalah penyerahan kekuasaan dari tangan Pemerintah Portugal kepada partai mayoritas (FRETRELIN). Bila hal ini terjadi maka akan sia-sia harapan dan dukungannya terhadap partai APODETI, dalam rangka mempengaruhi sikap rakyat Timor Timur untuk memilih integrasi.

Salah seorang tokoh FRETRELIN yaitu Ramos Horta menyadari masalah ini dan dia yakin bahwa tidak ada negara di kawasan Asia Tenggara yang bersedia mengorbankan hubungan baiknya dengan Indonesia untuk mendukung Timor Timur merdeka, termasuk Australia sendiri. Dengan maksud untuk mengurangi ketegangan maka diadakan koalisi antara UDT dan FRETRELIN pada tanggal 21 Januari 1975, dicapai suatu kesepakatan bersama yang berbunyi antara lain :

“the coalition agreement rejected integration into a foreign power namely Indonesia, but in the future after independence, we shall endeavour countries in the world including Indonesia²⁹⁾”.

Peristiwa koalisi partai terbesar malah menimbulkan interpretasi bagi pemerintah Indonesia, bahwa suatu penyerahan kekuasaan kepada kedua partai pro-kemerdekaan akan berlangsung dalam waktu dekat.

Pimpinan FRETRELIN

Sekretaris Jenderal : Fransisco Xavier do Amaral

Sekretaris Urusan Luar Negeri : Jose Ramos Horta

Sekretaris Urusan Pendidikan : Nataline Leitao

Wakil Ketua : Nicolau Labato

Anggota : Aduardo de Anjas

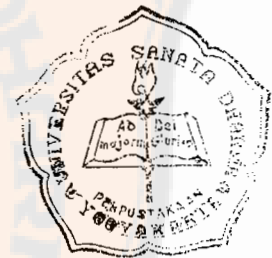
Alfonso Rodentor

Joaqim Saldanha

Carapinha

Guide Valadares

Justino



4 Partai Lainnya

Selain ketiga partai terbesar (UDT, APODETI, FRETRELIN) masih terdapat lagi dua partai politik lainnya. Kedua partai itu adalah Associacao Popular Monarquica Timorese (AMPT/KOTA), dan Associacao dos Trabalhadores (AT/Trabalhista) yang muncul sekitar penghujung 1974³⁰⁾.

²⁹⁾ Nicol, B, *op. cit.*, hal. 50

³⁰⁾ Susanto, Zuhdi, *op. cit.*, hal. 45.

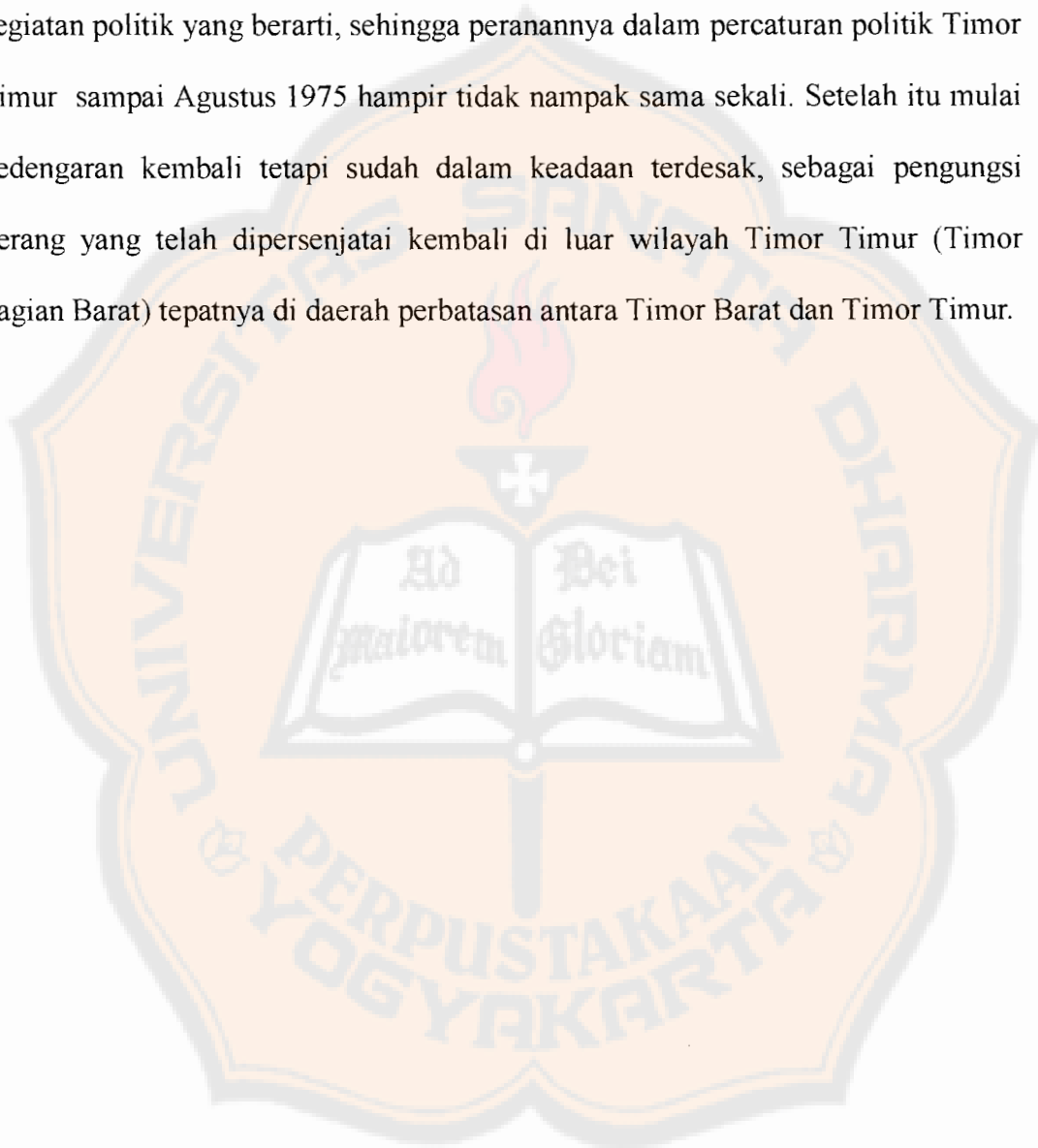
AMPT didirikan oleh Tomas Diaz Ximenes yang mengaku diri sebagai keturunan dari sekelompok raja pejuang pribumi Timor Timur. Raja –raja ini pernah mengadakan perjanjian kerjasama dengan bangsa Portugis di Timor Timur. Tujuan partai ini adalah menciptakan suatu sistim pemerintahan monarkhi konstitusional di Timor Timur, dimana raja monarkhi ini akan dipilih dari keturunan raja-raja pribumi. Raja-raja ini pada gilirannya akan membentuk suatu dewan pimpinan akan memimpin sebuah parlemen kabinet bersama Perdana Menteri.

Para pendiri partai ini mula-mula pendukung APODETI (pro-integrasi). Akan tetapi setelah mereka mengetahui bahwa Indonesia sudah tidak mengakui sistim monarkhi, lalu mereka memisahkan diri. Setelah memisahkan diri dari APODETI, mereka menginginkan suatu ikatan khusus dengan Portugal, dimana Timor Timur menjadi semacam suatu negara bagian yang otonom didalam suatu imperium kolonial Portugis.

Gagasan ini masih berpengaruh oleh konsep Spinola, ternyata tidak memperoleh tanggapan dari pemerintah Portugal yang baru. Hal ini dapat dilihat pada larangan penggunaan radio milik pemerintah untuk siaran-siaran politiknya. Keadaan seperti ini berakibat pada jumlah pendukungnya yang tidak mencapai 100 orang. Hal yang paling mengecewakan perkumpulan ini adalah tidak diakuinya status sebagai suatu partai politik oleh pemerintah Portugis seperti ketiga partai lainnya.

Perkumpulan partai yang terakhir yaitu Associacao dos Trabaldores atau sering disebut Partido Trabalhista. Inti dari program politiknya adalah

memperjuangkan kemerdekaan, demokrasi, dan keadilan sosial bagi rakyat Timor Timur. Para pendukungnya tidak jelas jumlahnya dan terdiri dari golongan pekerja di daerah perkotaan. Perkumpulan ini ternyata tidak memperlihatkan suatu kegiatan politik yang berarti, sehingga peranannya dalam percaturan politik Timor Timur sampai Agustus 1975 hampir tidak nampak sama sekali. Setelah itu mulai kedengaran kembali tetapi sudah dalam keadaan terdesak, sebagai pengungsi perang yang telah dipersenjatai kembali di luar wilayah Timor Timur (Timor bagian Barat) tepatnya di daerah perbatasan antara Timor Barat dan Timor Timur.



BAB III

PROSES INTEGRASI TIMOR TIMUR

A. Kondisi Partai Politik Menjelang Integrasi

1. Koalisi Antara UDT Dan FRETELIN

Pada awal perjuangan untuk memenangkan referendum, ketiga partai menunjukkan sikap yang cukup sportif dan masing-masing bergerak menurut garis permainannya. Pihak pemerintah Portugispun menunjukkan pula kemampuannya sebagai faktor stabilisator yang dapat mencegah munculnya ekstrimis-ekstrimis. Prinsip hubungan bertetangga baik dengan Indonesia benar-benar dipelihara dan berbagai usaha kerjasama dengan propinsi NTT diusahakan dapat berkembang.

Ketenangan tersebut menghilang setelah adanya pergantian gubernur beserta stafnya. Pada tanggal 18 November 1974 gubernur Fernando Alvos Aldeia diganti oleh Letkol Lemos Pires yang diantara anggota staf gubernur ada 3 orang adalah anggota partai komunis Portugal PCP (Partido Comunista Portugues), yaitu Mayor Fransisco de Mota sebagai ketua kabinet urusan politik, Mayor Yonathan sebagai ketua kabinet urusan sosial, dan Kapten Ramos sebagai perwira intelijen.

Dengan demikian terganggunya proses dekolonisasi tidak lain disebabkan oleh adanya unsur-unsur PCP yang dengan sengaja menyusup ke Timor. Strategi mereka adalah dekolonisasi harus menghasilkan suatu posisi dan kondisi Timor Timur yang menguntungkan gerakan komunis internasional.³¹⁾ Oleh sebab itu mereka berusaha langsung mengarahkan proses dekolonisasi,

³¹⁾ Hendro Subroto, *op.cit.*, hal . 21.

meskipun bertentangan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah Lisabon. Hasil pendekatan dan peninjauan delegasi Indonesia pada pertengahan bulan Oktober 1974, ternyata dalam proses dekolonisasi di Timor Timur pemerintah Lisabon tetap berpegang pada sikap dasar sebagai berikut :

- a. Menyerahkan masa depan Timor Timur sepenuhnya kepada aspirasi rakyat Timor-Timur.
- b. Merdeka dan berdiri sendiri bagi Timor Timur adalah suatu hal yang tidak realistis.
- c. Berdiri sebagai negara bagian dalam federasi Portugal adalah mengingkari hakekat politik dekolonisasi Portugal.
- d. Berintegrasi kedalam negara kesatuan Republik Indonesia adalah kedudukan masa depan Timor Timur yang paling realistis.
- e. Menghargai dan mengakui serta memberi kesempatan kepada Indonesia untuk menggarap masa depan Timor Timur.
- f. Menyadari sepenuhnya atas kepentingan dan kedudukan Indonesia dalam masalah Timor Timur.

Karena sikap dasar pemerintah Lisabon tidak menguntungkan bagi strategi gerakan komunis internasional maka PCP berusaha hadir di Timor Timur melalui pergantian gubernur pada tanggal 18 November 1974. Lemos Pires sebagai gubernur bersama beberapa perwira sebagai stafnya, bersikap berat sebelah dan berusaha menyingkirkan peranan Indonesia dan Lisabon dalam pembinaan proses dekolonisasi. Mereka berusaha untuk menyatukan FRETILIN dan UDT dalam suatu koalisi agar gerakannya dapat dikendalikan untuk

menghadapi APODETI. UDT pada awalnya masih ragu-ragu dalam menentukan sikap untuk mengadakan koalisi dengan FRETRELIN, akan tetapi adanya faktor anti APODETI, yang kian meningkat akibat propaganda-propaganda dari partai APODETI yang bernada ingin menjustifikasi suatu invasi, tepatnya suatu pencaplokan dari pihak Indonesia.

Koalisi antara FRETRELIN dan UDT dibentuk pada tanggal 20 Januari 1975. Pada hari itu pula dikeluarkan suatu pernyataan yang ditandatangani oleh Fransisco Xavier do Amaral sebagai ketua komite sentral FRETRELIN dan Fransisco Lopes da Cruz sebagai ketua sentral UDT. Isi pokok dari pernyataan bersama adalah :

- a) Kemerdekaan penuh bagi rakyat Timor bagian Timor Dili.
- b) Menolak APODETI karena mempertahankan ide-ide integrasi dengan neo-kolonialis yang bertentangan dengan kepentingan rakyat Timor Timur dan piagam PBB.
- c) Mengakui Portugal sebagai satu-satunya pelaksana yang sah dalam proses dekolonisasi dan mengambil bahasa Portugis sebagai bahasa resmi
- d) Meminta bantuan PBB agar menyertai Portugal dalam proses dekolonisasi menuju kemerdekaan nasional bagi Timor bagian Timur.
- e) Koalisi mempunyai hak untuk memilih negara-negara mana yang akan ambil bagian dalam komisi supervisi dan menolak partisipasi negara-negara besar, negara ASEAN dan negara-negara lain dalam pengaruh Indonesia dan Australia.

- f) Pembentukan suatu pemerintah peralihan melalui perundingan di Lisabon antara pemerintah Portugal, FRETRELIN dan UDT.
- g) Membentuk suatu komisi *Adhoc* dengan jumlah anggota yang sama dari kedua partai yang ditugaskan mempelajari program radio, ceramah-ceramah melalui organ-organ penerangan.
- h) Non-ideological aggression dan saling menghormati program serta bentuk ideologi
- i) Timor Portugis diganti namanya dengan Timor-Timur dan penduduknya disebut *Timores*

Koalisi antara FRETRELIN-UDT telah mendesak kepada pemerintah Timor Timur agar segera diadakan pembicaraan dengan pihak pemerintah untuk membentuk pemerintahan sementara, dan disusul oleh kemerdekaan penuh bagi rakyat Timor Timur dengan bahasa pengantar Portugis. Untuk menarik minat anggota-anggota militer pribumi dalam melaksanakan tugasnya bila sudah sampai pada tahap penggunaan kekuatan politik maka anggota-anggota militer pribumi akan dinaikan gajinya. Mereka akan menggantikan kedudukan militer Portugis yang tidak lama lagi akan ditarik³²⁾.

2. Tekanan- Tekanan Terhadap APODETI Dan Nada Anti Indonesia.

Dengan terbentuknya komisi sersan Timor yang disusul dengan pembentukan koalisi FRETRELIN dan UDT, maka untuk sementara penghancur terhadap potensi APODETI dan unsur-unsur pro-intergrasi dengan Indonesia lebih

³²⁾ Soekanto, *op. cit.*, hal. 167.

efektif. APODETI yang menjadi sasaran offensif kedua partai itu ternyata semakin menjadi kuat, tergebleng oleh gempuran-gempuran oleh kedua partai itu. Pada awalnya APODETI menjadi kocar-kacir karena banyak anggota-anggotanya ditangkap, ditahan, dan disiksa, banyak pula yang menyingkir ke daerah-daerah lain yang lebih aman. Untuk menghindari tekanan-tekanan banyak pula yang harus mengungsi ke wilayah Republik Indonesia, daerah perbatasan Kabupaten Belu (Batu Gede). Tetapi sesudah tercapainya konsolidasi dan peningkatan tekad APODETI yang lebih bulat lagi, sedikit demi sedikit keadaan menjadi terbalik³³⁾.

Karena tekanan-tekanan terhadap APODETI yang begitu gencar dan menunjukkan tanda-tanda hendak menghilangkan eksistensi APODETI secara *defacto*, maka dikeluarkan memorandum kepada menteri seberang lautan, Gubernur Timor Timur dan juga kepada menteri luar negeri Republik Indonesia Adam Malik. Pokok-pokok memorandum itu adalah:

- a. Menjelaskan situasi politik Timor-Timur terakhir dan menyatakan bahwa ide APODETI untuk berintegrasi kepada Indonesia telah mendapat pengakuan dari negara-negara Asia Tenggara dan Australia, dan telah dimuat di beberapa surat kabar di Portugal.
- b. Menjelaskan kembali pernyataan Mario Soares di PBB, bahwa untuk penyelesaian masalah Timor Timur harus memperhatikan juga suara-suara Indonesia dan Australia.

³³⁾ Susanto Zuhdi, *op. cit.*, hal.32.

- c. Mengutip pernyataan Santos di PBB bahwa untuk Timor Timur hanya mempunyai dua kemungkinan, yaitu integrasi Indonesia atau berintegrasi dengan Portugal.
- d. Dengan adanya dua pilihan tersebut diatas, Portugal telah menyatakan tidak mungkin memberikan bantuan kepada Timor Timur, sedangkan Australia dan Indonesia telah setuju dengan politik integrasi.
- e. Karena 97% rakyat Timor Timur masih buta huruf, APODETI menyarankan agar Timor Timur segera di integrasikan dengan Republik Indonesia.

Selain tekanan-tekanan terhadap APODETI semakin keras, ternyata isu-isu yang ditujukan kepada Indonesia juga semakin tajam dilancarkan, baik yang bernada negatif maupun yang bernada bermusuhan dengan Indonesia. Isu-isu yang dilancarkan oleh FRETRELIN dan UDT antara lain:

- 1) *Indonesia Neo-Kolonialis*
- 2) *Indonesia sedang kelaparan, tidak mungkin sanggup membantu negara lain.*
- 3) *Pejabat-pejabat Indonesia terdiri dari orang-orang bodoh.*
- 4) *Jangan percaya dengan Indonesia.*
- 5) *Indonesia jangan diikutsertakan dalam komisi PBB dan pelaksanaan referendum harus disaksikan PBB.*

3. Pecahnya Koalisi FRETRELIN dan UDT.

Terjadinya perpecahan dalam koalisi FRETRELIN dan UDT sudah diduga sebelumnya. Mereka berkoalisi karena sengaja dikoaliskan oleh kepentingan lain yang memeralatnya. Mereka digabungkan hanya untuk membunuh aspirasi

rakyat yang ingin berintegrasi dengan Indonesia. Sasaran mereka adalah APODETI dan simpatisan-simpatisannya yang ingin berintegrasi dengan Indonesia.

Pada dasarnya UDT menganut pola politik yang berbau konservatif-moderat (bersikap mempertahankan tradisi secara turun temurun dan menghindari perilaku yang ekstrim) dengan orientasi politik dekolonisasi kepada konsep Spinola, Sedangkan FRETRELIN menganut pola politik ekstrim kiri, karena adanya penggarapan dari kader-kader Movement for Renovation of The Protariat (MRPP). Oleh karena koalisi tersebut tidak berlandaskan kepada perjuangan yang mempunyai satu strategi dan tujuan, maka dalam waktu yang singkat koalisi tersebut sudah mulai retak. UDT mulai sadar bahwa koalisi dengan FRETRELIN adalah suatu perangkap baginya. Dengan demikian terjadi perpecahan koalisi FRETRELIN – UDT, yang dipertegas dengan pernyataan resmi UDT pada tanggal 27 Mei 1975 yang berisi:

- a) Dasar-dasar kerja sama yang termuat dalam dokumen pokok, ternyata secara sistematis dan licik telah disalahartikan dengan melaksanakan agresi ideologi ke agresi fisik, sehingga menimbulkan gangguan keamanan bagi rakyat;
- b) Diantara orang FRETRELIN yang dapat dipercaya diketahui bahwa banyak oknum yang secara langsung membantu pemerintah Orde Lama melakukan penindasan masih berlindung ditubuh partai, dan sekarang justru mengaku sebagai pembela dan patriot kemerdekaan bangsa, sehingga memuat UDT curiga terhadap tujuan FRETRELIN sesungguhnya;

- c) Tindakan-tindakan politik FRETELIN selama ini memperlihatkan praktek-praktek politik yang membahayakan kemerdekaan Timor Timur, membahayakan keamanan dalam negeri dan stabilitas politik dalam kaitan geopolitik dimana kami berada;
- d) Banyak pemimpin cabang dan pendukung UDT telah menuntut pemisahan dari FRETELIN dengan alasan yang sama;
- e) Tujuan UDT adalah berjuang untuk kemerdekaan Timor Timur, keadilan sosial, perbaikan ekonomi dan kebudayaan rakyat dalam suasana aman, damai dan serasi;
- f) UDT mempunyai keyakinan atas tanggung jawabnya terhadap rencana kedalam maupun rencana keluar³⁴⁾.

4. Konferensi Macao

Suhu politik di Timor-Timur menjelang pertemuan Macao semakin panas. Jose Ramos Horta (Sekretaris Urusan Luar Negeri)), Alarico Jorge Fernandes (Sekretaris Jendral Presidium) dan Xavier Amaral (Presiden) menyatakan bahwa FRETELIN tidak akan ikut hadir dalam pertemuan Macao. Alasannya adalah : Karena FRETELIN tidak bersedia duduk satu meja dengan APODETI karena sejak semula APODETI sudah menetapkan untuk berintegrasi dengan Republik Indonesia dan tidak mau mendukung gagasan kemerdekaan bagi Timor-Portugis.

³⁴⁾ Soekanto, *op. cit.*, hal. 170.

Sesuai dengan kesepakatan yang tercapai dalam pertemuan London maka pemerintah Portugal mengadakan pertemuan dengan tiga parpol pada tanggal 26-28 Juni 1975 di Macao. Maksud dengan pertemuan Macao adalah untuk membentuk *Consultative Body* dimana wakil-wakil ketiga partai duduk didalamnya. Tetapi karena partai FRETELIN tidak hadir maka bentuk pertemuan itu menjadi sekedar hearing antara kedua partai dengan pemerintah Portugal.

Sebagai wakil pemerintah Portugal hadir Mayor Vitor Alves sebagai pemimpin delegasi dengan anggota-anggotanya Dr. Almeida (Menteri Koordinator antar wilayah) dan Prof. Jorge Campignos (Menteri Sekretaris Negara). Pemerintah Timor Timur diwakili oleh Mayor Rodriques da Mota, (Chief Kabinet Urusan Politik). Sebagai tuan rumah Gubernur Macao Kolonel Garcia Leandro dan Konsul Portugal di Hongkong Reis Caldeira. Dari Indonesia berhubung Letjen Ali Moertopo saat itu berhalangan, maka diganti Nasrun Syahrin (Konsul Jendral Republik Indonesia di Hongkong)³⁵⁾.

Delegasi partai UDT adalah Mousinho (Ketua), Ir Mario Carrascalao, Joao Carrascalao, Nasimento dan Jasinto Reis. Dari pihak APODETI hadir H. Martins (Ketua), G. Gonsalves dan Jose Osorio Soares.

Dalam pidatonya Mayor Vitor Alves melancarkan kecaman kepada FRETELIN. Ia menilai ketidak hadiran FRETELIN sebagai suatu pemboikotan dan merugikan proses dekolonisasi di Timor Timur yang akan memberikan masa depan yang baik bagi rakyat Timor Timur. Terhadap APODETI dan UDT Mayor Vitor Alves memberikan pujian dan menyatakan terima kasih atas kehadirannya,

³⁵⁾ Alex Dinut, *op. cit.*, hal. 35.

yang dinilainya sebagai rasa tanggungjawab kedua partai itu terhadap masa depan rakyat dan wilayahnya.

Partai UDT menggunakan kesempatan tersebut untuk mengungkapkan pendapatnya tentang masalah dekolonisasi di Timor Timur agar penyelesaian dekolonisasi dilakukan tahap demi tahap dan tidak perlu dilakukan melalui referendum. APODETI memanfaatkan ketidakhadiran FRETELIN untuk menyudutkan posisi FRETELIN. Ketidakhadiran FRETELIN dinilai sebagai sikap tidak demokratis dan melanggar hak asasi rakyat Timor Timur dan tidak mau memperhatikan kehendak rakyat untuk menentukan nasib sendiri³⁶⁾.

Menanggapi usul UDT bahwa referendum tidak perlu dilaksanakan, APODETI menyatakan bahwa sesuai dengan prinsip demokrasi adanya referendum menjadi tuntutan untuk menentukan nasib sendiri. APODETI menginginkan penggabungan Timor Timur dengan Indonesia karena adanya ikatan kebudayaan, keturunan, geografis, dll dengan Indonesia.

Seperti yang telah diketahui, konferensi Macao dalam pelaksanaannya oleh delegasi Portugal pertemuan Macao dirubah bentuknya menjadi semacam *hearing* (dengar pendapat) dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

- a. Yang diperlukan oleh pemerintah Portugal adalah bahan-bahan untuk menyusun UU pelaksanaan dekolonisasi.
- b. Menghindari terjadinya suatu *dead lock* karena menurut penilaian cita-cita semua partai yang ada di Timor Timur sangat berbeda.

³⁶⁾ Jhon G. Tylor, *Perang tersembunyi, Sejarah Timor-Timur yang dilupakan* (Jakarta: Forum Solidaritas Untuk Rakyat Timor Timur, 1998), hal. 81-84.

- c. Keputusan pelaksanaan dekolonisasi akhirnya tergantung dan berada di tangan pemerintah Portugal³⁷⁾.

Hasil positif dari pertemuan Macao yang dapat dianggap sebagai hal membuat proses dekolonisasi Timor Timur menjadi berketentuan ialah penentuan jadwal referendum pada bulan Oktober 1976. Dari penentuan Portugal untuk meninggalkan Timor Timur pada bulan Oktober 1978 untuk melaksanakan referendum dan ditetapkan akan di bentuk suatu *governing body* semacam badan pengelolah wilayah Timor Timur.

Naskah undang-undang yang berdasarkan pada hasil pertemuan Macao dikukuhkan dari Dewan Revolusioner Militer Portugal dan diumumkan pada tanggal 12 juli 1975 yang menyatakan bahwa Timor Timur tetap menjadi daerah Portugal sampai dengan bulan Oktober 1978. Naskah konstitusi itu menetapkan pembentukan sebuah Majelis Rakyat yang dipilih dalam pemilihan umum pada tahun 1976. Tugas majelis Rakyat menentukan politik dan administrasi daerah itu.

5. Perang Saudara 11 Agustus 1975

Pertemuan Macao yang diselenggarakan pada akhir bulan Juni 1975, disamping menghasilkan ketentuan jadwal dekolonisasi, juga mengakibatkan ketegangan antara berbagai kekuatan politik di Timor Timur. Sikap serta kegiatan partai UDT pasca pertemuan Macao sangat menonjolkan anti komunis dalam

³⁷⁾ Soekanto, *op, cit*, hal. 185

setiap kampanyenya. Sikap demikian juga terbawa dalam kunjungan para pemimpin UDT ke berbagai negara non-komunis.

Pimpinan UDT yang terdiri dari Fransisco Xavier Lopez da Cruz (Presiden UDT), Domingos Oliveira (Sekjen UDT), dan Joao Carrascallao (ketua bidang luar negeri) yang sekaligus bertindak sebagai juru bicara, menyatakan bahwa UDT mengharapkan bantuan dari Indonesia yang konkrit, bila UDT terpaksa harus bertarung melawan komunis. Bantuan yang diperlukan berupa bantuan diplomatik untuk membatasi kegiatan FRETRELIN di luar negeri. Dalam kesempatan itu UDT juga menanyakan tentang sikap Indonesia bila terjadi pertarungan antara UDT melawan FRETRELIN. Indonesia akan menutup mata saja, demikian jawaban yang diterima dari pejabat Indonesia³⁸⁾.

Pada tanggal 10 Agustus 1975, raja Atsabe diserang oleh FRETRELIN. Dalam serangan itu jatuh beberapa korban dari pihak raja Atsabe. UDT kemudian membalas aksi tersebut dengan mengadakan demonstrasi keliling kota Dili sambil meneriakkan semboyan-semboyan yang bertema anti komunis. UDT meminta kepada pemerintah agar segera mengambil tindakan pengusiran yang sifatnya segera terhadap Mayor Mota, Kapten Ramos dan Carapinha, ke Lisabon karena mereka adalah anggota partai komunis Portugal³⁹⁾.

Puncak dari aksi-aksi terjadi pada tanggal 11 Agustus 1975, terjadi gerakan perebutan kekuasaan. Semua pos terpenting di kota Dili seperti stasiun radio, beberapa pos militer, dan lapangan terbang dikuasai oleh UDT⁴⁰⁾. Serangan itu mendapat bantuan dari kalangan pemerintah yang pro UDT. Mereka juga

³⁸⁾ Soetrisno, *op. cit.*, hal. 37.

³⁹⁾ Hendro Subroto, *op. cit.*, hal. 32.

minta agar Gubernur Lemos Pires jangan berbuat sesuatu dan militer baik yang pribumi maupun Portugis diminta untuk tidak ikut campur tangan. Sementara itu tokoh-tokoh sentral FRETELIN yang berada di Dili ada yang ditahan, tetapi sebagian besar, berhasil meloloskan diri bersama keluarga.

Pada tanggal 13 Agustus 1975, UDT mengeluarkan pernyataan untuk menjelaskan kepada umum maksud gerakan yang dilakukan pada tanggal 11 Agustus 1975 yang isinya adalah :

- a. Gerakan revolusi yang dipelopori oleh UDT pada jam 24.00 malam tanggal 11 Agustus 1975 di Timor Timur adalah suatu gerakan hati nurani rakyat Timor Timur yang sekian lama merindukan kemerdekaan dan pemerintahan sendiri oleh rakyat.
- b. UDT menyerahkan kepada semua peserta dan rakyat Timor Timur di Lautem, Baucau, Vique-que, Lekusin, Manututu, Ermera, Same, Kovalima, dan Maliana agar maklum bahwa UDT-lah yang ingin memegang tampuk pimpinan pemerintahan.
- c. Persatuan mutlak perlu, sebab tanpa persatuan, kaum revolusioner akan merampas kekuasaan.
- d. Marilah bersatu-padu mengisi kemerdekaan kita.
- e. UDT kini mempunyai tekad untuk berusaha keras mempengaruhi semua lapisan masyarakat agar mementingkan cita-cita menuju suatu masa yang gemilang, yaitu negara merdeka Timor Timur .

⁴⁰⁾ Taylor, John G., *op. cit.*, hal. 90.

- f. UDT bertindak menentang semua orang yang ingin mempertahankan penjajahan.
- g. Di Aileu keadaan gawat, berhubung UDT berada dalam posisi yang menentukan dengan bantuan angkatan bersenjata. Begitu juga di Atsabe, Maubisse, dan Lacio, angkatan bersenjata secara cepat dan membantu segala tindakan UDT.
- h. Tanggal 13 Agustus Bukoli (Baucau) jatuh ketangan UDT.
- i. UDT mengadakan gerakan revolusi bukan terdorong oleh ambisi golongan atau partai, melainkan oleh dorongan kemauan rakyat Timor Timur. UDT menginginkan persatuan kemerdekaan dan menentukan nasib sendiri oleh rakyat dibawah naungan Tuhan yang Maha Esa.
- j. UDT memperjuangkan terhapusnya kolonialisme dan facisme, karena itu UDT memprotes tindakan-tindakan yang melawan Tuhan, menentang kemauan rakyat dan menghendaki integrasi Timor Timur dengan negara lain, maka UDT akan melancarkan serangan sehebat-hebatnya.
- k. Akhirnya UDT mengharapkan agar semua paham dan golongan bersatu memperjuangkan kemerdekaan, kepentingan umum tanpa mengharapkan keuntungan sendiri.
- l. Barang siapa menentang UDT berarti menentang kemauan rakyat dan kemauan untuk kemerdekaan⁴¹⁾.

Pada tanggal yang sama yaitu tanggal 13 Agustus 1975, raja Atsabe ditangkap oleh sekretaris FRETILIN di Atsabe. Sebelum tertangkap tokoh

⁴¹⁾ Soekanto, *op. cit.*, hal . 202.

APODETI ini, sempat mengirimkan pesan kepada pimpinan APODETI untuk disampaikan ke Atambua yang isinya sebagai berikut :

- 1) APODETI menolak komunike Partai UDT yang dikendalikan oleh tentara Portugis.
- 2) Daerah atau kantor APODETI akan ditutup sebagai langkah pertama adalah : daerah Atsabe dan sekitarnya.
- 3) APODETI akan mengibarkan bendera merah putih (bendera APODETI).
- 4) APODETI akan mengerahkan pemuda –pemudanya untuk melawan tekanan-tekanan fisik dari partai UDT atau FRETILIN yang dibantu oleh militer Portugis.
- 5) APODETI akan berusaha bertahan hingga titik darah penghabisan⁴²⁾.

B. Sikap Indonesia Terhadap Situasi Timor Timur

1. Bantuan Kemanusiaan Indonesia

Sembilan hari setelah UDT mengadakan gerakan perebutan kekuasaan tepatnya pada tanggal 20 Agustus 1975 di Lisabon Menteri Luar negeri Portugal mengemukakan bahwa Portugal telah mengadakan *appeal* Palang Merah Internasional, dan merencanakan *appeal* kepada Indonesia dan Australia, untuk memperoleh saran dan pandangan tentang cara-cara penyelesaian politis masalah Timor Timur. Kalau keadaannya tetap memburuk, Portugal akan memberi laporan kepada PBB, dan sebagai langkah terakhir akan menginternasionalisasi masalah Timor Timur.

⁴²⁾ *Ibid*, hal. 207.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa sebagai langkah pertama bagi pemerintah Portugal yakni :

- a. Mempertemukan kembali pihak-pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian yang baik.
- b. Transfer pemerintah kepada pihak yang berkuasa.
- c. Meminta good office negara- negara tetangga menciptakan mekanisme guna transfer kedaulatan secepatnya.

Sementara itu gubernur Lemos Pires sudah tidak berdaya lagi dengan pasukannya, hanya mampu bertahan untuk beberapa lama di Pelabuhan Dili dan secara *de facto* tidak berkuasa lagi. Satu-satunya yang dilakukan adalah membantu pengungsian warga Portugis dengan dua buah kapal milik Australia sambil mempersiapkan diri untuk mengungsi pula.

Sementara itu pemerintah Portugal pada tanggal 23 Agustus 1975 meminta agar Indonesia membantu pengungsian warga Portugal dan warga asing lainnya. Menteri Luar Negeri Adam Malik menyatakan bahwa permintaan itu sedang dipelajari karena menurut pendapatnya keselamatan warga Portugal dan warga asing lainnya tidak dapat dipisahkan dari pemulihan ketertiban dan keamanan.

Berdasarkan permintaan Portugal, kemudian pemerintah Indonesia menginstruksikan KRI Monginsidi di bawah pimpinan Kolonel Subiyakto untuk membantu pengungsian. Pada tanggal 27 Agustus 1975 KRI monginsidi berhasil merapat di Dili dan Kolonel Subiyakto mengadakan perundingan dengan tokoh – tokoh ketiga partai politik yang bersengketa di Dili. Dalam perundingan itu ketiga

partai politik menyetujui untuk mengadakan gencatan senjata selama empat hari guna melaksanakan pengungsian.

Sesuai dengan permintaan pemerintah Portugal untuk mengulurkan bantuan kemanusiaan ke Timor Timur, KRI Monginsidi juga membawa beras untuk memperingan penderitaan penduduk kota Dili. Menteri Luar Negeri Ad interim Mochtar Kusumaatmaja meminta agar Portugal memberi ijin dan mengadakan pengawalan terhadap pengiriman beras ke Dili. Akan tetapi bantuan Republik Indonesia ternyata dijawab oleh kuasa usaha *ad interim* Portugal bahwa suatu Misi di bawah pimpinan Dr. Almeida Santos akan segera datang di Jakarta dengan mandat penuh dari pemerintah Portugal. Selain itu kuasa usaha *ad interim* Portugal meminta pemerintah RI untuk menarik kapal-kapalnya sampai misi tersebut datang. Dikatakan bahwa pemerintah Portugal tidak pernah meminta intervensi pihak lain untuk menentramkan keadaan Timor Timur. Dan di wilayah Timor Timur hanya ada satu penguasa yaitu Gubernur Timor.

Karena sikap konsul *ad interim* Portugal di Jakarta dan juga atas gubernur Lemos Pires, maka KRI Mongisidi pada tanggal 29 Agustus terpaksa meninggalkan Dili dengan membawa seluruh staf konsulat RI di Dili⁴³⁾.

Dua hari sebelumnya Gubernur Lemos Pires beserta rombongannya telah mengungsi ke pulau Atauro, dan sekaligus memindahkan kedudukan pemerintahan kepulauan tersebut. Dalam suratnya kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur El Tari, Lemos Pires menyatakan bahwa sebagai akibat dari situasi aksi bersenjata dari UDT dan FRETELIN, maka ia telah memutuskan untuk

⁴³⁾ Soekanto, *op. cit.*, hal. 210.

memindahkan pemerintahan Timor Timur ke pulau Atauro. Oleh karena logistik masih sangat terbatas di Atauro, maka ia meminta bantuan di Kupang berupa kentang 1050 kg, kacang 100 kg, kopi 200 kg, bier 1000 botol, bahan bakar 5000 liter, minyak tanah 300 liter, minyak semir 25 liter dan air minum ⁴⁴⁾.

Sementara itu FRETILIN terus memperluas kekuasaannya ke pelosok Timor-Timur. Menjelang bulan September 1975 kepercayaan rakyat dan parpol-parpol terhadap kekuasaan Portugal atas wilayah Timor-Timur telah lenyap sama sekali. Kedudukan UDT dan APODETI semakin terdesak kedaerah perbatasan.

Sejak awal September 1975, berbagai surat kabar terbitan Indonesia maupun luar negeri memberitakan tentang peristiwa penyebrangan daerah perbatasan oleh ribuan pengungsi ke wilayah RI. Selain itu banyak pula yang mengungsi ke Australia dan Portugal. Khusus tentang mereka yang mengungsi ke wilayah RI menurut beberapa laporan, dikatakan bahwa mencapai 50.000 orang. Hal tersebut dipandang oleh pemerintah RI sebagai masalah yang sangat serius, khusus yang berkaitan dengan logistik, penampungan dan perawatan. Menteri Dalam Negeri Amir Machmud didepan sidang pleno DPR – RI pada tanggal 5 Juli 1976 menyatakan bahwa sampai akhir Pebruari 1976, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan dana sebesar Rp 920.330.863 untuk membantu pengungsi dari Timor Timur yang menyeberang ke wilayah RI.

Kejadian-kejadian yang membuat Indonesia marah adalah pelanggaran wilayah RI oleh pasukan FRETILIN, baik secara militer maupun perampasan

⁴⁴⁾ Hendro Subroto, *op. cit.*, hal 43.

serta perampokan ternak dan bahan pangan yang tercatat sebanyak 14 kali sejak awal September sampai akhir Oktober 1976.

2. Usaha Diplomatis

a. Misi khusus Dr. Almeida Santos

Dalam rangka untuk mengatasi kegagalan misi Mayor Antonio Soares dalam usahanya untuk mengadakan kontak dengan pemerintah Portugis di Timor Timur; maka pemerintah Lisabon telah mengirimkan sebuah delegasi khusus yang diketuai Dr. Almeida Santos. Perundingan tahap pertama antara delegasi Portugal dengan delegasi Indonesia di Jakarta pada tanggal 29 Agustus 1975 pada pertemuan itu Indonesia telah menyatakan prinsip:

- 1) Pemerintah Portugal sebagai satu satunya pemerintah yang syah di Timor Timur.
- 2) Kehadiran pasukan RI, hanya bisa apabila diminta oleh Portugal, dan hanya sebagai "Task Force".
- 3) Pasukan Indonesia berada dibawah komando Indonesia dan komando ini dibawah "Joint Authority".
- 4) Tidak boleh ada kesan "Kongkalikong" antara RI dengan Portugal .
- 5) Biaya operasi tidak dipikul oleh RI .

Ketika berada di Australia, Dr. Santos meminta bantuan kepada PM Whitlam agar bersama – sama Portugal dan Indonesia bersedia membentuk suatu "*Multinational peace - keeping - force*" saja daripada suatu "*Joint Authority*".

Australia bersedia duduk dalam *Joint Authority*, tetapi dengan syarat tidak bersedia mengirimkan tentaranya.

Usaha Dr. Santos untuk mempertemukan partai –partai yang sedang bersengketa dengan delegasi dari Portugal ternyata menemui kegagalan. Hal ini disebabkan karena pertentangan kedua partai mayoritas yang sedang bersengketa dengan Gubernur Lemos Pires dan kedua partai itu menyatakan bahwa Lemos Pires adalah penyebab dan sumber dari segala kebobrokan yang terjadi di Timor Timur .

Delegasi Portugal ini mengalami kegagalan dalam mengajak pemerintah Australia maupun parpol-parpol di Timor Timur. Oleh karena itu Almeida kembali ke Jakarta untuk memulai perundingan babak kedua dengan delegasi Indonesia yang diadakan pada tanggal 11 – 12 September 1975. Pembicaraan ini menghasilkan beberapa hal yakni :

- a) Delegasi Portugal tidak membenarkan berita tentang rencana penyerahan Timor Timur secara sepihak kepada FRETELIN.
- b) Indonesia menolak penyerahan kekuasaan secara sepihak seperti yang diberitakan.
- c) Pihak Indonesia menawarkan fasilitas angkutan kepada delegasi Portugal untuk bertemu Parpol-parpol yang sedang bersengketa dan menganjurkan agar pertemuan tersebut mutlak dilaksanakan.
- d) Pihak Indonesia mengemukakan penyesalan bahwa Dr. Santos seolah-olah hanya mementingkan nasib segelintir tentara Portugis yang ditawan daripada nasib rakyat Timor Timur secara keseluruhan.

e) Indonesia menerima rencana baik Dr. Santos untuk mengadakan pertemuan Macao.

Pertemuan Macao II yang direncanakan pada tanggal 25 September 1975 ternyata mengalami kegagalan. Penyebabnya antara lain pertentangan antara Presiden Costa Gomes dan Dr. Santos mengenai jalan keluar untuk mengatasi masalah yang terjadi di Timor Timur, disamping krisis politik yang melanda kabinet Portugal. Konsekwensinya, pemerintah Portugal tidak mempunyai waktu yang memadai untuk mempersiapkan rencana Pertemuan Macao II.

b. Pertemuan Roma.

Kegagalan misi Almeida Santos ternyata cukup menimbulkan keprihatinan yang besar bagi pihak-pihak yang terlibat. Secara langsung, terutama Portugal dan Indonesia dan juga ke-3 parpol yang sedang berkonfrontasi. Pemerintah Lisabon menyadari suatu penyelesaian terhadap masalah Timor Timur tidak mungkin dicapai tanpa kekuasaan lain yang langsung berkepentingan seperti Indonesia.

Oleh karena itu pada tanggal 1-3 November 1975 diadakan pertemuan di Roma. Delegasi Portugal terdiri dari : Mayor Melo Antunes (Menteri Luar Negeri), Dr. Jose Manuel Villas Boas (Direktur jendral Politik Luar Negeri), Mayor Rui Ravara (Direktur kabinet Koordinasi pada kepresidenan), Mayor Adelino Coellio (Anggota pemerintahan Timor Timur), Dr. Leonardo Mathias (Konsul Portugis di Roma). Delegasi Indonesia terdiri dari: Adam Malik (Menteri Luar Negeri sebagai ketua delegasi), Beng Mang Reng Say (Dubes RI untuk

Portugal), Sumarjo Sastrowardoyo (Dubes RI untuk Italia), Adenan (kepala Direktorat Asia pasifik Deplu), Irawan dan Ali Alatas⁴⁵⁾.

Pada hari pertama perundingan telah berhasil dicapai penyesuaian beberapa pendapat tentang beberapa prinsip antara lain :

- 1) Tetap diakuinya kekuasaan pemerintah Portugis atas wilayah Timor Timur.
- 2) Perlu segera diciptakannya suatu gencatan senjata antara pihak-pihak yang bersengketa.
- 3) Pengembalian segera 56.000 orang pengungsi Timor Timur yang berada di wilayah Indonesia.
- 4) Mengenai 23 orang Portugis tawanan UDT, Portugis meminta jasa-jasa baik Indonesia untuk mengusahakan pegembalian tawanan tersebut.

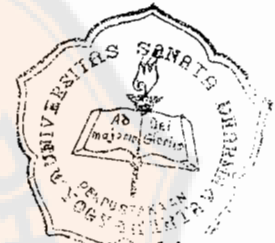
Akhirnya pada tanggal 3 November 1975 berhasil ditandatangani berupa *memorandum of understanding* (MoU) (Lampiran III). Hasil pertemuan Roma dapat dinilai cukup lumayan, karena adanya saling pengertian yang cukup kuat dalam MoU. Akan tetapi hasil pertemuan ini belum meraih inti persoalan, karena baru merupakan peyajakan dan penegasan sikap masing-masing yang ternyata saling maklum-memaklum.

Inti dari pertemuan Roma antara lain sebagai berikut:

- a. Pemerintah Indonesia menyetujui dan akan membantu terlaksananya rencana baru pemerintah Portugal untuk mendekatkan kembali pihak-pihak yang bersengketa dan mengajak mereka berunding mencari suatu penyelesaian damai.

⁴⁵⁾ Soetrisno, *op. cit.*, hal. 39.

- b) Pemerintah Portugal tidak bersedia mengundang Indonesia untuk berpartisipasi secara militer dalam usaha pemulihan keamanan dan ketertiban karena alasan mendasar.
- c) Pemerintah Portugal berpendirian bahwa Indonesia adalah pihak yang paling berkepentingan dalam masalah Timor Timur dan pemerintah Portugal akan terus berkonsultasi dan bekerjasama dalam setiap usaha dan tahap proses dekolonisasi daerah tersebut. Pemerintah Portugal tidak berniat menginternasionalisasi daerah tersebut⁴⁶⁾.



C. Proklamasi Partai Politik di Timor Timur

Perkembangan pergolakan keadaan Timor Timur yang makin membuktikan ketidakmampuan pemerintah Portugal untuk menegakkan kekuasaan dan wibawanya di Timor Timur. Banyak pejabat-pejabat Portugal yang gagal untuk mencari jalan keluar masalah yang timbul di Timor Timur.

Sejak awal September 1975 pasukan-pasukan dari kedua partai APODETI dan UDT, serta diperkuat oleh partai minoritas KOTA (Klibur Oan Timor Aswain) dan Trabalhista yang bergabung dalam wadah MAC (Movimento Anti Comunista/ Gerakan Anti Komunis). Untuk memperkuat pasukan gabungan, pemuda pengungsi yang umumnya berasal dari partai UDT dan APODETI yang ada di Kabupaten Belu (wilayah Indonesia) diberi latihan keprajuritan⁴⁷⁾.

Pada tanggal 2 Oktober 1975 terjadi pertempuran antara pasukan FRETELIN dan pasukan gabungan untuk merebut Batu Gede. Untuk diketahui

⁴⁶⁾ Hendro Subroto, *op. cit.*, hal. 51-56.

⁴⁷⁾ *Ibid*, hal. 84

bahwa Batu Gede merupakan daerah perbatasan antara kabupaten Belu dan Propinsi Timor Timur dan merupakan benteng, sebagai tempat pemusatan bagi pasukan FRETELIN. Serangan-serangan tersebut berhasil mengejutkan pasukan-pasukan FRETELIN, karena mereka tidak menduga sama sekali akan ada serangan dari pasukan gabungan.

Tanggal 8 Oktober 1975, Batu Gede telah direbut oleh pasukan gabungan. Delapan hari kemudian yaitu tanggal 16 Oktober 1975 kota Balibo ikut diserang, sehingga jatuh ketangan pasukan gabungan dan serangan ini mengakibatkan tewasnya empat orang wartawan Australia. Akhir Oktober 1975 kota Maliana yang merupakan kota yang terpenting di daerah perbatasan serta beberapa lokasi strategis di daerah perbatasan seperti Atabai, Lois dan Bobonaro jatuh ketangan pasukan gabungan⁴⁸⁾.

Peristiwa ini merupakan pukulan berat bagi FRETELIN karena dengan jatuhnya daerah-daerah ini ketangan pasukan gabungan, maka jalan semakin terbuka lebar untuk menuju kota Dili. Hal ini disebabkan karena dengan jatuhnya kota Dili ketangan pasukan gabungan, maka harapan FRETELIN untuk keluar sebagai pemenang pergolakan semakin menipis.

1. Proklamasi Sepihak FRETELIN

Dalam keadaan serba panik FRETELIN mulai kehilangan logika pemikirannya dalam perjuangannya. Untuk menolong keadaan yang sudah tidak tertahankan FRETELIN berusaha mengalihkan perjuangannya dari medan

⁴⁸⁾ Susanto, Zudhi, *op. cit.*, hal. 33

pertempuran ke medan diplomasi internasional dengan maksud mencari dukungan yang lebih banyak dari negara –negara yang bersimpati kepada FRETELIN.

Pada tanggal 28 November 1975 jam 05.55 bertempat di lapangan Dos Boa Ventura Dili, Komite Sentral FRETELIN mencetuskan proklamasi sepihak dan menyatakan berdirinya REPUBLIK DEMOKRASI TIMOR TIMUR. Selain pembacaan proklamasi, dalam upacara itu dilakukan penurunan bendera Portugal diganti dengan bendera Republik Timor Timur. Sebagai Presidennya adalah Xavier Amaral

Dalam pidatonya Xavier Amaral menyatakan bahwa ia bersumpah bahwa akan senantiasa membela dan melaksanakan kepentingan rakyat Timor Timur dan memerintah berdasarkan kemauan rakyat dan menurut azas-azas yang benar-benar merdeka. FRETELIN sebagai penunjuk rakyat dengan persatuan dan kesatuannya dalam perjuangan yang berakhir dengan kemerdekaan total.

Terhadap Indonesia Xavier menyatakan bahwa Indonesia adalah kaum imperialis dengan antek-anteknya seperti UDT dan APODETI yang senantiasa berusaha menggagalkan dan mengacaukan kemerdekaan rakyat Timor Timur. Mereka ingin merampas kekayaan rakyat Maubere, Timor Timur.

Partai UDT didirikan oleh imperialis dan kolonialis yang memecah belah persatuan rakyat Timor Timur dengan tujuan khusus mempertahankan kekuasaan asing di bumi Timor Timur. Sebagai biang keladi segala kerusuhan adalah APODETI, sebab kalau tidak ada ide untuk berintegrasi dengan Indonesia, maka Indonesia tidak akan mencampuri urusan di Timor Timur. Akan tetapi dengan APODETI-lah Indonesia mengadakan intervensi di Timor Timur.

Terhadap proklamasi sepihak oleh FRETELIN, pemerintah Portugal tidak menyetujui dan tidak begitu saja mengakuinya. Pemerintah Portugal secara fundamental berpendirian bahwa penyelesaian politik terakhir harus ditentukan oleh suatu *negotiated solution* antara parpol-parpol yang bersangkutan di Timor Timur. Pemerintah Indonesia menanggapi pernyataan sepihak proklamasi kemerdekaan Timor Timur oleh FRETELIN dengan mengeluarkan pernyataan :

- a) Pemerintah Republik Indonesia sangat menyesalkan tindakan sepihak oleh FRETELIN berupa apa yang disebut pernyataan kemerdekaan Timor Portugis pada tanggal 28 November 1975.
- b) Pemerintah Indonesia sangat menyesalkan pernyataan sikap pemerintah Portugal yang membenarkan tindakan FRETELIN.
- c) Pemerintah Indonesia tetap yakin bahwa masa depan Timor Timur mesti ditetapkan oleh rakyat Timor Portugal sendiri.

2. Proklamasi Balibo (Proklamasi Integrasi)

Proklamasi sepihak oleh FRETELIN adalah suatu proklamasi terpaksa, tetapi cukup menyulitkan posisi gerakan gabungan APODETI, UDT, KOTA dan Trabalhista. Untuk menandingi proklamasi FRETELIN, maka gerakan gabungan menjawabnya dengan suatu proklamasi tandingan pada tanggal 29 November 1975 yaitu pernyataan penggabungan Timor Timur dengan Indonesia, dan tidak mengakui proklamasi sepihak yang dilakukan oleh FRETELIN. Isi lengkap

proklamasi dibuat dalam bahasa Inggris dan ditanda tangani pada tanggal 30 November 1975⁴⁹⁾ (lampiran IV).

Naskah proklamasi terjemahannya dalam bahasa Indonesia adalah sebagai berikut :

PROKLAMASI

Kami rakyat Timor Portugis dan daerah-daerah bawahannya dalam hal ini diwakili oleh APODETI (Associacao Popular de Timor), UDT (Uniao Democratica de Timor), KOTA (Klibur Oan Timor Aswain) dan Partai TRABALISTA setelah mengadakan analisa saksama menyesali proklamasi sepihak FRETILIN yang dituangkan menjadi "Proklamasi Kemerdekaan" atas wilayah Timor Portugis, sedangkan sikap demikian nampaknya disetujui pemerintah Portugal dan hasil dari fakta ini sama sekali pertentangan dengan kepentingan rakyat Timor Portugis.

Menganggap bahwa kondisi-kondisi untuk penentuan nasib sendiri dari rakyat Timor Portugis dengan memilih suara rakyat tidak dapat dilaksanakan.

Mempertimbangkan kenyataan bahwa berbagai inisiatif, telah diperlihatkan sebagai bukti untuk mencapai hasil menyakinkan politik secara adil dan damai atas wilayah Timor terutama :

- *Pertemuan Macao dimana FRETILIN dengan kehendak sendiri tidak mau hadir walaupun pemerintah Portugal sudah mengundang wakil-wakilnya untuk hadir.*

⁴⁹⁾ Soekanto, *op. cit.*, hal. 113-115.

- *Kesediaan pemerintah Australia yang memberi kemungkinan untuk dialog dalam hubungan dengan masalah Timor Timur diwilayah sendiri.*
- *Pertemuan Roma yang dilakukan antara Menteri Luar Negeri Portugal dan Indonesia dengan kesimpulan terakhir bahwa keputusan memorandum saling pengertian antara kedua negara.*
- *Usaha-usaha yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia dengan mengirim Menteri Luar Negeri Adam Malik ke daerah perbatasan dengan maksud untuk menjelaskan semangat pertemuan Roma.*

Menyimpulkan bahwa FRETRELIN dengan sengaja telah melanggar semua usaha yang disebutkan diatas. Di tambah fakta bahwa FRETRELIN telah mengambil sikap-sikap yang tidak sehat yaitu secara komit mencegah rakyat Timor Portugis yang untuk menyatakan aspirasi-aspirasinya yang syah.

Melihat situasi yang diciptakan oleh FRETRELIN ketika menyatakan secara sepihak kemerdekaan Timor Portugis benar-benar menghilangkan segala kemungkinan penyelesaian secara damai masalah ini sesuai dengan kehendak rakyat.

Merasa bahwa karena tindakan kaum kolonialis Portugal dan Belanda yang hampir selama 500 tahun memisahkan hubungan darah, hubungan persaudaraan dan etnis moral dan kebudayaan dengan rakyat Indonesia dari pulau Timor.

Melihat bahwa saat ini harus dianggap sebagai kesempatan yang baik untuk membangun kembali ikatan-ikatan tradisional yang kuat dengan bangsa Indonesia.

Atas nama Allah Yang Maha Kuasa dan berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan tadi kami dengan khimat menyatakan integrasi dari seluruh bekas koloni Portugis di Timor dengan bangsa Indonesia dan proklamasi ini merupakan pernyataan paling tinggi dari perasaan-perasaan rakyat Timor Portugis.

Sesuai dengan isi proklamasi Integrasi, pemerintah dan rakyat Indonesia diminta untuk mengambil langkah-langkah yang perlu guna untuk melindungi kehidupan rakyat yang sekarang merasa dirinya sebagai bagian dari rakyat Indonesia yang sedang hidup dibawah teror dan praktek-praktek facist dari FRETELIN yang direstui oleh pemerintah Portugal

Dikeluarkan ,di Balibo,30 November1975

Atas nama APODETI

*Guilherme Maria Gonsalves
Anggota Prsidium*

*Alexander Borromeu
Anggota Prsidium*

Atas nama KOTA

*Jose Martins
Presiden*

*Atas nama UDT
Fransisco Xavier Lopes da Cruz*

Presiden

*Domingod de Oliveira
Sekretaris Jendral*

Atas Nama partai TRABALISTA

*Domingos C. Pereira
Anggota Direktur*

Terhadap pernyataan dua proklamasi “Proklamasi Kemerdekaan” dari FRETELIN 28 November 1975, dan “proklamasi penggabungan dengan Indonesia oleh Empat partai pada tanggal 30 November 1976”, Presiden Portugal Costa Gomes pada tanggal 30 November 1975 itu pula telah mengeluarkan pernyataan resmi yang disiarkan dari Lisabon, bahwa Portugal tetap sebagai penguasa yang syah terhadap wilayah Timor Timur. Portugal tidak dapat menerima proklamasi sepihak oleh FRETELIN yang mengumumkan kemerdekaan wilayah Timor Timur, dan tidak juga menerima Proklamasi Balibo, yang ingin menggabungkan dengan negara ketiga (Indonesia).

Perkembangan di Timor Timur oleh wakil PBB juga telah dilaporkan kepada Sekretaris Jendral PBB Kurt Waldheim melalui sepucuk surat. Wakil Portugal di PBB menyatakan bahwa Portugal tidak dapat menyetujui pernyataan sikap secara sepihak oleh partai-partai di Timor Timur. Selain itu diakuinya pula bahwa pemerintahnya tidak mempunyai sarana untuk segera dapat membawa pihak-pihak yang bersengketa itu ke meja perundingan. Akan tetapi, wakil Portugal menyakinkan Sekjen PBB bahwa secepat mungkin melakukan perundingan-perundingan dengan partai-partai di Timor Timur. Sekjen PBB juga menegaskan bahwa pernyataan-pernyataan sepihak yang dilakukan oleh partai-partai itu tidak sesuai dengan prinsip dekolonisasi yang telah diumumkan oleh PBB. Timor Timur secara resmi bergabung dengan Indonesia sesuai dengan

ketetapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1976 tentang pengesahan penyatuan Timor Timur kedalam wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia dan pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur.



BAB IV

**REAKSI NEGARA-NEGARA DI DUNIA MENGENAI INTEGRASI
TIMOR TIMUR**

A. Reaksi Indonesia

Setelah mendengar adanya pernyataan penggabungan Timor Timur dengan Indonesia oleh empat partai, Menteri Luar Negeri Adam Malik menyatakan, kita terharu atas keputusan rakyat Timor Timur yang mengumumkan wilayah itu sebagai wilayah Republik Indonesia, walaupun pengumuman itu belum kita terima secara resmi dan baru membacanya di surat kabar.

Wakil ketua DPR-RI Domo Pranoto memberikan keterangan kepada pers pada tanggal 1 Desember 1975 menyatakan bahwa Indonesia dihadapi pada dua pilihan , yaitu mengakui kemerdekaan FRETRELIN atau menerima proklamasi UDT dan APODETI yang menyatakan wilayah Timor Timur merupakan bagian dari wilayah Indonesia. Kalau kita mengakui proklamasi FRETRELIN berarti kita menolak pernyataan UDT-APODETI , sedangkan kalau kita menerima pernyataan APODETI-UDT sudah pasti konsekwensinya menolak FRETRELIN.

DPRD Nusa Tenggara Timur yang dekat dengan Timor Timur, dalam pernyataannya pada tanggal 1 Desember 1975 menegaskan bahwa, tindakan sepihak FRETRELIN memproklamasikan kemerdekaan Republik Demokrasi Timor Timur adalah tidak sah dan tidak dapat dibenarkan. Sementara itu Gubernur Nusa Tenggara Timur El Tari menyatakan bahwa, kedudukan rakyat NTT sangat terancam karena adanya tindakan-tindakan FRETRELIN itu, sehingga pemerintah

pusat harus memperkuat rakyat NTT dengan senjata, khususnya di daerah perbatasan

Menteri Penerangan Mashuri SH memberikan keterangan kepada pers bahwa pemerintah Indonesia dalam waktu dekat akan menyatakan sikapnya terhadap proklamasi Balibo oleh partai APODETI, UDT, KOTA dan Tralabista pada tanggal 29 November 1975. Ia juga menambahkan bahwa Indonesia belum memastikan menolak atau menerima proklamasi dan Indonesia selalu beraspirasi paralel dengan segala niat dan sikap untuk membebaskan diri dari tindakan kolonialisme. Sesuai dengan landasan bahwa negara Indonesia tidak mempunyai ambisi teritorial dan hanya mempunyai tujuan yang mengusahakan kesejahteraan rakyat sesuai dengan tahap-tahap pembangunan.

Pada tanggal 4 Desember 1975 dikeluarkan pernyataan sikap Indonesia terhadap perkembangan situasi di Timor Timur terutama yang berkaitan dengan dengan proklamasi FRETILIN dan proklamasi tandingan empat partai. Salah satu pernyataan sikap Indonesia adalah :

- 1) Indonesia sangat menyesalkan tindakan sepihak FRETILIN yang telah menyatakan kemerdekaan Timor Portugis tanpa menghiraukan pendapat partai-partai lainnya yang juga mewakili suara rakyat.
- 2) Menghargai simpati dan memahami sedalam-dalamnya pernyataan partai-partai UDT, APODETI, KOTA dan Tralabista yang atas nama rakyat Timor Portugis menyatakan menyatukan diri ke dalam Negara Republik Indonesia.

- 3) Menyerukan kepada semua pihak yang bersangkutan di Timor Timur untuk secara sungguh-sungguh mengusahakan tercapainya pelaksanaan dekolonisasi wilayah Timor Portugis secara tertib dan damai.
- 4) Akan mengambil langkah-langkah yang perlu untuk menjamin keamanan wilayah nasional, menjaga kedaulatan negara dan melindungi penduduk terhadap gangguan dari luar serta berdasar atas azas anti kolonialisme dan azas pri kemanusiaan. Pemerintah bersama rakyat Indonesia mempunyai kewajiban moral untuk melindungi rakyat di wilayah Timor agar proses dekolonisasi terwujud sesuai dengan keinginan seluruh rakyat Timor Portugis..
- 5) Menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia umumnya dan rakyat yang wilayahnya berbatasan dengan wilayah Timor khususnya untuk meningkatkan kewaspadaan⁵⁰⁾.

B. Reaksi Negara-negara Asia dan Afrika

1. Negara Asia.

a. India

Rikhi Jaipal Dubes India untuk PBB menyatakan bahwa betapa tidak wajar sebuah pulau yang rakyatnya terdiri dari satu suku bangsa dan satu budaya dibagi oleh dua kolonis Eropa. Dengan demikian keputusan menjadi bagian dari integral dari Indonesia adalah keputusan yang tepat , karena rakyat Timor Timur

⁵⁰⁾ Soekanto, *op.cit.*, hl. 291.

bersatu kembali dengan saudara –saudaranya yang dipisahkan dari oleh penjajahan Portugis selama 450 tahun.

b. Iran

Bahman Efsfandari wakil Iran di PBB menyatakan bahwa, rakyat Timor Timur secara resmi telah minta kepada Indonesia bersedia menerima penggabungan wilayah Timor Portugis dengan Indonesia. Sebelum menerima integrasi itu, terlebih dahulu Indonesia mengirim misi pencari fakta untuk menjajaki pandangan-pandangan politik yang hidup dikalangan rakyat Timor Timur. Hasilnya menyatakan bahwa bagian terbesar penduduk wilayah itu menghendaki integrasi dengan Republik Indonesia.

c. Jepang

Wakil Jepang di PBB Isao Abe, menyatakan bahwa masalah bila dan bagaimana hak penentuan nasib sendiri dilaksanakan oleh rakyat Timor Timur, boleh saja dipersoalkan. Akan tetapi yang penting, semua pihak yang berkepentingan harus berusaha mencari pemecahan yang bermanfaat dan dapat meningkatkan kesejahteraan hidup penduduk Timor Timur.

d. Malaysia

Malaysia diwakili oleh Tan Sri Zailon Ibrahim menyatakan bahwa, daerah Timor Timur telah memutuskan untuk bergabung dengan Indonesia. Oleh karena itu apa yang telah dilakukan oleh rakyat Timor Timur semua negara harus menghormatinya. Selain itu juga diharapkan agar masyarakat internasional dapat menghargai dan menghormati penentuan nasib sendiri rakyat Timor Timur.

e. RRC

Republik Rakyat Cina menyatakan bahwa, Indonesia mengabaikan resolusi PBB dan telah meningkatkan agresi bersenjata terhadap Timor Timur, dengan dalih atas nama rakyat. Selanjutnya Indonesia menyatakan Timor Timur sebagai propinsinya, yang sebenarnya adalah suatu pencaplokan terselubung terhadap suatu negara berdaulat. Lebih lanjut RRC meminta agar Indonesia segera menarik pasukannya dari Timor Timur, sehingga rakyat Timor Timur dapat melaksanakan haknya untuk merdeka dan menentukan nasibnya sendiri tanpa campur tangan negara asing. RRC menyatakan sikapnya yang menyokong perjuangan rakyat Timor Timur yang dipimpin oleh FRETELIN. RRC percaya bahwa perjuangan tersebut akan mendapat simpati yang dalam dan dukungan dari negara-negara rakyat yang cinta keadilan.

f. Kamboja

Kamboja menyatakan solidaritasnya terhadap perjuangan rakyat dan pemerintah republik demokrasi Timor Timur dibawah pimpinan FRETELIN. Tanpa menyebutkan nama Indonesia, kamboja menyatakan bahwa setelah merdeka, Timor Timur telah mengalami agresi dan aneksasi dengan kekerasan.

2. Negara-negara Afrika

a. Benin

Negara ini dengan nada keras menuduh Indonesia sebagai Neo-imperialis yang sejarahnya ternoda oleh sifat-sifat ekspansionisme, misalnya ekspansionisme Indonesia terhadap Irian dan Maluku. Oleh karena itu negara ini berharap agar

negara-negara lain mengutuk perbuatan ekspansionis Indonesia dan memberikan bantuan yang cukup terhadap perjuangan untuk mencapai kemerdekaan.

b. Congo

Congo hanya menekankan agar resolusi PBB dan keamanan dilaksanakan secara konsekwen. Congo juga menanggapi Portugal sebagai kuasa pemerintahan tidak bertanggungjawab dan tidak berusaha untuk mencari penyelesaian dengan partai-partai pada waktu itu, sehingga hal tersebut dipakai alasan bagi Indonesia untuk mengadakan invansi militer.

c. Maroko

Negara ini diwakili oleh dubes Maroko Benjallon, mengemukakan pendapatnya bahwa Timor Timur merupakan bagian dari Indonesia. Baik sebelum kekuasaan penjajah datang ataupun sesudahnya hingga terjadinya penggabungan tidak dipisah-pisahkan lagi. Ditegaskannya bahwa keputusan rakyat Timor Timur yang sudah menentukan nasibnya sendiri dengan memilih bergabung dengan Indonesia harus dihormati.

d. Mozambique

Negara Mozambique menyatakan penilaiannya bahwa situasi di Timor Timur semakin menjadi buruk dan membahayakan perdamaian serta keamanan internasional. Lebih lanjut dikatakannya meskipun dengan kekerasan senjata, tetapi FRETILIN tetap mampu mengadakan perlawanan dan masih mengadakan siaran radio tiga kali seminggu. Banyak rakyat Timor Timur ditangkap, dituduh bekerjasama dengan FRETILIN. Mengenai FRETILIN dikatakan bahwa FRETILIN adalah partai yang sejak semula dinilai sebagai partai patriotik dan

berusaha melakukan perjuangan melalui jalan damai. Tetapi setelah keadaan menjadi kacau Portugal tidak menguasai keadaan, tidak ada jalan lain lagi bagi FRETELIN, kecuali menyatakan kemerdekaannya yang disusul intervensi oleh Indonesia.

f. Guinea Bissau

Menteri Luar Negeri Guinea Bissau menyatakan pengakuannya terhadap apa yang menamakan diri “Republik Demokrasi Timor Timur “ sebagai suatu negara merdeka dan berdaulat. Selain itu juga dilancarkannya kutukan terhadap apa yang dinamakan “ Invasi Pasukan Asing “ ke Timor Timur. Kepada Indonesia dimintainya agar menarik mundur semua pasukannya dari Timor Timur, dan menghormati keutuhan wilaya Timor Timur⁵¹⁾.

3. Negara-negara Barat/ negara-negara lainnya

a. Australia

Australia mengakui integrasi karena mempunyai kepentingan ekonomi. Hal ini dapat dilihat pada pertemuan rutin antara Komite Bisnis Indonesia dan Australia (AIBC). Pertemuan ini dihadiri oleh semua perusahaan terbesar di Australia, pejabat departemen seperti hubungan luar negeri dan perdagangan luar negeri. AIBC kemudian meminta kepada pemerintah Australia agar pemerintah mempertegas pengakuannya atas integrasi Timor Timur ke Indonesia. Mereka telah memperhitungkan bahwa celah Timor antara Australia dan Timor Timur mengandung cadangan minyak sebanyak 5 (lima) miliar barel dan 1850 miliar meter kubik gas alam. Tidak lama kemudian menteri Luar Negeri Australia

⁵¹⁾ Soekanto, *op.cit.*, hal.539.

menyatakan bahwa Australia segera mengakui integrasi Timor Timur, demi alasan kemanusiaan dan lebih mengakui tindakan itu dari lingkungan regional yang mana kita harus memahami pandangan Indonesia bahwa, Timor Timur sekarang adalah bagian dari Indonesia dan bahwa situasi seperti ini tidak mungkin diubah.

b. Amerika Serikat.

Amerika Serikat mengakui integrasi Timor Timur ke wilayah Indonesia. Menurut John Tylor Amerika Serikat bersikap demikian karena kepentingan keamanan. Amerika Serikat membutuhkan niat baik pemerintah Indonesia. Puncak kepentingan itu adalah keinginannya tetap digunakan selat Ombai –Wetar sebagai lintasan kapal selam Amerika. Saat itu rancangan undang-undang kelautan sedang dibahas di PBB, yang kemungkinan besar meniadakan hak melintasi bawah laut. Permasalahan ini bukan suatu hal yang menyenangkan bagi negeri adi kuasa, jika kapal selam bersenjata nuklir dilarang melintasi bawah laut tanpa halangan melalui selat-selat internasional yang terletak di perairan wilayah negara tertentu. Bagi Amerika Serikat, beberapa selat yang harus dilintasi untuk mencapai sasaran tanpa bergantung pada ijin dari negara sekutunya, terutama adalah selat Gibraltar dan selat di Indonesia, Lombok dan Ombai-Wetar⁵²⁾.

c. Jerman

Dalam surat kabar Jerman Barat yaitu *Derbund* dalam artikelnya menyatakan bahwa persoalan Timor Timur sama sekali sudah diselesaikan karena rakyat Timor Timur dengan suara bulat telah menginginkan bergabung dengan Indonesia. Sementara itu *Neue Zurcher Zeihing* dengan tegas menilai bahwa

⁵²⁾ John, Taylor, *op.cit.*, hal.135.

masalah Timor Timur sudah selesai karena rakyat secara bulat menyatakan bergabung dengan Indonesia. Hanya saja karena tidak dipenuhinya resolusi PBB dan tidak diadakannya referendum, kemungkinan besar akan menimbulkan perdebatan baru di Dewan Keamanan PBB, yang mungkin berakhir dengan tidak diakuiinya status daerah Timor Timur oleh Portugal.



BAB V

PENUTUP

Pertama, Portugal sebagai kolonis tertua berusaha mempertahankan koloni-koloninya dan termasuk kolonis yang paling akhir melepaskan koloni-koloninya. Terhadap kecaman-kecaman opini dunia Portugal mengemukakan bahwa, kolonialisme Portugal berlainan dengan kolonialisme negara-negara lain, karena negara jajahan merupakan bagian integral dari Portugal. Portugal baru sadar setelah merasa kewalahan menghadapi perang koloni, yang mendorong terjadinya terjadinya kudeta militer pada tanggal 25 April 1974. Kudeta militer ini lebih dikenal dengan nama “Red Flowers Revolution” atau revolusi bunga yaitu, suatu revolusi/kudeta yang dipimpin oleh Jendral Spínola terhadap rezim Salazar atau Caetano yang dianggap otoriter dan fasis.

Pada dasarnya kudeta ini telah melahirkan dua program politik baru yaitu, gagasan demokrasi lahir sebagai reaksi terhadap sikap-sikap pemerintah rezim lama yang otoriter dan fasis, serta gagasan dekolonisasi yaitu, gagasan untuk memberikan kebebasan kepada negara jajahan untuk memiliki otonomi intern secara penuh dan mempunyai wewenang penuh untuk mengatur dalam negerinya masing-masing, sedangkan pemerintah Federal di Lisabon tetap menguasai bidang pertahanan dan hubungan luar negeri. Untuk itu pemerintah Portugal menginginkan adanya referendum untuk memberi kesempatan kepada rakyat dalam menentukan hari depan negerinya masing-masing.

Sebelum tahun 1974 di Timor Timur tidak pernah terjadi gerakan nasionalis dibawah koordinasi suatu pusat kekuatan tertentu sebagai pemersatu . Peristiwa pemberontakan anti kolonial peretama terjadi pada tahun 1959 di daerah Viqueque dan juga di daerah Manufahi. Akan tetapi pemberontakan-pemberontakan itu dapat dipadamkan oleh pemerintah Portugis.

Awal tahun 1970 surat kabar yang diterbitkan oleh kalangan gereja Katolik membuat gusar kalangan PIDE (polisi rahasia), karena surat kabar itu memuat perdebatan politik antara Ramos Horta dan Mari Alkatiri. Dengan adanya artikel ini maka, surat kabar Seara dibreidel. Akan tetapi suatu kelompok perlawanan telah dibentuk , karena para kolumnisnya seperti, Nicolau Lobato, Jose Ramos Horta, Xavier di Amaral, Dominggos de Oliveira, Manuel Carrascalao, Fransisco Borja da Costa, Inocio de Nura, Mari Allatiri, dll secara klandestis (secara sembunyi-sembunyi) mengadakan rapat di Dili dan terus mengadakan kontak dengan gerakan-gerakan nasionalis seperti, MPLA dan FRELIMO. Peristiwa ini secara langsung berfungsi mempersiapkan arena perjuangan politik untuk menghadapi gelombang-gelombang kejadian politik yang muncul sesudah revolusi 25 April 1974.

Revolusi 25 April 1974 di Portugal, membuka lembaran sejarah politik baru di negeri-negeri jajahannya, yang mana memberi nafas baru dan peluang lebih besar bagi pejuang-pejuang kemerdekaan. Bagi rakyat Timor Timur janji-janji yang diberikan oleh Spinoza berupa pengembalian hak-hak sipil termasuk hak demokrasi, pembebasan para tahanan politik, serta mengambil bagian dalam penyusunan kebijaksanaan pemerintah.

Dalam waktu yang singkat setelah terjadinya revolusi bunga, di Timor Timur telah terbentuk tiga partai politik besar yaitu, Uniao Democratica Timorese (UDT), Associcao Popular Democratica Timorese (APODETI) dan Frente Revolucionaria de Timor Leste Independente (FERTELIN). Secara garis besar, tujuan yang hendak dicapai oleh masing-masing partai yaitu UDT menghendaki suatu otonomi teritorial secara progresif tetapi tetap dibawah naungan bendera Portugal, APODETI menginginkan suatu penggabungan dengan Indonesia, dan FRETILIN memperjuangkan suatu negara yang merdeka.

Kedua, setelah ketiga partai terbentuk masing-masing partai mulai bergerak menurut garis permainan yang telah mereka tentukan sendiri. Akan tetapi situasi tersebut tidak berlangsung lama, setelah adanya Pergantian Gubernur beserta stafnya Gubernur Alves diganti oleh Lemos Pires yang anggotanya ada yang berhaluan komunis. Strategi mereka adalah dekolonisasi harus menghasilkan suatu posisi dan kondisi Timor Timur yang menguntungkan gerakan komunis internasional. Untuk Lemos Pires mulai menyatukan FRETILIN dan UDT untuk menghadapi APODETI.

Kedua partai ini mulai mengadakan tekanan-tekanan terhadap APODETI dan juga melancarkan isu-isu yang nadanya anti Indonesia. Seperti yang telah diduga, ternyata koalisi antara kedua partai ini tidak berlangsung lama karena pada dasarnya kedua partai ini menganut pola politik yang berbeda. Untuk mencegah terjadinya perang saudara maka diadakan pertemuan di Macao antar ketiga partai politik pada tanggal 26 – 28 Juni 1975. Akan tetapi wakil FRETILIN tidak hadir alasannya karena FRETILIN tidak sudi duduk satu meja

dengan APODETI karena sejak semula APODETI sudah menetapkan untuk berintegrasi dengan Indonesia dan tidak mendukung kemerdekaan rakyat Timor Timur.

Pertemuan Macao disamping menghasilkan ketentuan jadwal dekolonisasi, juga mengakibatkan ketegangan diantara ketiga partai . Pada 11 Agustus 1975 terjadi perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh UDT. Serangan ini mendapat bantuan dari kalangan pemerintah yang pro UDT. Mereka juga meminta agar gubernur Lemos Pires dan militer baik yang pribumi maupun yang Portugis tidak boleh ikut campur tangan.

Setelah terjadi kudeta yang dilakukan oleh UDT, Portugal meminta kepada Indonesia membantu pengungsian warga Portugal dan warga asing lainnya. Memenuhi permintaan itu pada tanggal 28 Agustus KRI Moginsidi merapat di Dili dibawah pimpinan Kolonel Subiyakto. Untuk meringankan penderitaan rakyat Timor-Timur KRI Monginsidi juga membawa beras. Akan tetapi bantuan ini ditolak oleh ad interim Portugal.

Sejak awal September 1975 banyak rakyat Timor Timur mengungsi ke daerah perbatasan Indonesia. Hal ini menimbulkan masalah yang sangat serius yang berkaitan dengan logistik ,penampungan dan perawatan. Untuk itu Indonesia mengeluarkan dana sebesar Rp. 920.330.863. Untuk usaha-usaha diplomatis Indonesia turut berperan dalam perundingan dengan Dr. Almeida Santos dan pertemuan Roma akan tetapi usaha-usaha diplomasi belum memberikan keputusan yang memuaskan.

Pergolakan di Timor Timur berlangsung terus-menerus. Pemerintah Portugal tidak mampu memenangkan situasi di Timor Timur. Sementara itu pasukan gabungan yang terdiri dari APODETI, UDT, KOTA dan Trabalhista mulai mengadakan serangan-serangan terhadap FRETELIN dan kedudukan FRETELIN semakin terdesak.

Dalam keadaan terdesak dan serba panik maka pada tanggal 28 November FRETELIN mulai mencetuskan proklamasi kemerdekaan Timor Timur dan menyatakan berdirinya Republik Demokrat Timor Timur. Untuk menandingi proklamasi FRETELIN maka gerakan gabungan menjawabnya dengan proklamasi Balibo pada tanggal 29 November 1975, yang menyatakan penggabungan Timor Timur dengan Indonesia dan tidak mengakui proklamasi sepihak yang dilakukan oleh FRETELIN.

Ketiga, setelah adanya proklamasi Balibo tanggal 29 November 1975 selain Indonesia, banyak negara yang memberikan reaksi/pernyataan sikap terhadap integrasi Timor Timur. Pernyataan sikap itu ada yang mendukung/ setuju terhadap integrasi Timor Timur dengan Indonesia dan ada juga yang tidak mendukung pernyataan integrasi.

Adapun negara-negara yang mendukung integrasi antara lain; India, Iran, Jepang, Malaysia (negara-negara Asia) dan Jerman, sedangkan yang tidak mendukung integrasi antara lain; Republik Rakyat Cina, Kamboja, (negara-negara Asia), Benin, Congo, Maroko, Mozambique, Guinea Bissau (negara-negara Afrika). Selain itu ada negara yang mendukung integrasi Timor Timur karena ada kepentingan-kepentingan tertentu seperti Amerika Serikat dan Australia.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR PUSTAKA

- Argo Twikoro Y. (1994). *Manusia Timor Timur dan Kesejahteraan Hidup Manusia Persepsi dan Perilakunya (Sebuah Studi di Kabupaten Dili Timor Timur)*. Yogyakarta : LPU-UAJY.
- Alex Dinut. (1995). *Proses Integrasi Timor Timur dalam Wilayah Republik Indonesia*. Jakarta : Kerjasama Lembaga Ketahanan Nasional-Perhimpunan Persahabatan Indonesia-Portugal.
- D. Hendropuspito OC. (1989). *Sosiologi Sistematika*. Yogyakarta : Kanisius
- Diplomasi Internasional Tentang Timor Timur (Dokumentasi)*. Jakarta : CSIS.
- Gottschalk, Louis. (1986). *Mengerti Sejarah (trj. Nugrohonotosusanto)*. Jakarta : UI-Press.
- Indonesia dan Dunia Internasional (Dokumentasi)*. (1975). Jakarta : CSIS.
- Jolliffe J. (1978). *Timor Timur, Nasionalisme, Kolonialisme*. Queensland : Univercity of Queensland Press.
- Kuntowijaya. (1994). *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta : Tiara Wacana.
- Koentjoroningrat. (1980). *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.
- Kartini Kartono. (1980). *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia, Suatu Alternatif*. Jakarta: Gramedia.
- Marwati Djoened Poespanegoro dan Nugroho Notosusanto. (1984). *Sejarah Nasional Indonesia III*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Nicol B. (1978). *Timor, The Stilborn Nation*. Victoria : Widescope Internasional Publisher pty. Ltd.
- Noor M. (1977). *Lahirnya Propinsi Timor Timur*. Jakarta: Alamanak.
- Pra Integrasi Timor Timur (Dokumentasi)*. (1983). Jakarta: CSIS.
- Rusdie Hamid, dkk. (1997). *Perjuangan Kemerdekaan Rakyat Timor Loro Sae*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sartono Kartodirjo. (1980). *Pengantar Metodologi Research Sosial*. Bandung: Alumni.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

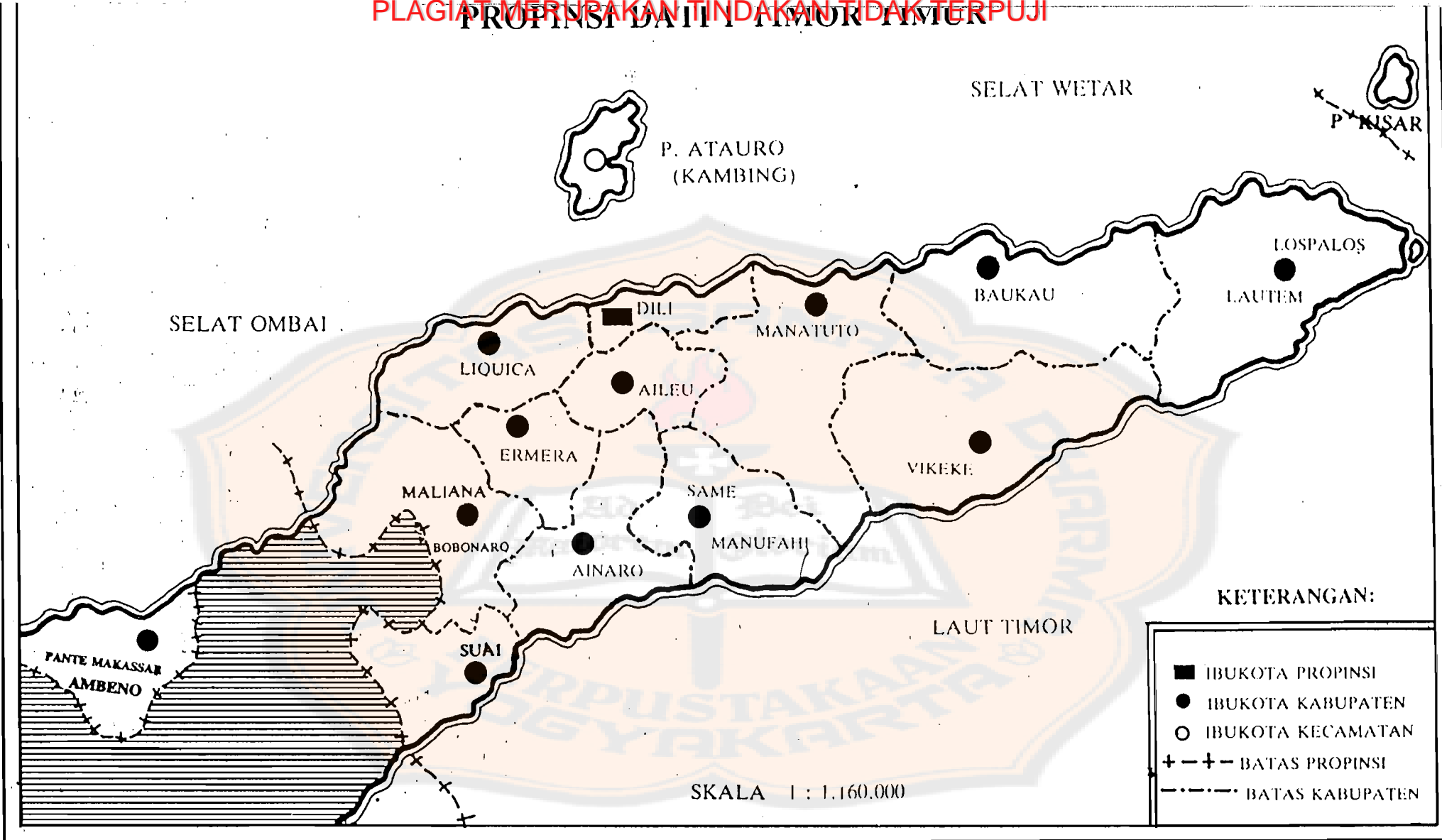
- Singarimbun, Masri dan Sofyan Effendi. (1987). *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: Lp3ES.
- Sejarah Perjuangan Rakyat Timor Timur*. (1994). Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Soekanto. (1976). *Integrasi (Kebulatan Tekad Rakyat Timor Timur)*. Jakarta: Bumi Restu.
- Soetrisno. (1985). *Timor Timur Bersatu Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Semarang: Mandiri jaya Abadi.
- Susanto Zudhi.(1995). *Sejarah Perjuangan Rakyat Timor Timur*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Tomodok,T. (1994). *Hari-hari Terakhir Timor Portugis*. Jakarta: Dunia Pustaka Jaya

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

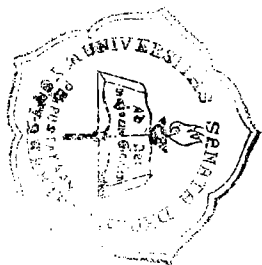
LAMPIRAN



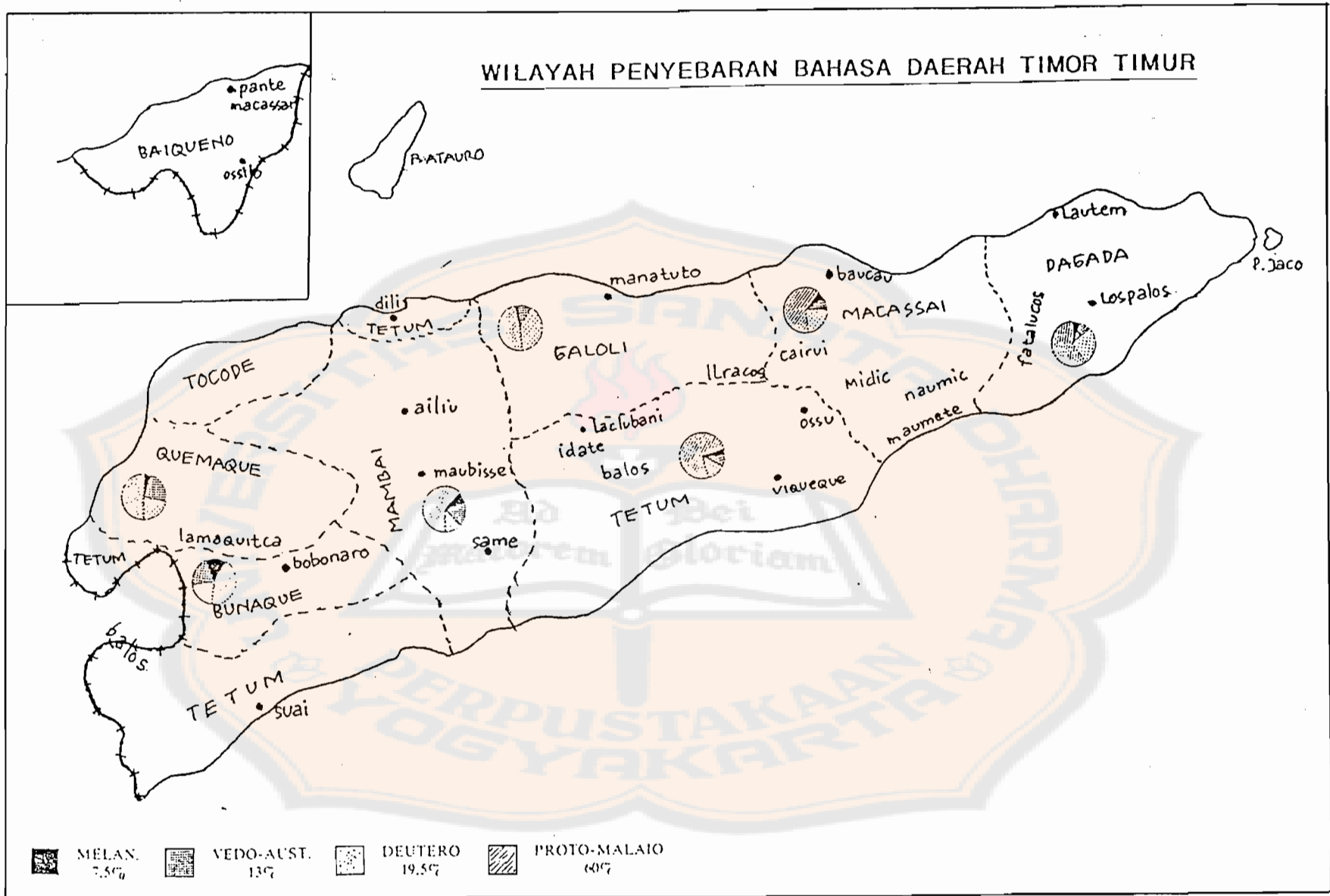
PROVINSI DAERAH TIMOR TIMUR



Lampiran I



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

1. The Portuguese Government reiterated that the fundamental possibility for the decolonization of Portuguese Timor lies with Portugal and that Portugal should rightly assume to undertake all efforts towards the speedy and orderly implementation of the act of self-determination by the people of Portuguese Timor. The Indonesian Government reiterated its position that it recognizes the Republic of Portugal as the sole authority in Portuguese Timor until such time when the people of Portuguese Timor shall exercise their lawful rights of self-determination.
2. Both sides expressed their continued adherence to the principles of decolonization as enunciated in the pertinent resolution of the U.N. and to the scrupulous safeguarding of the principle of respect of the will of the people of Portuguese Timor.
3. In accordance with those principles, the two sides agreed that it is urgently necessary that conditions of stability and order in Portuguese Timor are created which will enable its people freely to decide their own future.

To this end; the two sides agreed to exert concerted and coordinated efforts in order to convince the political parties of Portuguese Timor of the necessity to resume talks with the Portuguese Government aimed at finding a solution in accordance with the wishes of the people of Portuguese Timor.

4. The two sides further agreed that such talks must be convened at the earliest possible time between Portugal and all political parties simultaneously and be based on a precise agenda including at least the following subjects for discussion :
 - the establishment and maintenance of an effective cease-fire in Portuguese Timor ;
 - the problem of the return of Portuguese Timor refugees now residing in Indonesian territory;
 - the problem of 23 Portuguese nationals detained by the UDT ;

- the

8. The Indonesian side acknowledged that the question of the 23 Portuguese nationals detained by the UDT is of utmost importance to the Portuguese Government. The Indonesian side reiterated its readiness to convey the concern of the Portuguese Government on this matter to the UDT and to exert all efforts in order to effect their speedy release. The Portuguese side expressed its conviction that this release would represent a gesture of the political goodwill of the UDT with which Portugal has never considered itself to be at war. In Portugal's view, continued unjustified detention would create an unfavourable climate to the success of the talks.
9. Both sides agreed on the need to avoid external interference in the process of decolonization in Portuguese Timor, especially those which may lead to further fratricide and armed fighting in the territory.
10. Both sides agreed that under the present circumstances premature involvement by the U.N. and other forms of "internationalization" of the problem of Portuguese Timor would be inopportune. It is acknowledged however, that at a certain stage U.N. involvement and endorsement would be considered appropriate and necessary.
11. The Portuguese Government reiterated that in the implementation of the decolonization in Portuguese Timor it will be necessary to safeguard the legitimate interests of the countries of the region, particularly the interests of the Republic of Indonesia as the closest neighbouring country.
12. The two sides agreed on the necessity to continue to maintain close cooperation and consultation between them on all aspects

and

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- the establishment of a transitional governing mechanism in Portuguese Timor, in which all the political parties are equitably represented, to prepare for the implementation of the act of self-determination.

With regard to the achievement of a cease-fire, the two sides agreed to exert all efforts to persuade all the parties concerned in Portuguese Timor to agree on a cease-fire.

With regard to the effective maintenance of such a cease-fire, the Indonesian side proposed the contribution of an Indonesian military contingent to a joint Portuguese-Indonesian Peace-keeping force. The Portuguese side expressed its position that it would regard it as inconvenient to accept the proposition of a joint peace-keeping force as it would run contrary to Portuguese authority over Portuguese Timor. Instead, the Portuguese side requested Indonesia's cooperation in providing logistic facilities to the Portuguese Government in Timor, especially facilities to Portuguese air and sea transport. The Indonesian side expressed its readiness to study this request in the light of overall efforts to restore peace and stability in Portuguese Timor.

The Portuguese side acknowledged that the refugees constitute an acute and pressing problem to the Indonesian Government and people. With regard to the return of the refugees to their places of origin under adequate security protection, as demanded by the refugees of the Indonesian Government, the Indonesian side proposed that these refugees be escorted by Indonesian police units into Portuguese Timor. The Portuguese side expressed the view that such a proposition would be equally unacceptable to the concept of Portuguese authority and sovereignty over Portuguese Timor. The Portuguese side expressed its understanding of Indonesia's urgent need to resolve this problem, inter alia by endeavouring to secure the concurrence of the political parties now in control of the various areas of Portuguese Timor to provide such security protection to the refugees. However, in the view of the Portuguese side the refugee problem must be solved by both sides endeavouring to obtain the security protection of the political parties and by involving the collaboration of the International

Red

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- the establishment of a transitional governing mechanism in Portuguese Timor, in which all the political parties are equitably represented, to prepare for the implementation of the act of self-determination.

With regard to the achievement of a cease-fire, the two sides agreed to exert all efforts to persuade all the parties concerned in Portuguese Timor to agree on a cease-fire.

With regard to the effective maintenance of such a cease-fire, the Indonesian side proposed the contribution of an Indonesian military contingent to a joint Portuguese-Indonesian Peace-keeping force. The Portuguese side expressed its position that it would regard it as inconvenient to accept the proposition of a joint peace-keeping force as it would run contrary to Portuguese authority over Portuguese Timor. Instead, the Portuguese side requested Indonesia's cooperation in providing logistic facilities to the Portuguese Government in Timor, especially facilities to Portuguese air and sea transport. The Indonesian side expressed its readiness to study this request in the light of overall efforts to restore peace and stability in Portuguese Timor.

The Portuguese side acknowledged that the refugees constitute an acute and pressing problem to the Indonesian Government and people. With regard to the return of the refugees to their places of origin under adequate security protection, as demanded by the refugees of the Indonesian Government, the Indonesian side proposed that these refugees be escorted by Indonesian police units into Portuguese Timor. The Portuguese side expressed the view that such a proposition would be equally unacceptable to the concept of Portuguese authority and sovereignty over Portuguese Timor. The Portuguese side expressed its understanding of Indonesia's urgent need to resolve this problem, inter alia by endeavouring to secure the concurrence of the political parties now in control of the various areas of Portuguese Timor to provide such security protection to the refugees. However, in the view of the Portuguese side the refugee problem must be solved by both sides endeavouring to obtain the security protection of the political parties and by involving the collaboration of the International

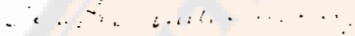
Red

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

and phases of the orderly and peaceful process of the decolonization in Portuguese Timor. They also agreed to maintain close cooperation and consultation in facing the issue of the decolonization of Portuguese Timor in the U.N.

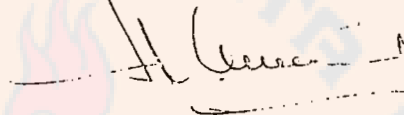
Done in Rome, November 3, 1975 .

For the Government of the Republic
of Portugal,



(E. MELO ANTUNES)
Minister for Foreign Affairs

For the Government of the Republic
of Indonesia,



(ADAM MALIK)
Minister for Foreign Affairs



PROCLAMATION

We, the People of Portuguese Timor and its Dependencies, herein represented by APCDETI-Associação Popular Democratica de Timor, UDT-União Democratica de Timor, KOTA-Klibur Oan Timur Aswain and Partido Trabalhista after a carefully analysed has been made after the unilateral action of Fretilin materialized through the "proclamation of independence" concerning the territory of Portuguese Timor, being such attitude considered consented under the role of the Government of Portugal, being such facts by their meanings in full contradiction to the real interest of Portuguese Timor people;

Considering that the conditions for self-determination of Portuguese Timor people regarding to choose freely its own destiny were not carried out in execution;

Having in mind the fact that several initiatives have been evidenced as a proof towards to meet a just and peaceful political solution on the timorese question, mainly

- The Macao Meeting to which Fretilin was voluntarily absent although the Government of Portugal did invite their representatives to be present.
- Readiness of the Government of Australia in order to provide conditions for a dialogue concerning the Timor question at its own territory.
- The Rome Meeting for mutual consultations held between the Foreign Affairs Ministers of Portugal and Indonesia which final conclusion was the issue of the Memorandum of Understanding between the two countries.

Efforts carried out by the Indonesian Government in sending over the bordering area the Minister of Foreign Affairs Mr. Adam Malik in order to implement the spirit of the Rome Meeting.

Consequently, being achieved the conclusion that the Fretilin deliberately ignored all the mentioned efforts;

Adding yet the fact that Fretilin has assumed illness attitudes that criminally avoid the Timor Portuguese people to express its legitimate aspirations; Attending the situation build up by Fretilin when declaring unilaterally the independence of Portuguese Timor draining out completely all the possibilities towards a peaceful solution of this problem according to the wishes of the people;

Feeling that owing the colonialist action of Portugal and Holland which during almost 500 years has deeply separated the blood links, ethnical affinities moral and cultural with the Indonesian People of the island of Timor;

Attending that this moment is to be considered quite opportune to re-establish the strong traditional links with the Indonesian Nation;

In the name of the All Mighty, and by the reasons previously referred, we do proclaim solemnly the Integration of the whole territory of the ex-Portuguese colony of Timor with the Indonesian Nation, as this proclamation means the most highly expression of the Portuguese Timor people feelings.

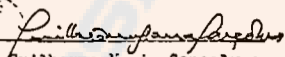
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

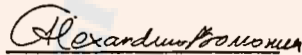
JCH
-2-
TWO

In accordance with the contents of the present Proclamation of Integration the Government of Indonesia and the People of Indonesia are requested to take the necessary steps in order to protect people's lives who themselves now are considering part of the Indonesian People yet living under the terror and fascist practices of Fretilin allowed by the Government of Portugal.

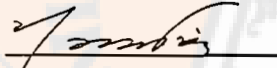
Dated at Balibó, November 30, 1975

On behalf of APODETI

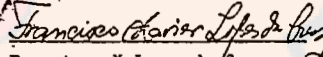

Guilherme Maria Gonçalves
Membro do Presidium

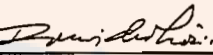

Alexandrino Borromeu
Membro do Presidium

On behalf of KOTA

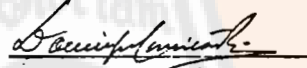

José Martins
Presidente

On behalf of UDT


Francisco X. Lopes da Cruz
Presidente


Domingos de Oliveira
Secretário-Geral

On behalf of PARTIDO TRABALHISTA


Domingos C. Pereira
Membro do Directorio

